

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)
DI KELURAHAN PIJORKOLING**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHE
NIM. 2450200005**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE *AHP*
(*ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*)
DI KELURAHAN PIJORKOLING**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHER
NIM. 2450200005**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)
DI KELURAHAN PIJORKOLING**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**HALIMAHTUS SAKDIAH DALMUNTHER
NIM. 2450200005**

PEMBIMBING I


Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.CL
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II


Dr. Utari Evy Cahyani, M.M
NIP. 19870521 201503 2 004

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

Hal: Tesis

a.n. Halimahtus Sakdiah Dalimunthe

Padangsidempuan, April 2026

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana Program Magister
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. Halimahtus Sakdiah Dalimunthe yang berjudul Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling. kami berpendapat bahwa, maka Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

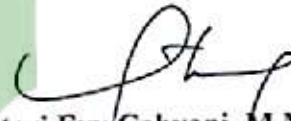
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.CL
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Utari Evy Cahyani, M.M
NIP. 19870521 201503 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM : 2450200005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUN
Padangsidempuan, April 2026
Saya yang Menyatakan,



HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHER
NIM. 2450200005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM : 2450200005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pascasarjana : Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : April 2026
Saya yang Menyatakan,



HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHE
NIM. 2450200005



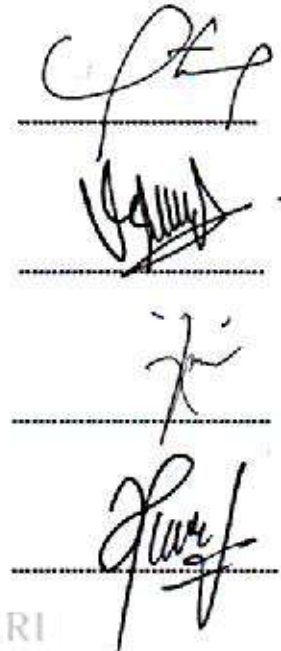
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://pascainsyahada.ac.id>

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
Nim : 2450200005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling

Penguji :

1. Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M.
Penguji Umum/ ketua
2. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
Penguji Ekonomi Syariah/ Sekretaris
3. Dr. Sarmiana Batubara, M.A
Penguji Isi dan Bahasa/ Anggota
4. Dr. Nurul Izzah, M.Si
Penguji Utama/ Anggota



Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 20 Mei 2026
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 83,75 /A
Indeks Prestasi Kumulatif : 4.00
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 87



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor : B-1266/Un.28/AL/PP.00.9/06/2026

JUDUL TESIS : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN
MENGUNAKAN METODE AHP (ANALYTICAL
HIERARCHY PROCESS) DI KELURAHAN
PIJORKOLING
NAMA : HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHE
NIM : 2450200005
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)

Padangsidimpuan, 8 Juni 2026

Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
Nim : 2450200005
Judul Tesis : Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) Di Kelurahan Pijorkoling

Program Pemerintahan dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi selama ini adalah dengan cara memberikan bantuan langsung kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) disetiap desa di seluruh Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu bantuan bersyarat dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang tentunya berimbas kepada kehidupan masyarakat luas termasuk kalangan masyarakat miskin. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah konsep kesejahteraan masyarakat, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak sehingga masyarakat mampu mengembangkan potensi dirinya dan memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sebaliknya, rendahnya kualitas kesehatan, pendidikan, tingkat pendapatan, serta kondisi ketidakberdayaan masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan. Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat di Kelurahan Pijorkoling dimana masyarakatnya masih banyak yang belum sejahtera oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan berupa PKH.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif analitis. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah lurah, Pendamping PKH, Koordinator PKH, Kabid PEMSOS dan PFM dan Masyarakat yang merupakan KPM PKH. dijadikan sebagai responden. Analisis data penelitian menggunakan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP) menggunakan aplikasi *Super Decisions*. Agar hasil yang diharapkan lebih akurat dan system yang dirancang tersusun secara sistematis. AHP ini merupakan model pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multi factor atau multi kriteria menjadi suatu bentuk hierarki.

Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian yaitu ada empat indikator kesejahteraan yang menjadi alternatif untuk mencapai efektivitas PKH, yaitu PKH Reguler, PKH + Pemberdayaan, PKH Digital, dan PKH Terintegrasi. Dari Hasil pengujian tersebut ranking dan bobot dari alternatif yang tertinggi terdapat pada indikator PKH + Pemberdayaan dengan indeks hasil sintesa tertinggi dengan nilai 1,000000, yang menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas PKH. Hal ini selaras dengan tujuan PKH yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, indikator PKH Digital memperoleh nilai sintesis terendah sebesar 0,663735, sehingga menjadi aspek yang relatif kurang diprioritaskan dibandingkan indikator lainnya

Kata Kunci: PKH, AHP, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Name : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
No. Reg : 2450200005
Title : Analysis of the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) on Community Welfare Using the AHP (Analytical Hierarchy Process) Method in Pijorkoling Village

The government's program to address the ongoing economic crisis is to provide direct assistance to poor households (RTM) in every village across Indonesia. The Family Hope Program (PKH) is a conditional government assistance program designed to compensate for rising fuel prices, which has had a significant impact on the lives of the wider community, including the poor. The theoretical basis for this research is the concept of social welfare, which refers to the condition where the needs of a decent life are met, enabling people to develop their potential and gain access to various social services. Social welfare can be measured by the fulfillment of health, education, and income. Conversely, low levels of health, education, and income, as well as conditions of social powerlessness, can be factors that hinder the realization of welfare. This situation is evident in the Pijorkoling Village, where many residents remain underprivileged. Therefore, the government is providing assistance in the form of the Family Hope Program (PKH).

This research is a qualitative and analytical study. The subjects were the village head, PKH facilitators, PKH coordinators, the Head of PEMSOS and PFM, and the community, who are PKH beneficiaries, served as respondents. The research data was analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP) using the Super Decisions application. This ensures more accurate results and a systematic system design. AHP is a decision support model that breaks down multi-factor or multi-criteria problems into a hierarchical form.

Based on the data analysis, the study concluded that there are four welfare indicators that serve as alternatives for achieving the effectiveness of the Family Hope Program (PKH): Regular PKH, PKH + Empowerment, Digital PKH, and Integrated PKH. The test results showed that the highest ranking and weighting of the alternatives was found in the PKH + Empowerment indicator, with the highest synthesis index of 1.000000, indicating that the empowerment approach plays a crucial role in increasing the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) implementation. This aligns with PKH's objectives, which focus not only on providing social assistance but also on increasing community independence and well-being. Conversely, the PKH Digital indicator received the lowest synthesis score of 0.663735, making it a relatively low-priority aspect compared to other indicators.

Keywords: PKH, AHP, Welfare.

المُلخَص

الاسم : حليلة السعدية داليمونته

رقم القيد : ٢٤٥٠٢٠٠٠٠٥

عنوان الرسالة : تحليل فعالية برنامج الأسرة الأملية في تحسين رفاهية المجتمع باستخدام منهج عملية التحليل الهرمي في قرية بيجوركولينج

تسعى الحكومة الإندونيسية إلى معالجة الأزمات الاقتصادية من خلال تقديم مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة في مختلف المناطق. ويعد برنامج الأسرة الأملية أحد أشكال المساعدات المشروطة التي تقدمها الحكومة كتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود، والذي يؤثر بدوره على مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. ويستند هذا البحث إلى مفهوم الرفاهية الاجتماعية التي تُعرّف بأنها حالة تحقق الاحتياجات الأساسية التي تمكن الأفراد من تطوير ذواتهم والحصول على الخدمات الاجتماعية، مثل التأهيل الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والتمكين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن ضعف مستويات الصحة والتعليم والدخل، إلى جانب محدودية القدرة المجتمعية، لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق الرفاهية، كما هو الحال في مجتمع قرية بيجوركولينج.

يعتمد هذا البحث على المنهج الكيفي التحليلي، حيث تشمل عينة الدراسة رئيس القرية، ومرافقي البرنامج، ومنسقيه، ورؤساء أقسام الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المستفيدين من البرنامج. وقد تم تحليل البيانات باستخدام منهج عملية التحليل الهرمي بمساعدة أحد التطبيقات الحاسوبية الداعمة لاتخاذ القرار، والذي يُعد أداة لتحليل المشكلات متعددة المعايير ضمن هيكل هرمي منظم. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود أربعة مؤشرات رئيسية للرفاهية كبداية لتحقيق فعالية البرنامج، وهي: البرنامج العادي، والبرنامج مع التمكين، والبرنامج الرقمي، والبرنامج المتكامل. وقد أظهرت النتائج أن مؤشر البرنامج مع التمكين يحتل المرتبة الأعلى بقيمة تركييبية بلغت ١٠٠٠٠٠٠٠، مما يدل على دوره الكبير في تعزيز فعالية البرنامج وتحقيق أهدافه. في المقابل، جاء مؤشر البرنامج الرقمي في المرتبة الأدنى بقيمة ٠٠٠٦٦٣٧٣٥.

الكلمات المفتاحية : برنامج الأسرة الأملية، التحليل الهرمي، الرفاهية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) Di Kelurahan Pijorkoling” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta wakilnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Ibu Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Ibu Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ibunda tercinta Erni Ati Lubis perempuan yang tak pernah tergantikan baik dunia dan akhirat dan Ayahanda tauladan hidup Lumut Dalimunthe yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah

bayak berkorban serta memberikan dukungan moral serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putrinya. Kedua beliau merupakan semangat peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini. beserta Kakak kandung Reni Rahayu Dalimunthe, Kakak kandung Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I dan Abang Marakali Harahap, S.Pd.I, Kakak kandung Nurmasito Dalimunthe, Kakak kandung Nelmi Dahannum Dalimunthe, S.E, Adek kandung Nurkhoiriyah Dalimunthe dan Adek kandung Khoirul Fazri Dalimunthe. Beserta seluruh keluarga besar peneliti atas Doa dan dukungan yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat terdekat, teman-teman saya dan juga rekan-rekan seperjuangan angkatan 2024 pada Prodi ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan tesis ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat

kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Maret 2026

Halimahtus Sakdiah Dalimunthe

Nim. 2450200005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	ḥah		
— /	srah		
—	mmah		

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا.....ى.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى.....	Kasrah dan ya	ī	dan garis di bawah
و.....و.....	dommah dan wau	ū	dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	
COVER PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DIREKTUR PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المُلخَص	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Batasan Masalah	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	23
1. Kerangka Teori	23
a. Teori Modal Sosial (<i>Social Capital Theory</i>)	23
b. Teori Modal Manusi (<i>Human Capital Theory</i>)	25
c. Teori Hubungan Manusia (<i>Human Relation Theory</i>)	27
d. Teori Pemberdayaan (<i>Empowerment Theory</i>)	27
e. Teori Efektivitas (<i>Effectiveness Theory</i>)	30
f. Teori Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare Theory</i>)	31
g. Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Islam	33
h. Peran Pemerintah	42
i. Program Keluarga Harapan (PKH)	46
B. Penelitian Terdahulu	62
C. Kerangka Pikir	75
 BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	77
B. Jenis Penelitian	77
C. Unit Analisis	78

D. Sumber Data	79
E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Teknik Analisis Data	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	88
1. Gambaran Umum Kelurahan Pijorkoling	88
2. Potensi	89
3. Sejarah	90
B. Deskripsi Responden Penelitian	95
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	96
1. Deskripsi Hasil wawancara	96
2. Pembahasan Hasil Wawancara	99
3. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	103
4. Pembahasan Hasil Penelitian	105
5. <i>Super Decisions</i>	118

BAB V HASIL PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin	3
Tabel I.2	Data Penerima Bantuan PKH di Kelurahan Pijorkoling ..	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	64
Tabel III.1	Skala Perbandingan Berpasangan.....	86
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	91
Tabel IV.3	Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling .	92
Tabel IV.4	Pendidikan di Kelurahan Pijorkoling	93
Tabel IV.5	Jumlah TK di Kelurahan Pijorkoling	94
Tabel IV.6	Jumlah Paud di Kelurahan Pijorkoling	95
Tabel IV.7	Deskripsi Responden Penelitian	95
Tabel IV.8	Skala Prioritas Komponen PKH	103
Tabel IV.9	Skala Perbandingan Berpasangan	112
Tabel IV.10	Hasil Perbandingan Antar Node Kriteria	119
Tabel IV.11	Perbandingan Antar Node Ketepatan Sasaran dengan Cluster Alternatives	120
Tabel IV.12	Perbandingan Antar Node Kesejahteraan Ekonomi dengan Cluster Alternatives	120
Tabel IV.13	Perbandingan Antar Node Perbandingan Antar Node Akses Pendidikan dengan Cluster Alternatives	121
Tabel IV.14	Perbandingan Antar Node Perbandingan Antar Node Akses Kesehatan dengan Cluster Alternatives.....	122
Tabel IV.15	Perbandingan Antar Node Perbandingan Antar Node Efektivitas Pendampingan dengan Cluster Alternatives·	122
Tabel IV.16	Perbandingan Antar Node Keberlanjutan dan Kemandirian dengan Cluster Alternatives.....	123
Tabel IV.17	Hasil Sintesa AHP Super Decisions	123

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir	76
Gambar III.1	Kerangka <i>Hierarchy</i> Metode AHP	86
Gambar IV.1	Peta Kelurahan Pijorkoling	88
Gambar IV.2	Struktur <i>Hierarchy</i> PKH	104
Gambar IV.3	Struktur AHP <i>Super Decisions</i>	119



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Instrumen Wawancara
- II. Lembar Penilaian Responden-FGD AHP
- III. Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Penilaian Kriteria
- IV. Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria
- V. Dokumentasi/Poto saat Penelitian
- VI. Surat Persetujuan Judul Tesis
- VII. Surat Penunjukan Pembimbing Tesis
- VIII. Surat Permohonan Izin Riset ke Kepala Lurah Kelurahan Pijorkoling
- IX. Surat Balasan Izin Riset dari Kelurahan Pijorkoling
- X. Permohonan Izin Riset ke Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
- XI. Balasan Izin Riset dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
- XII. Daftar Riwayat Hidup Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan terhadap masyarakat merupakan upaya yang harus diperhatikan oleh negara, dan permasalahan ini sangat urgensi terutama bagi negara-negara berkembang salah satunya negara Indonesia. Indonesia masih dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan penangguran, dan bahkan di tingkat internasional berada diperingkat yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga. Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia dinilai semakin menjauh dari tingkat kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya kesenjangan, ketimpangan, dan pengangguran di masyarakat.¹

Tingkat kesejahteraan di dalam masyarakat merupakan cerminan keberhasilan negara dalam memajukan perekonomian dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia dan mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan baik. Sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya baik itu pangan, sandang dan papan. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan dalam membentuk suatu negara kesejahteraan, upaya yang dilakukan adalah melakukan pembangunan-pembangunan yang akan dapat meningkatkan

¹Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 13, 2021): hlm.321.

kesejahteraan sosial dan ekonomi dari setiap warga negara sehingga mencapai suatu standar hidup yang minimal.²

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Soegijoko Seperti dikutip dari Frederic W. Nalle, menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.³

Kemiskinan dipedesaan cenderung meningkat sebagai akibat permasalahan yang kompleks. Kemiskinan didesa terjadi sebagai imbas dari pembangunan yang tidak merata, akses terhadap pendidikan yang sulit dan berakibat pada minimnya kemahiran dan ini menjadi penyebab banyaknya pengangguran didesa. Lapangan kerja yang minim tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, ditambah banyaknya lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian telah beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Kemiskinan

²E. Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* 31, No. 2 (June 3, 2019), hlm.25

³Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha, *Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan,UNDIP: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2018, hlm. 67

di kota tentu berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa, kemiskinan di kota lebih disebabkan adanya faktor ekonomi dan kebijakan.⁴

Bisa dilihat perkembangan kemiskinan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sepuluh tahun terakhir yang dimana data diawal terlihat kemiskinan menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2024.

Tabel I.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2016	28,01	10,86
2	2017	27,77	10,64
3	2018	25,95	9,82
4	2019	25,14	9,41
5	2020	26,42	9,78
6	2021	27,54	10,14
7	2022	26,16	9,54
8	2023	25,90	9,36
9	2024	25,22	9,03
10	2025	23,85	8,47

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 penduduk miskin mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen, pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 27,77 juta jiwa ataupun 10,64 persen, pada tahun 2018 menurun menjadi 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen, pada tahun 2019 terus menurun menjadi 25,14 atau 9,41 persen,

⁴Ridena, S. (2021). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Perdesaan. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32630/Sukowati.V5i1.196>

pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 26,42 atau 9,78 persen, pada tahun 2021 terus mengalami kenaikan menjadi 27,54 atau 10,14 persen, pada tahun 2022 terus menurun menjadi 26,16 atau 9,54 persen, pada tahun 2023 terus menurun menjadi 25,90 atau 9,36 persen, pada tahun 2024 terus menurun menjadi 25,22 atau 9,03 persen. Lalu pada tahun 2025 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu 23,85 ataupun 8,47 persen.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan menjadi landasan salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan (PKH). Tujuan program PKH adalah membantu keluarga miskin menjadi lebih terencana dan terarah dengan menurunkan beban keuangan dan meningkatkan pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.⁵

Pemerintah Indonesia memiliki empat tujuan dalam mengembangkan program PKH, yaitu sebagai berikut: Pertama, situasi yang jauh lebih buruk terjadi di beberapa kabupaten, dengan perkiraan terdapat 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memperoleh pendapatan rata-rata hanya Rp 130.000,00 per bulan. Kedua, tingginya kasus stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Anak-anak di Indonesia masih memiliki berat badan di bawah batas normal, yang menunjukkan bahwa negara ini masih mempunyai tingkat kekurangan gizi yang signifikan di kalangan generasi

⁵Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V4i1.38294>

muda. Selain itu, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang masih mengonsumsi makanan yang sangat rendah gizinya. Ketiga, Indonesia masih mempunyai angka kematian ibu yang tinggi. Untuk setiap 100.000 kelahiran, sekitar 130 ibu meninggal setelah melahirkan, angka ini yang tertinggi di ASEAN. Program bantuan nutrisi perlu ditekankan seperti Negara Amerika Serikat memberikan bantuan nutrisi terbesar di negara itu untuk populasi berpenghasilan rendah.⁶

Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 592/SK/PPM.PPK PAN.2/12/2017, pendamping sosial idealnya mengawal pelaksanaan pendaftaran KKS hingga penyaluran bansos kepada KPM serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan bantuan pangan agar masyarakat KPM dapat mengelola dana bantuan sosial dengan baik dan tepat. Pada akhirnya pengelolaan yang tepat dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan KPM.⁷

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan proses strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya.⁸ Dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan terdiri dari faktor pendorong yaitu kebutuhan ekonomi, kesadaran masyarakat melestarikan potensi lokal unggulan, dan ketertarikan dalam kegiatan sesuai dengan

⁶Lorts, C., Tasevska, N., Adams, M. A., Yedidia, M. J., Tulloch, D., Hooker, S. P., & OhriVachaspati, P. (2019). *Participation In The Supplemental Nutrition Assistance Program And Dietary Behaviors: Role Of Community Food Environment*. *Journal Of The Academy Of Nutrition And Dietetics*, 119(6), 934-943.E2. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.11.021>

⁷Op. Cit. (2022).

⁸Mulyono, S. E. (2020). *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.V14i1.964>

kemampuannya.⁹ Semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin banyak pembelajaran dan perolehan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan sosial.¹⁰ Peran Pendamping PKH juga diharapkan dapat mendukung upaya tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Inisiatif ini dapat membantu memenuhi setidaknya 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peran ini mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku yang diberikan masyarakat kepada setiap individu yang menduduki jabatan tertentu.¹¹

Dalam hal ini, Secara mental, mengeksplorasi titik temu antara SDG 4, yang berkomitmen untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas dan adil, dan SDG 17, yang mendorong kemitraan global untuk mencapai SDGs.¹² Pemantauan lingkungan berperan penting dalam menginformasikan pengembangan kebijakan dan sistem tata kelola berbasis bukti yang bertujuan untuk mencapai SDG. Dengan menyediakan data penting mengenai tren dan tekanan lingkungan, upaya pemantauan merupakan alat dasar bagi pembuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁹Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). *Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal Di Desa Menari Tanon*. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 1–16. <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i1.34481>

¹⁰Kibukho, K. (2021). *Mediating Role Of Citizen Empowerment In The Relationship Between Participatory Monitoring And Evaluation And Social Sustainability*. *Evaluation And Program Planning*, 85, 101911. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101911>

¹¹Jusrianto, J. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendukung Sekretaris Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang Administrasi*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.285>

¹²Menashy, F., & Zakharia, Z. (2023). *Partnerships For Education In Emergencies: The Intersecting Promises And Challenges Of Sdg 4 And Sdg 17*. *International Journal Of Educational Development*, 103, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102934>

kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan dan melacak kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan.¹³

PKH telah berhasil mencapai SDGs berikut: Pertama, kemiskinan harus diberantas. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim bahwa peningkatan bantuan sosial tunai sebesar 87,6% menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan di Indonesia antara tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2017, terdapat enam juta penerima manfaat PKH, dan pada tahun 2018, terdapat 10 orang juta. Kedua, untuk mengentaskan kelaparan, PKH mendorong peserta untuk sering mengunjungi layanan kesehatan dan mengelola kecukupan gizinya. Selain itu, bantuan PKH dilengkapi dengan sejumlah layanan tambahan, salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupaya memberikan gizi seimbang kepada pengguna bantuan dan meningkatkan ketahanan pangannya. Ketiga, memiliki kesehatan yang baik dan kesejahteraan, adanya PKH telah menyelamatkan ibu hamil yang terkendala ekonomi, karena mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan secara gratis, menurut hasil survey MSC (2019). Selain itu, peserta PKH dibantu untuk mendapatkan layanan tambahan tambahan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Keempat, pendidikan berkualitas tinggi: 78% anak penerima dana PKH bersekolah, dan

¹³Nakhle, P., Stamos, I., Proietti, P., & Siragusa, A. (2024). *Environmental Monitoring In European Regions Using The Sustainable Development Goals (Sdg) Framework*. *Environmental And Sustainability Indicators*, 21, 100332. <https://doi.org/10.1016/J.Indic.2023.100332>

sebagian besar dana PKH digunakan untuk kebutuhan sekolah, menurut data survei MSC tahun 2019.¹⁴

Anak-anak penerima PKH juga didorong untuk berusaha. Kelima, adanya kesetaraan gender: seluruh penerima PKH adalah perempuan. Persentase siswa perempuan yang terdaftar di sekolah juga meningkat. Keenam, melalui *Family Development System* (FDS) atau sesi pengembangan kapasitas keluarga, PKH membantu penerima manfaat memahami pentingnya kebersihan diri dan lingkungan dalam kaitannya dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ketujuh, energi bersih dan murah. Selain bantuan finansial, nasabah PKH juga menerima subsidi energi listrik dan elpiji tiga kilogram. Penerima PKH bisa mendapatkan dan memanfaatkan LPG dan listrik dengan bantuan tambahan ini. Kedelapan, perluasan lapangan kerja dan ekonomi yang terhormat: penerima manfaat PKH menerima bantuan untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan pemasaran; mereka juga belajar tentang perencanaan keuangan dan perusahaan serta menerima pelatihan kewirausahaan. Infrastruktur, industri, dan inovasi menempati peringkat kesembilan.¹⁵

Persyaratan paling krusial untuk menciptakan kebijakan dan program yang berhasil adalah ketersediaan data yang akurat.¹⁶ PKH telah

¹⁴Ika Rini Harmonis, Abdul Malik, *Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG's Di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, *Future Academika, The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* Volume 2, No 3, Agustus 2024 pp. 107-124, e-ISSN: 3025-7905, p-ISSN: 3026-166X.hlm. 111.

¹⁵*Ibid*, hlm. 111

¹⁶Terru, I., Kurniawan, B. A., & Ismail, I. (2023). Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1639>

menunjukkan kreativitas dalam mengalokasikan dana bantuan. Bantuan PKH kini diberikan tanpa memerlukan uang tunai. pengguna dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang cara kerjanya mirip dengan ATM. KKS merupakan karya inovatif yang awalnya dimanfaatkan oleh negara-negara yang menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat menuntut mereka untuk menjembatani berbagai kepentingan, termasuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, skenario ini seringkali menimbulkan delemas, karena meskipun pendamping harus mampu mendukung kelangsungan program di lapangan, namun keadaan dan situasi sebenarnya seringkali menentukan sebaliknya.¹⁷

Pengalokasian PKH kewilayah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, Pada tahun 2014 PKH telah melingkup pada 33 Provinsi, 336 kabupaten/kota, 3429 kecamatan, dengan total penerima 2,7 juta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).¹⁸ Dalam program PKH ini, mewajibkan RTM selalu peduli terhadap Kesehatan ibu hamil dan selalu memberikan imunisasi secara rutin dan selalu memperhatikan tumbuh kembang anak, termasuk yaitu menyekolahkan anak-anak, yang akan merubah sikap dan perilaku RTM terhadap pentingnya kesehatan serta pendidikan. Dengan adanya Program PKH ini dikelurahan Pijorkoling yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan sekolah dan kesehatan, yang ditujukan akan mengurangi beban

¹⁷Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>

¹⁸Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia dan Kedepan*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 134

masyarakat Kelurahan Pijorkoling yang selalu menjadi masalah terbesar bagi keluarga-keluarga miskin. Bisa dilihat perkembangan penerima bantuan PKH berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan di Kelurahan Pijorkoling tiga tahun terakhir berikut.

Tabel I.2.
Data Penerima Bantuan PKH Di Kelurahan Pijorkoling

No	Tahun	Penerima PKH (Per KK)
1	2023	309
2	2024	303
3	2025	266

Sumber: Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pijorkoling Tahun 2023 berjumlah 309 Keluarga, Tahun 2024 mengalami penurunan penerima PKH yaitu berjumlah 303, dan Tahun 2025 mengalami penurunan penerima PKH berjumlah 266 Keluarga. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat di Kelurahan Pijorkoling masih ada Keluarga yang belum bisa dikatakan sejahtera sehingga masih masuk dalam kategori Penerima PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan mewajibkan RTM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh program. Dengan ketentuan, penerima bantuan PKH adalah RTM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD, dan SMP, SMA/SMK serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Perbedaan kriteria yang digunakan oleh PKH dengan program bantuan lain, mengakibatkan sedikit sulitnya untuk menentukan prioritas komponen dari RTM yang menjadi peserta PKH atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kesalahpahaman sering terjadi pihak masyarakat tentang yang pantas dan tidak pantas untuk mendapatkan bantuan dari program ini. Contohnya, ketika keluarga yang keadaan ekonominya dinilai cukup, lebih diutamakan untuk menjadi peserta PKH dibandingkan dengan keluarga yang keadaan ekonominya sedikit dibawah keluarga miskin yang memiliki komponen-komponen yang termasuk pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (PKH, 2016), bukan hanya dinilai dari kondisi ekonomi keluarga sasaran saja. Sehingga sasaran program ini berbeda dengan program bantuan yang lain.¹⁹

Kondisi seperti itu, maka perlu dibuatnya suatu sistem pengambilan keputusan yang berfungsi untuk menentukan prioritas komponen RTM yang dapat digunakan oleh semua orang. Penerapan metode yang akan dibuat ini bertujuan untuk mempermudah kinerja serta meminimalisir tingkat kesalahpahaman masyarakat akan langkah penyaluran bantuan yang dilakukan oleh PKH. Agar tujuan ini dapat berhasil, maka dibutuhkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk pembobotan dan pengurutan setiap kriteria komponen yang ada, mulai yang paling tinggi hingga rendah.

AHP dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1976. AHP merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan

¹⁹PKH. 2016. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial.

multi-kriteria untuk pemecahan masalah dalam dunia nyata. Keuntungan lain dari metode ini adalah penggunaan hierarki struktur multi-periode, multi-orang dan multi-kriteria untuk masalah yang kompleks, karena langkah-langkah dari solusi termasuk mengkonfigurasi hierarki ini dan sintesis hasil penilaian. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.²⁰

AHP merupakan merupakan alat penelitian yang mapan dan efektif untuk pengambilan keputusan yang kompleks dengan menggunakan perbandingan berpasangan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan prioritas sehingga dapat memilih pilihan terbaik di antara beberapa alternative.²¹

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan berbagai kriteria. Karena sifatnya yang multikriteria, *Analytical Hierarchy Process* cukup banyak digunakan dalam penyusunan prioritas penelitian, pihak manajemen lembaga penelitian sering menggunakan

²⁰Hamsiah, *Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Dosen*, *EXPLORER Journal of Computer Science and Information Technology* E-ISSN 2774-4647

²¹Aznan Hasana, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Administrasi Zakat di Malaysia: Pendekatan AHP*, *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam Global*, Vol. 9. No. 2 (2021) 029-037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-ISSN: 2338-7920, p-ISSN: 2338-2619

beberapa kriteria yang diinginkan. Dengan memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan nantinya dapat membantu para pembuat keputusan dalam memutuskan alternatif-alternatif terbaik dalam menentukan rumah tangga sasaran yang tepat untuk menerima bantuan langsung tunai tersebut.²²

Metode ini juga disebut perbandingan berpasangan. Sementara itu, hasil akhir dari semua prioritas akan menghasilkan sintesis prioritas. Prioritas setiap elemen akan diperoleh. Terdapat tiga tahap yang diselesaikan. Tahap pertama adalah konstruksi model atau dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun kompleksitas permasalahan dalam jaringan AHP. Pada tahap ini, tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian, kompleksitas permasalahan tersebut distrukturkan ke dalam kerangka kerja AHP.

Pemahaman permasalahan dapat dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan wawancara mendalam. Setelah itu, model divalidasi oleh para ahli dan praktisi yang berperan sebagai responden. Tahap kedua adalah kuantifikasi model atau perbandingan berpasangan. Pada tahap ini, survei terhadap para ahli dan praktisi dilakukan menggunakan kuesioner AHP. Kuesioner dikembangkan sesuai kerangka kerja AHP dengan skala numerik yang telah ditentukan. Kuesioner

²²Aminudin, Nur dan Ida Ayu Puspita Sari. 2017. *Sistem Pendukung KeputusanPenerima Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Desa Bangun Rejo. Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hiearchy Process (AHP)*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model). 5 : 66-72

didistribusikan secara terpisah untuk setiap responden. Kuesioner diisi dengan memberikan skala numerik 1-9 untuk mengetahui pertanyaan mana yang memiliki pengaruh lebih besar dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Langkah ketiga adalah sintesis dan analisis hasil. Pemrosesan dan sintesis data dilakukan menggunakan perangkat lunak AHP, Super Decisions. Setelah data diolah menggunakan Super Decisions, kesimpulan dan keputusan diperoleh.²³

Di Indonesia kewajiban pemerintah pada pemecahan atas perkara kemiskinan sudah tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 ayat 1, juga Pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial kepada masyarakat, lalu Pasal 34 ayat 3 tentang pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.²⁴ Di pasal-pasal itu membuktikan hak-hak setiap rakyat negara serta bagaimana juga kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Ibu Ayu yaitu selaku pendamping PKH di kelurahan Pijorkoling yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dimana berupa bantuan Tunai

²³Jaenal Effendia, Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas IPB, Indonesia, *Strategi Prioritas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Skema Syariah di Indonesia Indonesia: Pendekatan Internal, Pasar, dan Regulasi*, Journal Ekonomi dan Bisnis Islam Global, Vol. 9. No. 2 (2021) 109-120, Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta e-ISSN: 2338-7920, p-ISSN: 2338-2619

²⁴UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bersyarat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial, tetapi masih ada anggota PKH yang sudah mendapat PKH selama 5 sampai 10 Tahun yang belum mau untuk graduasi mandiri berarti ini dalam artian mereka belum merasa sejahtera padahal sudah mendapat bantuan sosial dimana tujuan dari graduasi mandiri ini adalah pemerintah ingin keluarga penerima PKH ini mampu mandiri secara ekonomi setelah mendapat dukungan berupa bantuan sosial sehingga nantinya bisa berganti dengan orang yang memang layak untuk dibantu”²⁵.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahru Rozi yaitu selaku Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menyatakan bahwa: PKH ini kan diperuntukkan untuk bantuan bersyarat atau program bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi penerima PKH ini baik anak sekolah, lansia, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jika kita lihat dari beberapa KPM yang menerima program pemberdayaan PKH ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya. Kalau dari bantuan PKH yang diberikan kalo menurut kami ini hanya sebatas stimulus artinya untuk memberi penyemangat hanya sebatas bukan untuk menambah pundi penghasilan Tentunya meningkatkan pendapatan orang miskin, mengurangi

²⁵Wawancara Ibu Ayu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

beban pengeluaran dan menciptakan perilaku dan kemandirian dan graduasi mandiri khususnya.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain yaitu selaku Lurah di Kelurahan Pijorkoling yaitu PKH ini sangat membantu para penerima manfaat di desa ini karena dengan adanya program ini meringankan sedikit beban keluarga misalnya dalam biaya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi jika untuk berkelanjutan membuat masyarakat terlena dan manja malah ada beberapa masyarakat yang cemburu sehingga memunculkan perdebatan”.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva selaku Kabid PEMSOS dan PFM di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yaitu PKH program Pemerintah dari Kemensos untuk memberikan bantuan bersyarat. Dimana bantuan ini banyak jenisnya, seperti bantuan untuk pemberdayaannya, bantuan untuk rehabilitasi sosial, dan bantuan perlindungan dan jaminan. PKH wajib dengan pemberdayaan ekonomi itulah tujuan PKH itu sendiri dan tugas pendamping yang mengadakan pertemuan tiap bulannya supaya KPM itu bisa mandiri jangan hanya berharap dapat bantuan tetapi bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan itulah bedanya PKH dengan bantuan lainnya.²⁸

²⁶Wawancara Bapak Fahru Rozi selaku Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 15.00 WIB)

²⁷Wawancara Bapak Zulkarnain selaku Lurah dari Kelurahan Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota. Padangsidimpuan pada (Senin, 17 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

²⁸Wawancara Ibu Eva selaku Kabid PEMSOS dan PFM di Dinas Sosial Kota. Padangsidimpuan pada (Selasa, 24 Februari 2026 Pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota PKH yaitu Ibu Suriani menyatakan bahwa: “saya sangat senang menjadi anggota PKH selain terbantu dalam ekonomi, kami juga diarahkan pendamping untuk berusaha mandiri maksudnya setelah kami menerima bantuan kami dapat memanfaatkannya sebaik mungkin”.²⁹

warga yang belum mendapat PKH yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa: “masih ada warga yang belum menerima manfaat PKH ini padahal dari sisi ekonomi bisa dikatakan miskin, lalu bagaimana seharusnya tindakan pemerintah dalam hal ini dimana tujuan dari PKH ini sebenarnya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat khususnya yang dikategorikan sebagai kurang mampu”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yang terlibat dengan Program Keluarga Harapan (PKH) hasil wawancara menunjukkan bahwa program PKH memberikan manfaat dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketergantungan penerima bantuan, belum optimalnya kemandirian ekonomi penerima manfaat, serta adanya persepsi ketidaktepatan sasaran di tengah masyarakat di Kelurahan Pijorkoling. Melihat program PKH sebagai tanda kesungguhan otoritas publik dalam mengalahkan isu kemiskinan sebagaimana bantuan-bantuan tertentu dari PKH yang harus dibuktikan

²⁹Wawancara Ibu Suriani KPM Penerima PKH di Kelurahan Pijorkoling . Padangdisimpuan Tenggara pada (Jum’at, 13 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB)

³⁰Wawancara dengan Warga di Kelurahan Pijorkoling, (Jum’at, 13 Februari 2026 Pukul 11.30)

dengan pengalaman sehingga peningkatan Program PKH memiliki bukti nyata yang dapat dipersentasikan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat peneliti, peneliti tertarik untuk mengarahkan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) Di Kelurahan Pijorkoling”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Anggota PKH telah mendapat banyak manfaat termasuk manfaat di bidang materi, namun masih banyak anggota PKH yang terlibat pinjam meminjam baik Bank, koperasi dan lainnya.
2. Anggota PKH yang sudah lebih dari 5 sampai 10 Tahun mendapat bantuan masih ada yang belum mau untuk graduasi mandiri supaya bisa berganti dengan RTM yang lebih butuh akan manfaat PKH ini.
3. Adanya RTM yang belum menjadi anggota PKH tetapi secara ekonomi itu layak dibantu untuk mendapat manfaat dari PKH ini.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang dikaji yaitu peneliti hanya membahas tentang Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dengan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di Kelurahan Pijorkoling.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling?
2. Bagaimana Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling?
3. Bagaimana strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan Pijorkoling ?
4. Bagaimana prioritas strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan Pijorkoling ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian merupakan suatu penegasan yang akan dicapai. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling.

2. Untuk menganalisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling.
3. Untuk merumuskan strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling.
4. Untuk menemukan prioritas strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mempunyai dua makna yaitu meliputi kegunaan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan juga sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam kajian dibidang ekonomi dan sosial khususnya dalam menfungsikan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini memungkinkan akan memberikan manfaat atau kegunaan serta makna tersendiri pada beberapa kalangan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

2. Bagi Pendamping Penerima Program Keluarga Harapan

Hasil dari penelitian ini juga bisa dijadikan salah satu bahan temuan baru serta memberi masukan bagi pendamping dalam membina masyarakat untuk memanfaatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman tersendiri yang bersifat baru dan berharga yang akan membantu serta memperluas khazanah keilmuan peneliti, penambahan wawasan pola pikir, dan juga penelitian ini memberikan bahan atau sumbangan pengetahuan bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ditinjau dari perspektif ekonomi islam pada Kelurahan Pijorkoling.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan tentang peningkatan peran pemerintah untuk membantu menuntaskan kemiskinan yang terdapat dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

5. Bagi Akademik dan Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian khususnya mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan dimana kajian pembahasannya tentang perkembangan salah satu Pprogram Pemerintah dalam mengatasi masalah Kemiskinan. Juga bisa menjadi salah satu sumber pustaka bagi mahasiswa khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah dalam perkuliahan

maupun untuk kepentingan lainnya yang pokok kajiannya terdapat kesamaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

a. Teori Modal Sosial (*Sosial Capital Theory*)

Modal sosial hingga saat ini menjadi pembicaraan dalam kajian sosiologi sebagai konsep yang masih digunakan untuk menganalisis masyarakat. Bentuk modal sosial muncul dari hubungan-hubungan antara individu, keluarga, kelompok, komunitas yang merupakan akses memperoleh keuntungan bernilai atau sumber daya. Maka dari itu, modal sosial berfungsi dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.³¹

Modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial yang menyangkut berbagai hal seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Dengan membangun hubungan dan menjaga hubungan tersebut untuk berlangsung dalam kurun waktu tertentu menunjukkan bahwa individu mampu bekerja bersama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dicapai sendirian. Individu

³¹ Irwan. (2022). *Sosiologi Kebencanaan : Modal Sosial, Media Sosial dan Resiliansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

berhubungan melalui serangkaian jaringan dan cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut.³²

Modal sosial juga bernilai penting dalam suatu proses pengembangan masyarakat, dengan adanya modal sosial dalam suatu masyarakat yang menjadi perekat antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Modal sosial yang dimaksud disini ialah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu baik dalam perilaku ke dalam (internal kelompok) maupun perilaku keluar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain).³³

Menurut Lyda Judson Hanifan dalam tulisannya yang berjudul “*The Rural School Community Centre*”, mengatakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat.³⁴ Dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta

³² Santoso, W. M. (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia : Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³³ Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi 2012)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³⁴ Hanifan, L.J. (1916). *The Rural School Community Centre*. *Annals of the American of Political and Social Science*, 67, 130-138.

hubungan sosial dan kerja sama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.³⁵

Adanya berbagai pendapat di atas mengenai modal sosial, maka dalam penelitian kali ini modal sosial yang dimaksud ialah penerapan elemen modal sosial seperti jaringan sosial yang merupakan suatu ikatan antara orang atau kelompok yang diperkuat dengan kepercayaan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya kemudian dipertahankan oleh norma yang mengikat dua belah pihak. Hal tersebut akan mendorong hubungan kerja sama antar anggota kelompok dan kelompok satu dengan kelompok lainnya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

b. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker, menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dapat disebut sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat

³⁵Dollu, E. B. S. (2019). *Modal Sosial: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur*. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga nilai-nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka.

Menurut Becker, Modal manusia mengacu pada cadangan keterampilan dan pengetahuan produksi manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang, menggambarkan semakin tingginya modal manusia yang diharapkan. Maka dari itu, Investasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, hal ini guna semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama, karena pada implementasinya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan karena pendapatan yang mereka peroleh difokuskan untuk kebutuhan pangan.³⁶

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia sebagaimana yang diungkapkan dalam teori human capital oleh Gary S Becker jika manusia bukan hanya sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Teori human capital ini didukung pula oleh teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse pada tahun 1953 yaitu tingginya angka kemiskinan disebabkan

³⁶Becker, G. S. (1993). Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. In Notes and Queries (Vols. s1-IV, Issue 92). <https://doi.org/10.1093/nq/s1-IV.92.83-a>

oleh peningkatan jumlah penduduk, yang menyebabkan penurunan investasi publik di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dapat menghambat proses peningkatan IPM hingga dapat menyebabkan produktivitas yang rendah dan meningkatnya angka kemiskinan.³⁷

c. Teori Hubungan Manusia (*Human Relation Theory*)

Teori Human Relations adalah Studi Hawthorne yang dilakukan pada tahun 1920an dan 1930 an pada Pabrik dan perusahaan Western Electric Company, merupakan studi organisasi bersifat mitologis dalam sebuah organisasi. Sehingga detail tentang apa yang ada disana dilaporkan dalam berbagai versi yang bisa saja terjadi dalam waktu yang berbeda beda. Buku-buku yang terkait dalam buku ini menyebutkan dalam tahun 1923, 1924 dan 1927 tanggal dimulainya studi ini. Terkait dengan mitologi ada pemisah antar detail yang tepat antara teori hubungan manusia yang diterima secara luas. Karena teori hubungan manusia adalah hasil kerja selama bertahun-tahun dan merupakan banyak orang yang mengandung banyak variasi dan nuansa pada teori ini.³⁸

d. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas

³⁷Nadhifa Ramdhanisa Nunuk Triwahyuningtyas, *analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, E-ISSN: 2809-8544, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vo.1. No. 7 (2022).

³⁸Nicholas Rose, *Human Relations Theory and People Manajement . Eoropean Management Journal* 34 (2005); 43.

mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia atau masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.³⁹

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.

³⁹Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses pembangunan kapasitas individu dan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. melalui pelatihan keterampilan, manajemen usaha, dan pengembangan produk olahan, yang secara nyata mampu meningkatkan pendapatan keluarga dalam kegiatan local.⁴⁰

Berbagai inisiatif, seperti program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha, telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Misalnya, program UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan memperluas pasar, dan juga upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonom. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi, diharapkan bisa tercipta ketahanan ekonomi yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan sosial di berbagai daerah, pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).⁴¹

⁴⁰Berutu, N., Siregar, Z., Budiwiwaramulja, D., & Hodriani, H. (2020). PKM pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk olahan pisang sale Sidodadi Ramunia. *Pelita Masyarakat*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v1i2.3219>

⁴¹Fretty Luciana Malau Gurning , Halking, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan

e. Teori Efektivitas (*Theory of Effectiveness*)

Efektivitas pada menunjukan pada taraf pencapaian hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, efektivitas merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau Efektivitas pencapaian tujuan, merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.⁴² Siagian memberikan definisi sebagai berikut "Efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya".⁴³

Sosial Humaniora Volume. 5, Nomor. 4 Desember 2025 e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, hlm. 774-796

⁴²Ai Sri Wahyuni, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasiterpadu Kecamatan (Paten)Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*, JAPB: Vol. 2, No. 2, November 2019

⁴³Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

f. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengembangan masyarakat (PM) Edi Suharto, teori program, teori kesejahteraan sosial Midgley yang menyatakan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Menurut Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.⁴⁴

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang memungkinkan individu dan keluarga hidup secara layak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penelitian Eko Sugiharto, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui delapan indikator, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, serta kemudahan memperoleh fasilitas transportasi. Delapan indikator

⁴⁴Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. 14, 23.

tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara komprehensif.⁴⁵

Kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan pada masyarakat menunjukkan ukuran asli pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan etensi terhadap budaya-budaya dan nilai kemanusiaan.⁴⁶

Kesejahteraan fisik mengacu pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan kesehatan dasar. Kesejahteraan Spiritualitas dipahami sebagai hubungan seseorang dengan transenden (Tuhan) yang diekspresikan melalui sikap, kebiasaan Kesejahteraan dan praktik. merupakan pengalaman saat seseorang menemukan tujuan dan makna

⁴⁵Sugiharto, Eko. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik." *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Vol. 4, No. 2, 2007.

⁴⁶Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development*, 1. Ed, The Pearson Series in Economics (Harlow Munchen: Pearson, 2015), hlm. 83

dari kehidupan. Kesejahteraan spiritual mengacu pada kegembiraan akan rasa menerima, emosi positif dan rasa interaksi positif dengan kekuatan "superior", dengan orang lain, diri sendiri dan dicapai melalui proses kognitif, emosional dan interaksi yang dinamis dan terkoordinasi. Kesejahteraan spiritual merupakan inti dari kesehatan manusia dan yang mendasari dimensi fisik, psikologis dan dimensi sosial serta kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan spiritual merupakan perspektif yang dirasakan dalam kualitas hubungan yang dimiliki seseorang pada empat wilayah, yaitu hubungan dengan Tuhan, orang lain, alam dan diri sendiri.⁴⁷

g. Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan perasaan aman Sentosa, Makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sejahtera dapat diartikan juga sebagai Falaah, yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat dapat terwujud jika seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara seimbang yang akan memberikan dampak yang disebut masalah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia."⁴⁸

⁴⁷Theresia Eriyani', dkk, *Hubungan Kesejahteraan Spiritual Dengan Death Anxiety Pada Pasien Paliatif: Literatur Review*, E-ISSN: 2746-3486 Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024.

⁴⁸Faturochman, *Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), hlm. 103.

Pengertian kesejahteraan diatas sejalan dengan pengertian Islam yakni selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertian ersebut diketahui bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri yang juga menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Qur'an Surah al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء/ ٢١ : ١٠٧)

Artinya: "Kami tidak mengidus engkau (Nabi Muhammad), Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam". (Q.S al-Anbiya: 107)⁴⁹

Menurut buku tafsir Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah megutus Nabi Muhammad SAW seabagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusny sebagai rahmat untuk kalian semua. Barangsiapa menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan akhirat.⁵⁰

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan. Pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan

⁴⁹Qur'an Kemenag," diakses 23 Juni 2024, <https://quran.kernenag.go.id/>

⁵⁰Abdullah. Labaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, alih bahasa Hartono dan Amin Rajab, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, hlm. 489.

dan kesejahteraan rill. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tidak adanya kejahatan anomi.⁵¹

Chapra mengungkapkan kesejahteraan adalah suatu keadaan yang diinginkan seluruh umat manusia. Didalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang diinginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Beliau juga mengungkapkan menurut syariat Islam sejatinya kesejahteraan tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalakn kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang.⁵²

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan ialah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan ialah terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Shariah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, kecuali telah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia dengan pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Dalam mencapai tujuan syara agar dapat terwujudnya kemaslahatan al-Ghazali memaparkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal,

⁵¹Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwān Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

⁵²Iendy Zelvian Ailhari, Yudistia Teguh Ali Fikri, dkk, *Kumpulan Penafsiran Al-Qur'an, Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung Widina Bhakti Persada Bandung. 2021), hlm. 100.

keturunan, dan harta.⁵³ Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Islam memandang kemelaratan sebagai sesuatu yang dapat merusak kualitas etika, nalar cerdas, keluarga, dan masyarakat. Islam juga mengatakan bahwa kemelaratan adalah bencana, oleh karena itu kita harus mencari jaminan dari Allah SWT atas pelanggaran yang ditanamkan pada kesempatan hidup mereka. Ada beberapa atribut urusan keuangan Islam dalam mengatasi masalah kemelaratan ini, antara lain: Berusaha dan bekerja, Larangan mengumpulkan harta, memberi, Hukum waris, hemat. Kemudian, pada saat itu, menurut Quraish Shihab, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam upaya mengatasi masalah menurut sudut pandang Islam:⁵⁴

1) Kewajiban setiap individu

Kewajiban setiap individu dalam islam yaitu setiap orang harus bekerja dan memenuhi nafkah agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan hidup keluarganya. Allah juga telah memberikan perintah kepada setiap individu untuk berkeliling di bumi Allah SWT juga makan dari rezeki mereka.

⁵³Saiful Amir dan Umi Din Nurzanah Sembiring, *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022). hlm. 189.

⁵⁴M. Quraish Shihab. 2002. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban individu untuk bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupannya atau keluarganya. Dan kemudian hal ini merupakan salah satu cara yang paling utama dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, ini merupakan sarana utama dalam mendapatkan kekayaan juga faktor yang paling menonjol dalam mensejahterakan kehidupan.

2) Kewajiban Kelompok /Masyarakat

Dalam mengatasi masalah kemiskinan Islam telah memberikan perintah untuk setiap anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarga. Maksudnya Islam sudah menerangkan bahwa modal yang paling dasar bagi terciptanya jaminan sosial. Islam pun tidak akan membiarkan nasib setiap fakir miskin itu terlantarkan sebagaimana Allah telah terangkan pada kepada mereka ada suatu hak yang terdapat pada orang-orang yang kaya dan merupakan suatu bagian yang tetap yaitu berupa Zakat.

Dapat dikatakan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan atau cara yang dapat menjamin dan memuaskan kehidupan, baik itu kerabat langsung kita, anak-anak atau individu Muslim yang membutuhkan bantuan.

3) Kewajiban Pemerintah Jika dilihat dari sudut pandang Agama.

Islam pemerintah memiliki suatu kewajiban dalam mengatasi masalah kemiskinan ini yang terjadi pada daerah yang

dia atur, dan ini juga telah diterangkan pada Qs. Al-Hasyr pada ayat 7 yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولُهُ ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر/٥٩: ٧)

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.⁵⁵

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sedangkan pengertian (harta fai") dalam istilah para ulama fikih, adalah harta orang-orang kafir yang diambil secara hak tanpa adanya peperangan, seperti halnya dengan harta-harta tersebut yang mereka tinggalkan karena takut kepada orang-orang Islam.

Dinamakan harta Fai" karena harta tersebut kembali dari orang orang kafir yang tidak berhak memilikinya, kepada orang-orang Islam yang lebih berhak memilikinya. Dan hukum harta fai" yang bersifat umum adalah sebagaimana disebutkan dalam FirmanNya, "apa saja harta rampasan (fai") yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota," secara umum baik yang ada di masa Rasulullah maupun setelahnya bagi pemimpin yang berkuasa dari kalangan umatnya sepeninggalnya, "maka

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2011) hlm.450

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.”⁵⁶ Ayat ini serupa dengan ayat lain yang terdapat dalam Surat al-Anfal. Yaitu Firman Allah, “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil,” (QS. Al-Anfal: 41).

Harta rampasan fai” ini dibagi untuk lima bagian: untuk Allah dan Rasulullah yang dialokasikan untuk keperluan kaum Muslimin secara umum, satu bagian lainnya untuk kerabat mereka yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib di mana saja mereka berada, bagian pihak lelaki sama seperti bagian pihak perempuan. Adanya Bani Muthalib masuk dalam salah satu dari lima bagian ini bersama Bani Hasyim tanpa memasukkan Bani Abdi Manaf lainnya adalah karena mereka, Bani Muthalib bersama-sama dengan Bani Hasyim termasuk satu golongan ketika kaum Quraisy sepakat untuk memblokade dan memusuhi mereka, dan mereka bersatu padu menolong Rasulullah, tidak seperti Bani Manaf lainnya.

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang menjadi pintu untuk mensejahterakan daerah atau wilayah yang ia atur/pimpin, termasuk itu dalam menegakkan perekonomian dan menghapuskan kesenjangan

⁵⁶Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 8, Tafsir QS. Al-Hasyr: 6–7, Dar al-Fikr, Beirut.

pendapatan. Islam memberikan komitmen kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakatnya yang utama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan yang membantu keluarga miskin yang memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Jika dilihat dari pengertian bahasa kata miskin berasal dari bahasa Arab yang menyatakan bahwa keadaannya sangat buruk. Hal ini telah diperjelas dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد/ ٩٠ : ١٦)

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.⁵⁷

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau kepada orang yang benar-benar hidup miskin sehingga tidur hanya beralaskan tanah.⁵⁸ Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan penafsiran dari ayat ini adalah memberi makan pada hari ketika mengalami kelaparan

⁵⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2011) hlm.594

⁵⁸Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 1994. 477.

lebih utama kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang tidak memiliki apa-apa.⁵⁹

Berdasarkan beberapa penafsiran di atas, QS. Al-Balad ayat 14-16 bukan hanya berisi tentang perintah memberi makan anak yatim dan orang miskin di kala kelaparan, lebih dari itu ayat tersebut mengandung nilai kepedulian. Kepedulian terhadap sesama terutama kepada kalangan yang tidak mampu seperti fakir, miskin, dan anak-anak yatim.⁶⁰

Ayat tersebut juga secara tersirat mengindikasikan tolak ukur orang miskin dan anak yatim yang harusnya mendapat pelayanan dan prioritas terkait bantuan yang didapatkan. Untuk itu, tampaknya perlu dilakukan reinterpretasi pada ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kompetibel sehingga diperoleh pemahaman yang lebih relevan dengan konteks kekinian. Salah satunya yakni dengan menggunakan pendekatan ma'na cum maghza. Pendekatan ini hadir sebagai penyempurna terhadap metode kontekstual yang mana di dalamnya menggali dan merekonstruksi makna serta pesan utama historis pada ayat al-Qur'an.⁶¹

⁵⁹ Al-Qurthubi. Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an. Beirut: Al-Resalah, 2006, 423.

⁶⁰ Saprida, S., dkk. Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Hukum Islam. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), (2022), 126. <https://doi.org/10.36908/esha.v7i2.329>

⁶¹ Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, hlm. 8.

h. Peran Pemerintah

Berbagai kebijakan dan program pemerintah dilakukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di dunia, salah satu yang utama yakni perlindungan sosial. Secara umum, perlindungan sosial berkaitan dengan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pengentasan kemiskinan serta mempromosikan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari bahaya, gangguan, dan kehilangan pendapatan.⁶² Terdapat tiga program perlindungan sosial yang umum dilakukan yaitu (1) bantuan tanpa syarat, seperti bantuan tunai, barang, dan bahan makanan; (2) bantuan bersyarat, terdapat kondisi yang harus dipenuhi, biasanya untuk meningkatkan sumber daya manusia; (3) program pekerjaan umum, bantuan dalam hal mempermudah masyarakat dalam hal pekerjaan.⁶³

Pada Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada

⁶²Barrientos, A. (2019). The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 62, 28. <https://www.adb.org/publications/social-assistance-poverty-inequality-asia-pacific%0Amozextension://>

⁶³Lowder, S. K., Bertini, R., & Croppenstedt, A. (2017). Poverty, social protection and agriculture: Levels and trends in data. *Global Food Security*, 15 (2016, March), 94-107. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.06.001>

Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin kedua menyebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.⁶⁴

Berbagai alokasi anggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk program-program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya berfokus pada bantuan masyarakat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satunya yang langsung berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai program keluarga harapan (PKH) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin dan rentan dan atau individu yang terdaftar dalam data terintegrasi dan diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditunjuk sebagai keluarga penerima PKH. Program perlindungan sosial ini dikenal dengan sebutan *Conditional Cash Transfers* (CCT) di dunia. Program ini

⁶⁴Ridela Nuraulia , dkk *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, Volume 2 Nomor 2 (2023) 294-304 E-ISSN 2962-1585, DOI: 10.56672/assyirkah.v2i2.42.hlm. 296

merupakan bentuk perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.⁶⁵

Adapun solusi dari pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah menyalurkan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu dengan cara pemerintah memberikan bantuan melalui dana zakat seperti zakat produktif, zakat mal dan zakat fitrah, serta bantuan sosial dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Jika dilihat dari sisi zakat ada beberapa golongan Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan. Hal ini telah diperjelas dalam Firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/٦٠) ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

⁶⁵Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2580>

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶⁶

Dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapa pun. Maka Allah membagi-bagikannya diantara mereka yang telah disebutkan di dalam ayat ini. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Program keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan yang sama dengan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat. Penyaluran dana zakat dan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat tepat kepada sasaran yang telah ditentukan, agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Pendapatan masyarakat juga dapat menjadi suatu faktor kesejahteraan yang dirasakan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi seperti fakir dan miskin agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2011) hlm.289.

⁶⁷ M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

i. Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Kata efektifitas memiliki banyak implikasi, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga arti kecukupan, definisi pokok adalah adanya dampak, akibat dan kesan. Definisi selanjutnya padat dan memadai. Terlebih lagi definisi ketiga dapat membawa hasil atau hasil. Kata kuat berasal dari kata result yang memiliki arti penting atau dampak dan kata memaksa yang mengandung arti dampak atau akibat dari suatu komponen. Jadi efektivitas adalah dampak atau pencapaian setelah tercapainya sesuatu.⁶⁸

Kata efektif berasal dari bahasa inggis yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, kamus ilmiah popiler mendefenisikan efektifitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi dan bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.⁶⁹

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai pengukuran ke efektifan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang

⁶⁸Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), hlm. 742

⁶⁹Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2015), hlm.214.

dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) baik untuk kebutuhan, kesehatan dan pendidikan. PKH tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, termasuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan.

2) Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Program merupakan suatu rencana yang mencakup prinsip-prinsip dasar serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam berbagai bidang, seperti ketatanegaraan dan perekonomian.⁷⁰

Keluarga merupakan unit sosial fundamental yang memainkan peran krusial dalam membentuk kesejahteraan individu, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera dari perspektif psikologis dan sosial. Keluarga berfungsi sebagai yang bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota keluarga dari berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. konsep keluarga sejahtera menjadi salah satu landasan penting untuk mewujudkan kebahagiaan dan kualitas hidup yang baik

⁷⁰ W. J. S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia," Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 911.

bagi setiap anggota keluarga. Kesejahteraan, yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam rumah tangga.⁷¹

Harapan dan optimisme dapat dimaknasi sebagai sebuah mood atau sikap yang berhubungan dengan ekspektasi terhadap keadaan sosial ataupun material yang terjadi di masa mendatang. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya,⁷²

Konsep dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai serta akses yang lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan

⁷¹Azam Syafrudin, Mewujudkan Keluarga Sejahtera dari perspektif Psikologis dan Sosial, Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan Volume 3 No. 2 November 2023 FIP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, hlm. 99

⁷²Grant, Heidi & Higgins, E. T. 2003. Optimism, Promotion Pride and Prevention Pride as Predictor of Quality of Life. Journal of Experimental Social Psychology, 29

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), apabila mereka yang memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.⁷³

Landasan Hukum PKH⁷⁴

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Peraturan Presiden Nomor

⁷³Nuramalia Putri, Mhd. Rafi, *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Mengatasi Masalah Kemiskina Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung*, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Vol.02, No.02 Desember 2023, pp. 181~190

⁷⁴Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

e) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

f) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

g) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

- h) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- i) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
- j) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);⁷⁵

Landasan Keputusan dalam Pelaksanaan

- a) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan, yang ditetapkan pada 21 September 2007.
- b) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02A/HUK/2008 mengenai Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2008.
- c) Keputusan Gubernur terkait Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD.
- d) Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
- e) Surat Kesepakatan dari Bupati sebagai bentuk komitmen untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN and KEMENTERIAN KEUANGAN, "KAJIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN" (DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN, 2015), hlm. 4-6.

Secara umum, tujuan yang tercantum dalam buku pedoman PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Secara khusus, tujuan PKH meliputi:

- a) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.
- b) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, serta anak usia 5-7 tahun yang belum bersekolah.
- c) Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat.
- d) Meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak KPM untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.⁷⁷

Sejak tahun 2012, untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), data awal penerima diambil dari basis data terpadu yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh

⁷⁷Kementerian Sosial RI, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.”

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hingga tahun 2014, program ini ditargetkan mencakup 3,2 juta keluarga.⁷⁸ Sebelumnya, sasaran PKH berfokus pada rumah tangga, namun sejak saat itu berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan prinsip bahwa keluarga terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak memiliki tanggung jawab utama dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, keluarga dipandang sebagai unit yang paling relevan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Beberapa keluarga bisa tinggal dalam satu rumah tangga yang mencerminkan kesatuan dalam pengeluaran konsumsi (dalam hal ini dioperasikan melalui satu dapur). Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH diperoleh dari basis

⁷⁸ Basis Data Terpadu adalah sebuah system yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat peneriman bantuan sosial, baik rumah tangga keluarga maupun individu penerima berdasarkan kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. Dikutip dari TNP2K, Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012), hlm. 13

data terpadu dan harus memenuhi setidaknya satu kriteria kepesertaan program.⁷⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang berhak menjadi peserta PKH diperoleh dari basis data terpadu dan harus memenuhi minimal satu dari kriteria kepesertaan berikut:

- a) Memiliki ibu hamil, ibu nifas, atau anak balita.
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum memasuki pendidikan dasar (anak pra-sekolah).
- c) Memiliki anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan di SD/MI/Paket A/SDLB.
- d) Memiliki anak usia 12-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan di SLTP/MTs/Paket B/SMLB.
- e) Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.

Setiap keluarga dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai jika memenuhi kriteria kepesertaan program dan melaksanakan kewajibannya.⁸⁰ Peserta PKH diharuskan memenuhi persyaratan serta berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan yang

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ TNP2K, "Kumpulan Tanya-Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan" (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012), hlm. 27.

berkaitan dengan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, khususnya ibu dan anak.

3) Dampak diterapkan PKH

Secara sederhana, dampak dapat dipahami sebagai pengaruh dan akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen umumnya memiliki konsekuensi positif dan negatif, dan dapat juga menjadi proses evaluasi pelaksanaan pengendalian intern. Seorang pemimpin yang handal harus mampu memprediksi bagaimana keputusan akan terpengaruh. Dampak itu sendiri adalah sesuatu yang orang tidak bisa hindari dan bahkan tertanam dalam kodratnya. Karena cara orang berinteraksi dengan masyarakat, kehidupan masyarakat akan selalu mengalami peralihan yang dramatis. Dampak dapat dianggap sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau melibatkan sistem sosial. Oleh karena itu, kami bertanya-tanya apa yang terjadi setelah beberapa waktu, kami melihat perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah. Dampak adalah semua peralihan dalam institusi sosial yang mempengaruhi proses sosial, termasuk nilai moral, sikap dan perilaku antara kelompok yang berbeda. Efeknya sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dampak yang

baik, hasil yang baik atau efek menguntungkan yang datang dari berbagai hal atau peristiwa.⁸¹

Menurut teori dampak yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan James Anderson, program Keluarga Harapan di wilayah Mayangan, Kota Probolinggo memiliki dampak positif dan negatif bagi keluarga penerima manfaat. Dampak positif dari keluarga penerima PKH adalah :

- (1) Mengurangi beban pengeluaran dan pendapatan tingkat kesejahteraan keluarga
- (2) Meningkatkan pendidikan yang lebih baik
- (3) Meningkatkan pendidikan yang lebih baik Meningkatkan kesehatan yang lebih baik
- (4) Mengubah perilaku dan kemandirian KPM

Dampak negatif dari bantuan sosial adalah ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk membantu keluarga yang bekerja mendapatkan lebih banyak. Menantikan serah terima hibah PKH apapun dengan harapan semoga hibah PKH ini dapat terus berkembang. Banyak keluarga

⁸¹Nurhidaya Holida, dkk, *Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo* , TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.2 Mei 2023 e-ISSN: 2985-9204; p-ISSN: 2985-9743, Hal 136-158 DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.171>

penerima yang menunggu bantuan PKH ini, yang diberikan setiap 3 bulan sekali.⁸²

4) Ketentuan Peserta Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2012, fokus bantuan PKH dialihkan kepada KSM (keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak). Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Adapun kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH di satuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah. Keluarga merupakan unit yang sangat relevan dalam usaha memutus rantai kemiskinan antar generasi.⁸³

Peserta PKH adalah KPM/KSM yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPS dan salah satu atau beberapa kriteria program berikut:

- a) Ibu hamil, ibu nifas, atau anak balita.
- b) Anak usia 5-7 tahun yang belum memasuki pendidikan dasar (anak prasekolah).
- c) Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).

⁸²*Ibid.*

⁸³TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*, hlm. 2.

- d) Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
- e) Anak SMA/MA/SMK atau yang setara.
- f) Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH antara lain: ⁸⁴

a) Kewajiban di Bidang Kesehatan

(1) Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan yang ditetapkan untuk peserta PKH.

(2) Peserta PKH yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah mereka yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita, atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

b) Kewajiban Bidang Pendidikan

Menurut Wasitohadi, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan mempengaruhi perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, kehendak, serta aspek sosial dan moral. Pendidikan adalah kekuatan dinamis yang mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu, baik

⁸⁴*Ibid.*

dalam interaksi dengan sesama, dengan dunia, maupun dalam hubungannya dengan Tuhan.⁸⁵

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mematangkan manusia melalui pengajaran dan pembelajaran. Proses ini dilakukan secara sadar dan terencana, dengan cara-cara yang mendidik. Pendidikan biasanya terjadi dengan bimbingan dari orang lain, namun juga memungkinkan untuk dilakukan secara mandiri (otodidak).

Secara umum, terbukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat pendapatannya. Hal ini terjadi karena orang yang memiliki pendidikan cenderung lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas ini berasal dari keterampilan teknis yang diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup.⁸⁶

Peserta PKH yang memiliki anak berusia 7-15 tahun diwajibkan untuk mendaftarkan atau memastikan anak-anak tersebut terdaftar di lembaga pendidikan dasar

⁸⁵Wasitohadi and Sri Rahayu Theresia, *DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA* (Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 61.

⁸⁶Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, and Natsir Muhammad, *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendidikan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 98-90.

(SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B, termasuk SMP/MTs terbuka dan SMA/SMK/MA) serta mengikuti kehadiran di kelas dengan minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Jika ada anak berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka mereka akan dikenakan verifikasi di bidang pendidikan.

Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sementara yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non-reguler seperti SDLB atau SMLB. Peserta PKH yang memiliki anak berusia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar wajib mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI, SMP/MTs, Paket A, atau Paket B). Anak peserta PKH yang bekerja, menjadi pekerja anak, atau telah lama meninggalkan sekolah, harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini berupa layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial untuk pekerja anak.⁸⁷ Bantuan tunai PKH untuk komponen pendidikan akan terus diberikan kepada peserta PKH selama anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu dengan menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran setidaknya 85% dari hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.⁸⁸

Edi Suharto menyatakan bahwa "Pendidikan adalah elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan pengetahuan, informasi, dan teknologi sebagai syarat untuk membentuk masyarakat modern."⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menemukan beberapa ide penelitian masa lalu yang telah dieksplorasi dengan sesuatu yang sangat mirip dan diidentifikasi dengan penelitian ini seperti yang digambarkan di bawah ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bambang Suprpto, dan Ahmad Sujoni	Sistem Pendukung Keputusan Calon	Penentuan Kriteria Meliputi 9 Kriteria yang masing-masing kriteria memiliki 3 subkriteria

⁸⁷Kementerian Sosial RI, "Pedoman Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan," hlm. 18-22.

⁸⁸Direktorat Jaminan Sosial, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemeberi Pendidikan*, (Jakarta, 2011), hlm. 18.

⁸⁹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Ed. Revisi, Cet. 5 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 19.

	(Jurnal Informatika dan Komputer, Vol. 7, No. 2, 2019) ⁹⁰	Penerima Bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	yaitu: Telfon Seluler, Kepemilikan Pekerjaan, Penghasilan, Status Tempat Tinggal, Jenis Lantai, Kondisi Rumah, Fasilitas Jamban, Pendidikan, Wawancara Tetangga. Dari hasil penelitian ini diharapkan akandapat membantu dan memudahkan pendamping PKH dalam proses seleksi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
2	Gita Dwi Fauza (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020) ⁹¹	Penerapan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) Di Penentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Binjai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menguji 100 data keluarga calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maka 95 data keluarga layak menerima bantuan PKH dan 5 data keluarga yang tidak layak menerima bantuan PKH.
3	Fatimah Sri Rahmadhani Siregar, (2024) ⁹²	Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP	Berdasarkan hasil yang diolah dengan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) yang diolah menggunakan Software SuperDecisions terdapat Nilai prioritas pada kriteria Disabilitas Berat dan Lanjut Usia 60 Tahun ke atas memiliki prioritas tertinggi yaitu 0,29767. Pada kriteria Ibu Hamil dan anak Usia Dini

⁹⁰Bambang Suprpto, dan Ahmad Sujoni, *Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)* (Jurnal Informatika dan Komputer, Vol. 7, No. 2P-ISSN: 2337-8344, E-ISSN:2623-1247, 2019).

⁹¹Gita Dwi Fauza, *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Penentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Binjai*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2020)

⁹²Fatimah Sri Rahmadhani Siregar, *Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP* (Analytical Hierarchy Process), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary Padangsidempuan, 2024).

		(Analytical Hierarchy Process),	0-6 Tahun (Balita) memiliki prioritas kedua dengan nilai 0,12742. Pada Kriteria SD, SMP, SMA menduduki prioritas ketiga dengan nilai 0,04994. Dari itu dapat dilihat bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yaitu melalui Alternatives Kesehatan yang dimana Kesehatan, dengan Indeks Hasil Sintesa tertinggi (1,000000). Kesehatan juga merupakan hal utama yang menjadi tujuan dari Program Keluarga Harapan serta menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan meningkatkan Kesehatan maka Program Keluarga Harapan ini terlaksana secara Efektif.
4	Jadiaman Parhusip (Jurnal Teknik Informatika, Vol. 13, No. 2, Palangkaraya, Agustus 2019) ⁹³	Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya	Penelitian ini menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan metode <i>Analytical Hierarki Proses</i> (AHP). Sistem ini dievaluasi oleh dua metode yang berbeda yaitu black box testing dan turing testing. Itu aplikasi membantu untuk memutuskan alternatif penerima BPNT, mengelola data calon penerima BPNT dan mengelola data penerima BPNT yang dipilih dari rekomendasi hasil.
5	Sri Wahyuni Sigalingging, Burhanuddin Damanik, Dini	Penerapan Metode AHP Sebagai Sistem Pendukung	Merancang sistem penerima bantuan Program keluarga Harapan bagi masyarakat Kelurahan Helvetia Tengah

⁹³Jadiaman Parhusip, *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya* (Jurnal Teknik Informatika, Vol. 13, No. 2, Palangkaraya, Agustus 2019)

	M Hutagalung, Immanuel H G Manurung, (Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial, Vol. 02, No. 01, 01 Mei 2020) ⁹⁴	Keputusan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Helvetia Tengah Medan	yang kurang mampu secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk menentukan masyarakat yang kurang mampu dalam penerimaan bantuan PKH
6	Nur Aminuddin, Ida Ayu Puspita Sari (STMIK Pringsewu Lampung) ⁹⁵	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran dengan Menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Dengan menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dapat dibangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan membandingkan inputan kategori penilaian dan bobot rasio yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil output berupa keputusan layak atau tidaknya calon penerima dalam menerima PKH, diperoleh dari hasil perbandingan nilai lambda bobot kategori penilaian dengan nilai bobot rasio yang sudah ditentukan.
7	Eko Darmanto, Noor Latifah, dan Nanik Susanti, 2014. Jurnal Simetris. Vol. 5, No. 1. ⁹⁶	Penerapan Metode Ahp (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu	Hasil penelitian menunjukkan sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan kualitas gula tumbu perhitungan dengan metode AHP lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan data sudah mendekati sempurna
8.	Fretty Luciana	Pemberdayaan	Berdasarkan hasil penelitian

⁹⁴Sri Wahyuni Sigalingging, dkk, *Penerapan Metode AHP Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Helvetia Tengah Medan* (Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial, Vol. 02, No. 01, 01 Mei 2020).

⁹⁵Nur Aminuddin, Ida Ayu Puspita Sari, *Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran dengan Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*, (STMIK Pringsewu Lampung).

⁹⁶Eko Darmanto, dkk, 2014. *Penerapan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu*. Jurnal Simetris. Vol. 5, No. 1.

	Malau Gurning , Halking, Universitas Negeri Medan, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5, Nomor. 4 Desember 2025 e-ISSN: 2962- 4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 774-796. ⁹⁷	Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir	yang telah dilakukan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep pemberdayaan telah mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya disertai dengan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penerima manfaat masih memaknai pemberdayaan secara sempit sebagai bentuk bantuan semata, bukan sebagai proses menuju kemandirian. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program juga masih bersifat pasif, di mana mereka lebih berfungsi sebagai objek penerima bantuan daripada subjek yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan.
9	Aliska Putri Maulida, Universitas Islam Negeri Syarif Hhidayatullah Jakarta (2023). ⁹⁸	Analisis Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) DI kelurahan Bakhti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	Hasil analisis modal sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan rata-rata keseluruhan dimensi modal sosial yaitu norma, kepercayaan (<i>trust</i>) dan jaringan (<i>networking</i>) sebesar 3,34 dan dapat dikategorikan tinggi. Hal ini membuktikan

⁹⁷ Fretty Luciana Malau Gurning , Halking, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir* , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5, Nomor. 4 Desember 2025 e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 774-796

⁹⁸ Aliska Putri Maulida, 2023. *Analisis Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) DI kelurahan Bakhti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hhidayatullah Jakarta .

			bahwa penerapan modal sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH diterapkan dengan sangat baik. Hasil analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan rata-rata keseluruhan dimensi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebesar 3,49 dan dapat dikategorikan tinggi. Dapat diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kelurahan Baktijaya berjalan dengan sangat baik.
10	Siswati Saragi , Maria Ulfa Batoebara dan Nur Ambia Arma, 2021. ⁹⁹	Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”	Penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.
11	Novlin Moninda, 2021. ¹⁰⁰	Modal Sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube)	hasil penemuan lapangan dapat kita ketahui bahwa peran modal sosial dalam kelompok

⁹⁹Siswati Saragi , Maria Ulfa Batoebara dan Nur Ambia Arma, 2021, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”

¹⁰⁰Novlin Moninda, 2021, “Modal Sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

		Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	KUBE yaitu unsur modal sosial norma dan jaringan berada pada kategori sedang dan kepercayaan berada pada kategori rendah. Sedangkan hambatan pada unsur-unsur modal sosial pada kelompok usaha bersama (KUBE) yaitu kepercayaan.
12	Widia Lestari, dkk, 2019. ¹⁰¹	Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran PKH dalam pemberdayaan KPM berupa pemberdayaan melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau <i>Family Development Session</i> (FDS), pemberdayaan melalui Koperasi PKH dan pemberdayaan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH, 2) Peran Modal Sosial Dalam Menciptakan Kemandirian KPM PKH dengan menyelaraskan antara dimensi nilai kultur, dimensi trust, <i>reciprocity</i> , partisipasi, dimensi sistem komunikasi, dan jaringan usaha yang dimiliki oleh KPM PKH. Hal tersebut disebabkan oleh adanya relevansi antara social <i>bounding</i> , <i>social bridging</i> , dan <i>social linking</i> yang dijalankan oleh KPM
13	Firda Dwi Anjani, Aribowo dan Ade	Modal Sosial Masyarakat Dalam	Hasil penelitian menunjukkan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

¹⁰¹Widia Lestari, dkk, 2019, "Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)"

	Subarkah, 2020 ¹⁰²	<i>Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah Di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal</i>	digambarkan lemah, baik pada <i>bonding social capital</i> khususnya belum ada pertukaran pengetahuan dan informasi antara masyarakatnya maupun pada <i>bridging social capital</i> khususnya jejaring antara masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang masih berjalan <i>sporadis</i> . Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan program “Optimalisasi Bridging Social Capital melalui Program PEPEK (Penguatan, Pertukaran Pengetahuan, dan Keberlanjutan) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”.
14	Emanuel Bate Satria Dollu, 2020. ¹⁰³	<i>MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur</i>	Hasil dari penelitian kali ini ialah tradisi <i>kumpo kampo</i> merupakan sebuah modal sosial bagi masyarakat Larantuka dimana di dalamnya terbentuk persatuan yang berasal dari sebuah hubungan saling menguatkan, serta saling menguntungkan di antara sesama dalam keluarga. Hubungan ini membawa setiap entitas masyarakat Larantuka pada umumnya, dan keluarga khususnya, pada sebuah kohesivitas, dimana menumbuhkan persatuan di dalam kelompok itu menjadi

¹⁰²Firda Dwi Anjani, Aribowo dan Ade Subarkah, 2020, “*Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah Di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal*”

¹⁰³Emanuel Bate Satria Dollu, 2020, “*MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur*”

			hal yang sangat penting untuk terus dijaga dan ditumbuhkembangkan. <i>Kumpo kampo</i> sebagai modal sosial telah membantu masyarakat meningkatkan hubungan kekerabatan, hubungan kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama masyarakat Larantuka.
15	Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, 2017. ¹⁰⁴	<i>Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki empat peran keterampilan yaitu peran fasilitatif, pendidik, representatif/perwakilan masyarakat, dan teknis. Faktor internal yang menjadi kendala adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, dan beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu lama. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan lokasi tempat pendampingan yang berada di gang sempit. Faktor pendukung adalah antusiasme penerima bantuan serta sarana yang memadai.

Posisi penelitian dijelaskan dalam perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

¹⁰⁴Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, 2017, “*Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*”

1. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Bambang Suprpto, dan Ahmad Sujoni yaitu tujuan dari penelitian ini untuk membantu dalam proses seleksi penerima bantuan program Keluarga Harapan dengan menggunakan metode *Analitical Hierarchy Process*
2. Pada penelitian Gita Dwi Fauza menemukan persamaan terdapat pada metode yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu dengan menggunakan metode *Analitical Hierarchy Process*
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Sri Rahmadhani Siregar terdapat persamaan yaitu tujuan dari penelitian yaitu menganalisis efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat
4. Pada penelitian Jadianan Parhusip terdapat persamaan dan perbedaan penelitian adalah menggunakan metode AHP akan tetapi dievaluasi oleh dua metode yang berbeda yaitu black box testing dan turing testing. Itu aplikasi membantu untuk memutuskan alternatif penerima BPNT, mengelola data calon penerima BPNT dan mengelola data penerima BPNT yang dipilih dari rekomendasi hasil.
5. Pada penelitian Sri Wahyuni Sigalingging, Burhanuddin Damanik, Dini M Hutagalung, Immanuel H G Manurung yaitu persamaan penelitian menggunakan metode *Analitical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan masyarakat yang kurang mampu dalam penerimaan bantuan PKH

6. Pada penelitian Nur Aminuddin, Ida Ayu Puspita Sari persamaan dan perbedaan penelitian. Menggunakan metode AHP tetapi hasil output berupa keputusan layak atau tidaknya calon penerima dalam menerima PKH, diperoleh dari hasil perbandingan nilai lambda bobot kategori penilaian dengan nilai bobot rasio yang sudah ditentukan.
7. Pada penelitian Eko Darmanto, Noor Latifah, dan Nanik Susanti, 2014 persamaan dan perbedaan penelitian menggunakan metode AHP tetapi untuk menentukan kualitas gula tumbu perhitungan dengan metode AHP lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan data sudah mendekati sempurna
8. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fretty Luciana Malau Gurning , Halking terdapat persamaan yaitu meneliti tentang PKH tetapi perbedaan penelitian yaitu mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep pemberdayaan telah mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya disertai dengan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penerima manfaat masih memaknai pemberdayaan secara sempit sebagai bentuk bantuan semata, bukan sebagai proses menuju kemandirian
9. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aliska Putri Maulida yaitu menerapkan modal sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH sementara dalam penelitian ini tentang meneliti efektifitas PKH terhadap kesejahteraan dengan menggunakan metode AHP

10. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siswati Saragi , Maria Ulfa Batoebara dan Nur Ambia Arma Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini terletak pada tema yang diangkat yaitu tentang Analisis Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaannya terletak pada jenis analisis yang digunakan jika dalam penelitian tersebut tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) , penulis melakukan penelitian tentang Analisis Modal Sosial terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)
11. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novlin Moninda Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini sama sama menganalisis tentang pada suatu program PKH, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis program yang dianalisis jika penelitian tersebut menganalisis tentang Modal Sosial KUBE pada Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode AHP.
12. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widia Lestari Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini ialah tema yang diteliti merupakan pada Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian tersebut mengkaji Modal Sosial pada dan juga tentang Pemberdayaan Rumah Tangga yang dapat menciptakan kemandirian melalui Modal Sosial yang dapat menyelaraskannya dengan kepercayaan, nilai, *reciprocity*, partisipasi, dimensi sistem komunikasi, dan jaringan usaha yang dimiliki oleh KPM PKH sementara pada penelitian ini

menganalisis tentang efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode AHP

13. Pada penelitian yang dilakukan oleh Firda Dwi Anjani, Aribowo dan Ade Subarkah Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini ialah teorinya yang menggunakan teori modal sosial sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian tersebut melihat Modal Sosial untuk pengelolaan Pariwisata Pantai. Sementara pada penelitian ini menganalisis tentang efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode AHP
14. Pada penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Bate Satria Dollu persamaannya Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan perbedaan penelitian yaitu bagaimana sebuah Modal Sosial lewat tradisi *kumpo kampo* membantu masyarakat meningkatkan hubungan kekerabatan, kebersamaan dan kekeluargaan di antara sesama masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Strategi dalam Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat, dalam penelitian kali ini ialah Menganalisis Modal Sosial yang terjadi di masyarakat khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) sementara dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode AHP
15. Pada penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini terletak pada

tema yang diangkat yaitu tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagai penerima manfaat PKH sementara dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Metode AHP

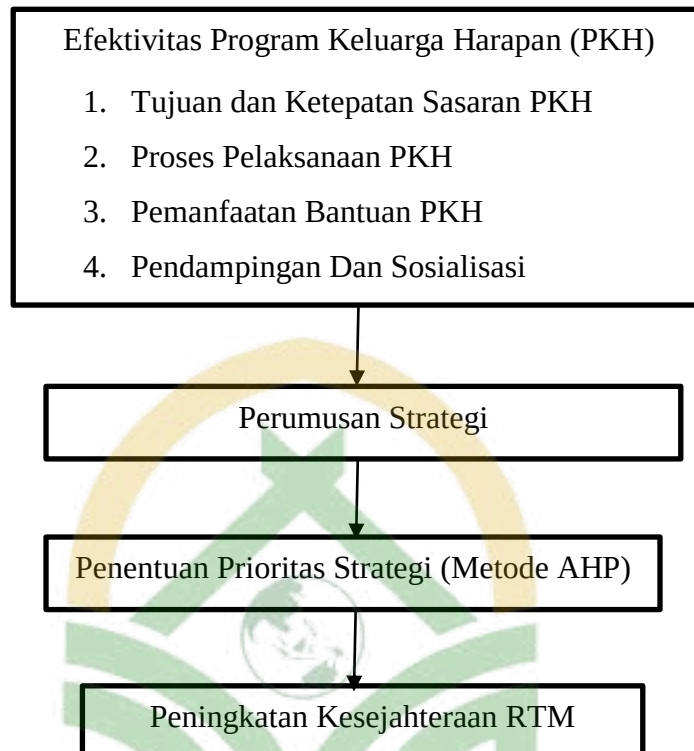
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah ide dari hipotesis yang diidentifikasi dengan variabel berbeda yang telah dibedakan dengan masalah eksplorasi. Sistem pemikiran juga sering disebut sebagai struktur teoretis tentang bagaimana hipotesis diidentifikasi dengan variabel lain yang dianggap sebagai masalah penting.¹⁰⁵

Struktur pemeriksaan ini dimulai dari apa arti kelangsungan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengatasi masalah kemelaratan. Dengan beberapa file, khususnya kesehatan, pendidikan, orang tua 70 tahun ke atas, dan orang-orang dengan ketidakmampuan yang parah. Dan bagaimana penyaluran, pendaya gunaanannya, serta hasil/ pencapaian. Kemudian dari semua indeks itu akan dipandang dengan perspektif Ekonomi Islam. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terikat. Gambar dibawah ini merupakan kerangka konsep tual penelitian sebagai penuntun sekaligus pencerminan alur pikir dalam penelitian.

¹⁰⁵Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hlm. 107.

Gambar II.1
Kerangka Fikir



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian ini adalah menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Yang diukur melalui penentuan prioritas strategi (metode AHP) dari tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin yang menjadi anggota PKH di Kelurahan Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota. Padangsidempuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah dari proses observasi yang peneliti lakukan peneliti menemukan masalah yang menurut peneliti layak untuk diteliti. Masalah tersebut berkenaan dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling khususnya masyarakat penerima bantuan dari PKH untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tahap perencanaan atau studi pendahuluan yaitu pencarian ide dan judul penelitian kemudian pengajuan judul ke kantor Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan. Setelah studi pendahuluan, dilanjutkan dengan tahap penyusunan proposal dan pengumpulan dan analisis data yang berlangsung mulai bulan April 2025 sampai dengan Februari 2026.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh penulis dari tempat penelitian yaitu Kelurahan Pijorkoling. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.¹⁰⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif analitis. Sifat analitis dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan penafsiran kritis dan mendalam untuk menemukan pola, hubungan makna, serta implikasi teoretis dari fenomena yang diteliti.¹⁰⁷

Tujuan utama penelitian kualitatif analitis adalah untuk menggali makna, memahami proses, serta menjelaskan realitas sosial secara komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini sangat relevan digunakan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik.¹⁰⁸ Pendekatan kualitatif analitis pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa individu (seseorang), kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data

¹⁰⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

¹⁰⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 254.

mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Lurah di Kelurahan Pijorkoling, Koordinator PKH, Pendamping PKH, Kabid PEMSOS dan PFM dan masyarakat penerima program Keluarga Harapan di Kelurahan Pijorkoling.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data:

1. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti baik berupa kata-kata dan tindakan melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer ini adalah data-data yang langsung ditemukan dari sumber utama.¹¹¹ Sumber data utama dalam menggali data tentang efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling. Sehingga dapat diperoleh informasi mengenai efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling.

¹⁰⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991) hlm. 12

¹¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 129

¹¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 62.

2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹² Sumber data sekunder untuk menggali data tentang efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹³ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif analitis umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.¹¹⁴ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹¹⁵ Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ini digunakan untuk memahami data secara mendalam dan memperoleh gambaran penelitian yang mudah dipahami. Dalam hal ini digunakan untuk merekam atau mengumpulkan data berbagai hal tentang

¹¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm.62.

¹¹³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 308

¹¹⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

¹¹⁵Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 16.

sekolah tempat penelitian berlangsung, yang menyangkut letak geografis, perkembangan akhlak anak, kualitas pendidikan akhlak anak, tanggung jawab orang tua pada kualitas akhlak anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi yang dilakukan penulis menggunakan observasi, yakni penulis datang ke Lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh data yang maksimal.¹¹⁶ Jenis dari wawancara ini adalah wawancara terstruktur dimana penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada responden. Wawancara ini dilakukan guna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diwawancarai atau yang menjadi informan yaitu:

- a) Kelurahan
- b) Pendamping penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- d) Kabid PEMSOS dan PFM
- e) Masyarakat

¹¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 317.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.¹¹⁷ Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data, keterangan, atau dokumen lain yang telah diarsipkan dalam tulisan tentang gambaran umum tentang penelitian, tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membutuhkan jawaban responden dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis melalui serangkaian pertanyaan tertulis. Kuesioner dalam penelitian ini yaitu *pairwise comparison* yang terdiri dari berbagai *node* dan *cluster* yang diperoleh dari hasil *indepth interview* dan telah diolah sebelumnya melalui software "*Super Decision*" sebagai komponen penelitian menggantikan variabel sehingga memiliki sedikit perbedaan dengan kuesioner yang dipakai dalam penelitian kualitatif pada umumnya..¹¹⁸

¹¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 329

¹¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2019, him. 27.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu, melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur, masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka. Metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* merupakan salah satu metode dalam proses pengambilan keputusan, yang dibangun berdasarkan tiga prinsip, yaitu prinsip penyusunan hirarki, prinsip penetapan prioritas, dan prinsip konsistensi.¹¹⁹

¹¹⁹Saaty, T. L., *Decision Making for Leader : The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1993, hlm. 50.

2. Kelebihan Metode AHP

Kelebihan dari model AHP dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah yang multiobjective dengan multikriteria. Kebanyakan model yang sudah ada memakai single objectives dengan multikriteria. Model Linear Programming misalnya, memakai suatu tujuan dengan banyak kendala (kriteria). Kelebihan model AHP ini lebih disebabkan oleh fleksibelitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarki. Sifat fleksibel tersebut membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki.

3. Kekurangan Metode AHP

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, model AHP juga mempunyai beberapa kelemahan. Ketergantungan model ini terhadap input berupa persepsi seorang ahli akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si ahli memberikan penilaian yang keliru. Kebanyakan orang bertanya apakah persepsi dari seorang ahli tersebut dapat mewakili kepentingan orang banyak atau tidak. Keraguan seperti ini tidak lain disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain. Karenanya, untuk model AHP ini dapat diterima oleh masyarakat, perlu diberikan kriteria dan Batasan tegas dari seorang ahli serta menakutkan.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid.*

4. Langkah-Langkah Penggunaan AHP

Pada dasarnya Langkah-langkah dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) antara lain:

- a) Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
- b) Menentukan prioritas elemen.
- c) Sitiesis
 - 1) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalitas matriks.
 - 2) Menjumlahkan nilai nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata rata.¹²¹

5. Model Perancangan AHP

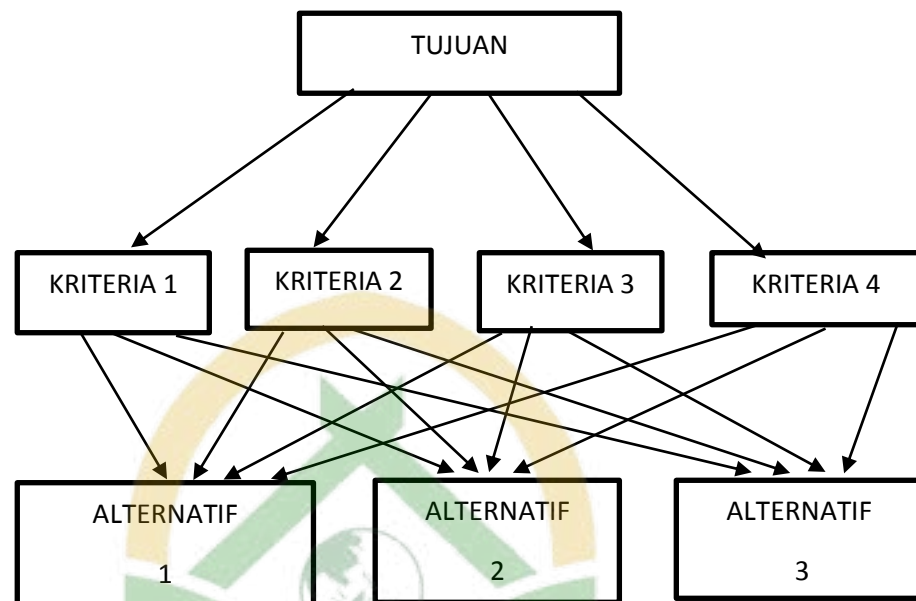
Dalam menyelesaikan permasalahan dalam AHP ada beberapa Prosedur yang harus dilakukan antara lain:

- a) Menyusun Hierarki

Penyusunan hirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran system secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif- alternatif tersebut. Setiap kriteria dapat memiliki subkriteria dibawahnya dan setiap kriteria dapat memiliki nilai intensites masing-masing.¹²²

¹²²Nur Aminudin, "Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidana Pesawaran Dengan

Gambar III.1
Kerangka *Hierarchy* Metode AHP



b) Penilaian Kriteria Alternatif

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan saat dapat diukur menggunakan table analisis seperti yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini yaitu:

Tabel III.3
Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen

	lainnya	dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Sampebua, 2025, Buku Sistem Pendukung Keputusan

c) Menentukan Prioritas

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan saat dapat diukur menggunakan tabel analisis.

d) Menghitung Konsistensi Logis

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, onjek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Pijorkoling Kota Padangsidempuan

Sekilas gambaran umum dari Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang memiliki luas wilayah ± 151 Ha dengan ketinggian tempat ± 262 m.dpl dan Titik Koordinat N = $01^{\circ} 19' 33.4''$, E = $99^{\circ} 18' 39.9''$ yang berbatas dengan :

Gambar IV.1
Peta Kelurahan Pijorkoling



Berdasarkan peta Kelurahan Pijorkoling di atas menunjukkan sebelah Utara Desa Huta Koje dan Huta Limbong, Huta Lombang Manunggang Jae, kemudian Sebelah Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sebelah Barat Desa Sigulang dan Sebelah Timur Desa Manunggang Julu.

Dengan batas dan luas wilayah tersebut Kelurahan Pijorkoling terbagi menjadi : Jumlah Lingkungan 4 lingkungan, Jumlah Dasa Wisma

4 Kelompok, Jumlah KK 1532 KK, Jumlah Penduduk 7320 Jiwa, Bayi/Balita (1-5 tahun) 451 Jiwa, Jumlah PUS 986, Jumlah WUS 1.143, Jumlah Lansia 381 Jiwa, Jumlah Peserta KB aktif 541 jiwa, Perkantoran Pemerintah 6 Unit, Sekolah 6 Unit, Mesjid 3 unit, Gereja 2 unit.

2. Potensi

Kelurahan Pijorkoling terdiri dari 4 (Empat) Lingkungan dan 2 (Dua) Lorong yaitu : 2 (Dua) Lingkungan di Pinggir jalan Protokol, dan dua Lingkungan lagi berada di Komplek Perumnas dan dua lorong berlokasi di Pegunungan Aek Gambir. Kelurahan Pijorkoling memiliki potensi strategis, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan infrastruktur baru wilayah ini menjadi salah satu fokus pengembangan kota. Sebagai bagian dari Padangsidempuan Tenggara, Kelurahan Pijorkoling diuntungkan oleh letak geografis di dataran tinggi yang sejuk, menjadikannya kawasan yang subur dan nyaman untuk hunian maupun pertanian.

Secara keseluruhan, Pijorkoling merupakan kawasan yang tengah bertransformasi dari lahan perkebunan produktif menjadi wilayah yang mengkombinasikan pertanian dengan pembangunan infrastruktur mode. Potensi utama Kelurahan Pijorkoling di Padangsidempuan Tenggara meliputi warisan budaya dan perkebunan. Salah satu ikonnya adalah Bagas Godang Pijorkoling rumah adat keturunan raja marga Harahap. Wilayah ini juga memiliki area perkebunan (seperti perkebunan PijorKoling) yang didukung oleh geografis kaki gunung yang subur.

Pijorkoling menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di kecamatan, dengan jumlah perusahaan perdagangan yang signifikan yaitu adanya pasar yang namanya pasar jongjong yang terletak di Kelurahan Pijorkoling.

3. Sejarah

Kelurahan Pijorkoling di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Sumatera Utara, awalnya merupakan wilayah kekuriaan yang dikenal sebagai Kuria Pijorkoling. Seiring dengan pemekaran Kota Padangsidempuan menjadi wilayah otonom, status wilayah ini berubah dari desa menjadi kelurahan dan dimasukkan ke dalam Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Berasal dari wilayah adat Kekuriaan Pijorkoling yang kemudian bertransisi mengikuti administrasi pemerintah kota. Saat Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan pada tahun 2005, Pijorkoling resmi menjadi bagian dari Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Terletak di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yang merupakan bagian dari Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Pijorkoling merupakan salah satu wilayah yang mendukung status Kota Padangsidempuan sebagai kota strategis dan pusat pertumbuhan di wilayah. Adapun Kelurahan Pijorkoling berdasarkan Kerajaan (Kuria)

- a. Luas wilayah Kelurahan Pijorkoling 151 Ha. Dengan pemukiman 36,5 ha, pertanian/perkebunan 90 ha, hutan 125 ha, perkantoran 1,5 ha, dan sekolah 12 Unit.

b. Orbitasi

- 1) Jarak ke ibukota kecamatan terdekat : 500 M
- 2) Lama Jarak tempuh ke ibukota kecamatan : 5 Menit
- 3) Jarak ke ibukota kabupaten/kota : 8,3 Km
- 4) Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten/kota : 20 Menit

c. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel VI.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala keluarga	1.532 KK/55%
Laki-laki	3.294 Jiwa
Perempuan	4.026 Jiwa
Jumlah	7.320 Jiwa

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel VI.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	1-16 Tahun	934	1.401	2.335
2	17-25 Tahun	504	616	1.120
3	26-39 Tahun	506	759	1.265
4	40-55 Tahun	657	803	1.460
5	56-93 Tahun	627	513	1.140
Jumlah		3.228	4.092	7.320

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

e. Mata Pencaharian :

Tabel VI.3
Mata Pencaharian Di Kelurahan Pijorkoling

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Wiraswasta	693	71	764
2	Petani/Pekebun	233	83	316
3	Tidak/Belum Bekerja	13	8	21
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	118	18	136
5	Pensiunan	21	6	27
6	Karyawan Honorer	26	2	28
7	Karyawan BUMN/BUMD	10	1	11
8	Pedagang	17	7	24
9	Buruh Harian Lepas	5	0	5
10	Dosen Swasta	2	0	2
11	Penjahit	1	0	1
12	Guru Swasta	4	2	6
13	Wartawan	3	0	3
14	Pelajar	4	3	7
15	Perawat swasta	1	0	1
16	TNI/POLRI	27	0	27
17	Bidan Swasta	0	1	1
18	Buruh Tani	8	0	8
19	Mengurus Rumah Tangga	0	52	52
20	Karyawan Swasta	35	0	35

21	Sopir	10	0	10
22	Tukang Batu	3	0	3
23	Tukang Kayu	2	0	2
24	Tukang Las	2	0	2
25	Transportasi	3	0	3
26	Ustadz	2	0	2
27	Arsitek	1	0	1
28	Konstruksi	1	0	1
29	Dokter Swasta	0	0	0
30	Tidak diketahui	15	18	33
Jumlah		1.260	272	1.532

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

f. Pendidikan

Tabel VI.4
Mata Pencapaian Di Kelurahan Pijorkoling

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Belum Sekolah	140	210	350
2	TK/PAUD	225	225	450
3	SD	480	720	1.200
4	SLTP	257	258	515
5	SLTA/MA	168	252	420
6	D-II	45	25	70
7	S-I	160	240	400
8	Tamat SD	231	99	330
9	Tamat SLTP	108	72	180
10	Tamat SLTA	372	558	930

11	Tamat D-I, D-II, D-III	135	135	270
12	Tamat S-I	288	432	720
13	Tamat S-II dan S-III	48	32	80
14	Tidak Pernah Sekolah	40	20	60
15	Tidak Tamat SD	201	134	335
16	Tidak Diketahui	707	303	1.010
Jumlah		3.605	3.715	7.320

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

f. Jumlah TK

Tabel VI.5
Mata Pencapaian Di Kelurahan Pijorkoling

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK ADIBAH	Jl.H.T Rizal Nurdin No.028 Lk I Kelurahan Pijorkoling
2	TK NEGERI PEMBINA	Jl.Meranti Raya III Kelurahan Pijorkoling
3	TK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL (ABA) III	Jl.Kari Dahlan Lk II Kelurahan Pijorkoling
4	TK AL-MUHAJIRIN	Jl.Meranti Raya II No.42 Kelurahan Pijorkoling

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

g. Jumlah PAUD

Tabel VI.6
Mata Pencapaian Di Kelurahan Pijorkoling

NO	NAMA	ALAMAT
1	PAUD AL-MUHAJIRIN	Meranti Raya II No.42 Kelurahan Pijorkoling

Sumber: Kelurahan Pijorkoling

B. Deskripsi Responden Penelitian

Peneliti menggunakan 5 Narasumber (Informan) sebagai sumber data dalam penelitian ini. Informan ini merupakan orang yang berhubungan dengan Program yang diteliti yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut table narasumber (informan) dalam penelitian:

Tabel IV.7
Deskripsi Responden Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Umur /Tahun	Pekerjaan	Keterangan
1	Zulkarnain Hidayat, S.sos	S1	54	Lurah	Informan Pendukung
2	Fahru Rozi, S.Pd.I	S1	37	Koordinator PKH	Informan Pendukung
3	Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I	S1	33	Pendamping PKH	Informan Kunci
4	Eva Julianti Hasibuan, S.Sos	S1	45	Kabid PEMSOS dan PFM	Informan Pendukung
5	Suriani	SLTA	48	Masyarakat	Informan Utama

Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Deskripsi responden penelitian berdasarkan pendidikan responden responden yang berhubungan dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pijorkoling menunjukkan responden dengan Pendidikan

SLTA terdapat 1 responden, responden dengan Pendidikan S1 terdapat 4 responden.

Deskripsi responden penelitian berdasarkan pekerjaan responden yaitu menunjukkan Lurah di Kelurahan Pijorkoling, Koordinator PKH yang mengatur dan mengawasi kegiatan PKH di Kelurahan Pijorkoling, Pendamping PKH Yang mendampingi masyarakat penerima PKH DI Kelurahan Pijorkoling, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial (Pemsos) dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) di Dinas Sosial memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengevaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin di Kota Padangsidempuan dan satu anggota PKH di Kelurahan Pijorkoling.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan menemui Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd. I. sebagai Pendamping PKH Kelurahan Pijorkoling untuk meminta izin peneliti untuk melakukan wawancara dengan beliau. Setelah mendapatkan izin wawancara, peneliti kemudian menyampaikan karakteristik subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai informan penelitian ini. Setelah peneliti menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan-informan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

1. Deskripsi Hasil Wawancara

Berikut merupakan penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan peneliti. Adapun daftar pertanyaan

dalam wawancara yang disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, peneliti mengamati keadaan dan situasi di Kelurahan Pijorkoling. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian dengan guna menjawab fenomena yang sedang diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

Hasil wawancara Lurah di Kelurahan Pijorkoling yaitu Bapak Zulkarnain yaitu :”Berdasarkan wawancara dengan bapak Zulkarnain yaitu selaku Lurah di Kelurahan Pijorkoling yaitu PKH ini sangat membantu para penerima manfaat di desa ini karena dengan adanya program ini meringankan sedikit beban keluarga misalnya dalam biaya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi jika untuk berkelanjutan membuat masyarakat terlena dan manja malah ada beberapa masyarakat yang cemburu sehingga memunculkan perdebatan”.¹²³

Hasil wawancara dengan Bapak Pahru Rozi yaitu selaku Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menyatakan bahwa: “PKH ini kan diperuntukkan untuk bantuan bersyarat atau program bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi penerima PKH ini baik anak sekolah, lansia, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jika kita lihat dari beberapa KPM yang menerima program pemberdayaan PKH ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya. Kalau

¹²³Wawancara Bapak Zulkarnain selaku Lurah dari Kelurahan Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota. Padangsidimpuan pada (Senin, 17 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

dari bantuan PKH yang diberikan kalo menurut kami ini hanya sebatas stimulus artinya untuk memberi penyemangat hanya sebatas bukan untuk menambah pundi penghasilan Tentunya meningkatkan pendapatan orang miskin, mengurangi beban pengeluaran dan menciptakan perilaku dan kemandirian dan graduasi mandiri khususnya”.¹²⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kelurahan Pijorkoling yaitu Ibu Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I yaitu : “Pada dasarnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dimana berupa bantuan Tunai Bersyarat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial, tetapi masih ada anggota PKH yang sudah mendapat PKH selama 5 sampai 10 Tahun yang belum mau untuk graduasi mandiri berarti ini dalam artian mereka belum merasa sejahtera padahal sudah mendapat bantuan sosial dimana tujuan dari graduasi mandiri ini adalah pemerintah ingin keluarga penerima PKH ini mampu mandiri secara ekonomi setelah mendapat dukungan berupa bantuan sosial sehingga nantinya bisa berganti dengan orang yang memang layak untuk dibantu”.¹²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Eva selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan menyatakan bahwa: “PKH program Pemerintah

¹²⁴Wawancara Bapak Fahru Rozi selaku Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan pada (Jum’at, 14 November 2025 Pukul 15.00 WIB)

¹²⁵Wawancara Ibu Ayu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan pada (Jum’at, 14 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

dari Kemensos untuk memberikan bantuan bersyarat. Dimana bantuan ini banyak jenisnya, seperti bantuan untuk pemberdayaannya, bantuan untuk rehabilitasi sosial, dan bantuan perlindungan dan jaminan. PKH wajib dengan pemberdayaan ekonomi itulah tujuan PKH itu sendiri dan tugas pendamping yang mengadakan pertemuan tiap bulannya supaya KPM itu bisa mandiri jangan hanya berharap dapat bantuan tetapi bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan itulah bedanya PKH dengan bantuan lainnya”.¹²⁶

Hasil wawancara Ibu Suriani menyatakan bahwa: “saya sangat senang menjadi anggota PKH selain terbantu dalam ekonomi, kami juga diarahkan pendamping untuk berusaha mandiri maksudnya setelah kami menerima bantuan kami dapat memanfaatkannya sebaik mungkin”.¹²⁷

2. Pembahasan Hasil Wawancara

Berdasarkan kenyataan lapangan yang ada di Kelurahan Pijorkoling Bapak Zulkarnain (54 Tahun) Selaku Lurah di Kelurahan Pijorkoling menurut narasumber PKH merupakan Program bantuan bersyarat yang digagas oleh kementerian sosial. PKH ini terdapat 7 komponen, yaitu ibu hamil, balita, SD, SMP, SMA, disabilitas, dan lansia. PKH ini untuk pemberdayaan dan menjadikan masyarakat mandiri, tetapi kebanyakan masyarakat itu menjadi terlena karena selalu berharap dan berharap sehingga membuat mereka malas. PKH ini mendorong anak tetap

¹²⁶Wawancara Ibu Eva selaku Kabid PEMSOS dan PFM di Dinas Sosial Kota. Padangdisimpun pada (Selasa, 24 Februari 2026 Pukul 10.30 WIB)

¹²⁷Wawancara Ibu Suriani KPM Penerima PKH di Kelurahan Pijorkoling . Padangdisimpun Tenggara pada (Jum'at, 13 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB)

bersekolah itu salah satu tujuannya, dia sudah masuk dalam katagori dalam data DTKS, Karena siapapun kategori penerima PKH maka merekalah diprioritaskan. Kemudian bidang Kesehatan untuk pemeriksaan gizi anak, Kesehatan ibu hamil, balita, disabilitas, dan lansia.¹²⁸

Sasaran utama PKH merupakan rumah tangga miskin (RTM) artinya kategori masyarakat miskin, yang dimana yang betujuan agar mampu meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat. Proses PKH ini dimulai dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana data awal itu yang didapatkan langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta yang telah terdata kemudian cek langsung kelapangan untuk melihat keadaan sebenarnya. Ini bertujuan agar bantuan ini tepat sasaran. Meskipun yang terjadi dilapangan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan ini. Itu dikarenakan data PKH ini diterima dari pusat langsung melalui BPS. Pendamping PKH memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PKH ini, tujuan apa, Sasaran apa, manfaat apa, sampai apabila ada pelanggaran apa sanksinya serta apa kewajibannya dari sipenerima bantuan, kewajibannya setiap penerima bantuan bagaimana peserta ini harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dibelanjakan dengan uang bantuan ini. Pendamping PKH sendiri sudah dijadwalkan pertemuan kelompok rutin setiap bulan sekali. Pertemuan ini bermanfaat sebagai wadah diskusi apabila peserta ada yang

¹²⁸Wawancara Bapak Zulkarnain selaku Lurah dari Kelurahan Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota. Padangsidempuan pada (Senin, 17 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

ingin ditanyakan. Tugas pendamping ini mewakili dinas sosial yang ada di kota Padang disimpulkan untuk mendampingi KPM PKH.

Dengan adanya PKH ini yang memiliki tujuan awal yaitu meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan anak sudah terbukti di Kelurahan Pijorkoling sudah jarang anak putus sekolah khususnya dari penerima bantuan PKH. Dan dari segi Kesehatan juga meningkat, karena tidak adalagi alasan ibu-ibu tidak memeriksakan anaknya lagi baik ke posyandu dan ke puskesmas karena sudah ada bantuan kesehatan seperti BPJS Gratis. Untuk kelurahan Pijorkoling sudah ada beberapa KPM yang meberanikan graduasi mandiri (keluar) dari kepesertaan PKH karena sudah ada program pemberdayaan sudah ada program pemberdayaan yang diberikan kementerian sosial baik dia program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) ada yang diberikan dalam bentuk usaha, PENA ini ada macamnya ada PENA regular dan PENA berdikari, dari modal yang diberikan itu sudah dibantu pemerintah dalam program pemberdayaan. Jika kita lihat dari beberapa KPM yang menerima program pemberdayaan ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya.¹²⁹

Program pemberdayaan ini bertujuan agar KPM PKH ini memiliki keterampilan dan mampu menunjang ekonomi keluarga. Program pemberdayaan ini sangatlah bagus. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pengurangan masyarakat miskin. Hasil wawancara dengan

¹²⁹Wawancara Ibu Eva selaku Kabid PEMSOS dan PFM di Dinas Sosial Kota. Padang disimpulkan pada (Selasa, 24 Februari 2026 Pukul 10.30 WIB)

para informan menyatakan bahwa tujuan PKH sudah 75% tepat sasaran, Adapun sasaran peserta PKH ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin. Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan sesuai atau tepat waktu yang telah ditentukan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya Dalam hal ini pelaksanaan pembayaran dan pencairan dana PKH di Kelurahan Pijorkoling pembayarannya dilakukan bertahap setiap 3 bulan sekali melalui ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) peserta PKH masing-masing.¹³⁰

Pengambilan keputusan, didalam pelaksanaan PKH menyangkut komitmen yang telah disepakati dan diatur apabila peserta PKH melanggar komitmen tersebut maka akan dikenakan sanksi kepada peserta PKH, dalam hal ini peserta PKH di Kelurahan Pijorkoling tidak ada yang terkena sanksi, hal tersebut sesuai dengan jawaban para informan yang menyatakan bahwa selama ini belum ada sanksi untuk peserta PKH, pada umumnya mereka patuh dengan komitmen yang telah ditetapkan. Masyarakat maupun kelompok masyarakat memegang peran kunci dalam proses ahli informasi, diadakannya penyuluhan PKH untuk diinformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan PKH melalui sosialisasi tentang PKH di Kelurahan Pijorkoling. Hal ini didukung dari, hasil wawancara dengan KPM di Kelurahan Pijorkoling, jawaban mereka sering diadakannya sosialisasi dan jawaban informan dari hasil wawancara juga menyatakan bahwa mereka sering mengadakan pertemuan ke peserta PKH, memberikan informasi

¹³⁰Wawancara Bapak Fahu Rozi selaku Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 15.00 WIB)

tentang PKH, maupun untuk mengatasi masalah yang terjadi dilapangan. Informasi yang disampaikan sebagai tahap pengenalan dasar program ini yaitu meliputi apa PKH ini, sebagaimana efektif Program ini, mekanisme pelaksanaannya, penggunaan dana PKH, syarat dan kewajiban peserta PKH.

3. *Analytical Hierarchy Proses (AHP)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling , maka skala prioritas kriteria yang diperoleh yaitu:¹³¹

Tabel. IV.8
Skala Prioritas Komponen PKH

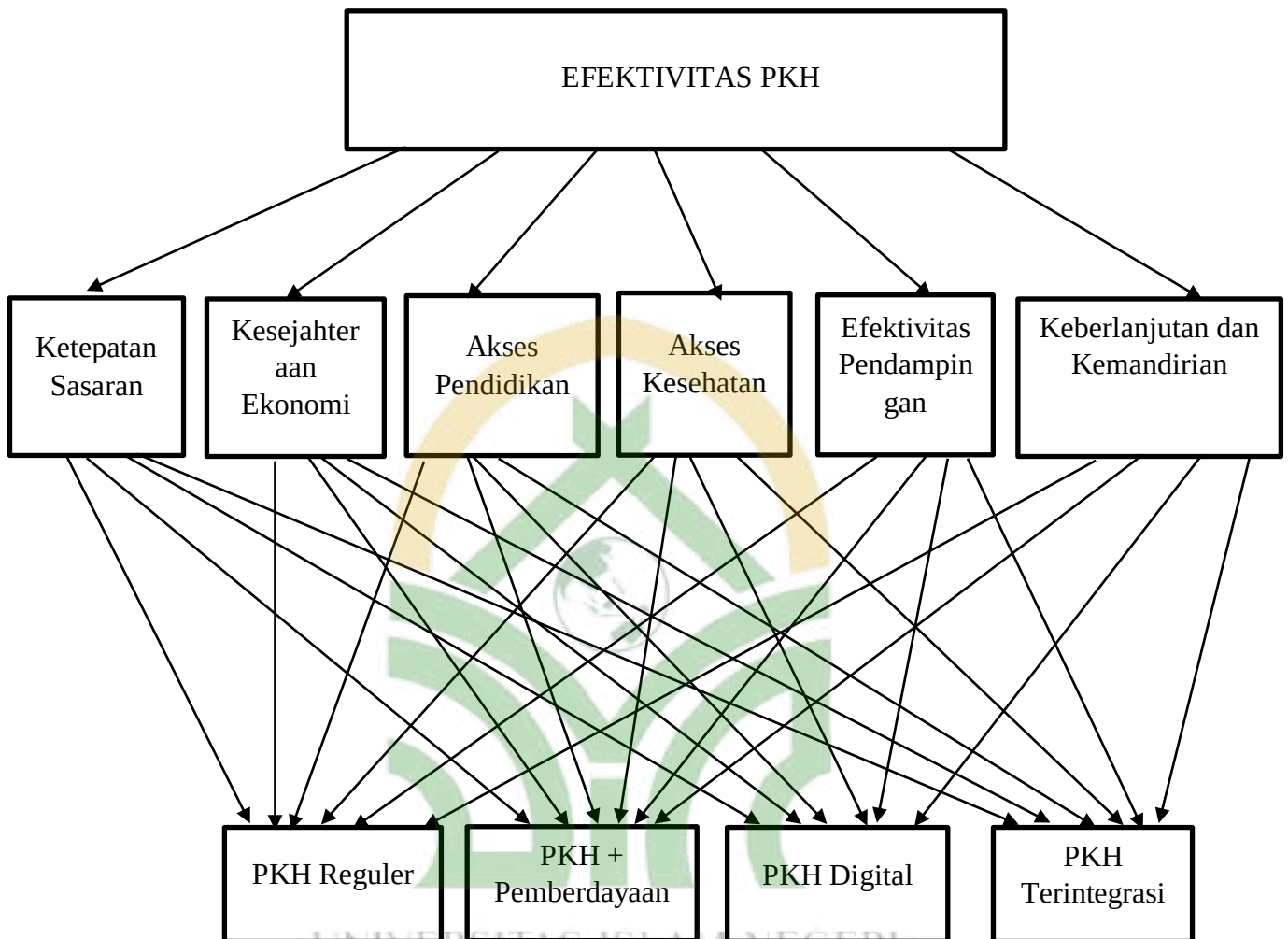
No	Kode Kriteria	Kriteria	Skala Prioritas
1	C1	Ketepatan Sasaran	Prioritas Utama
2	C2	Kesejahteraan Ekonomi	Prioritas Utama
3	C3	Aspek Pendidikan	Prioritas Kedua
4	C4	Aspek Kesehatan	Prioritas Kedua
5	C5	Efektivitas Pendampingan	Prioritas Ketiga
6	C6	Keberlanjutan dan Kemandirian	Prioritas Ketiga

Sumber: Hasil Wawancara

Untuk menentukan prioritas Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling , Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dapat dilihat struktur Hierarki pada Gambar. IV. 2

¹³¹Wawancara Ibu Ayu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

Gambar. VI.2
Struktur Hierarki PKH



Dari permasalahan yang dihadapi maka dapat di uraikan menjadi beberapa unsur, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki. Adapun yang menjadi prioritas kriteria dalam menentukan keluarga yang merasakan efektivitas dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah ketepatan sasaran, kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, efektivitas pendampingan, keberlanjutan dan kemandirian

4. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan

Dalam suatu pelaksanaan program tentunya ada hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya berikut uraian faktor penghambat dalam keefektivan Program Keluarga Harapan (PKH). Pertama kendala yang dihadapi di Kelurahan Pijorkoling sebenarnya bukan kendala yang bukan berarti atau kendala yang membuat terganggunya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan pendampingan, jadwal pencairan bantuan yang tidak tepat waktu. Pemerintah diharapkan dapat menjaga konsistensi jadwal pencairan sehingga keluarga penerima manfaat dapat mempersiapkan kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang mengeluh serta munculnya ketergantungan sosial pada sebagian masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, validasi data, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan PKH dalam menciptakan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal dan juga seperti yang kita pahami bahwa penerima PKH ini atau yang bisa kita sebut dengan RTM itu mayoritas ibu-ibu rumah tangga mungkin karena kesibukan-kesibukan dalam

penetapan pelaksanaan yang telah disepakati hal itu menjadi faktor kecil yang menghambat pelaksanaan PKH yang ada di Kelurahan Pijorkoling itu sendiri.

Sehingga dalam kegiatan sosialisasi atau yang bisa disebut dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan rutin 1 bulan 1 kali itu masih terdapat peserta PKH yang tidak dapat berhadir di kegiatan tersebut yang sebagai mana bahwa hak dan kewajiban peserta PKH tersebut dikarenakan ada yang masih bekerja atau keperluan lainnya. Sehingga berbagai alasan para peserta tersebut merupakan salah satu faktor penghambat keefektifan program bantuan ini. Kemudian adanya penyalahgunaan dana bantuan yang terjadi pada para peserta merupakan faktor penghambat keefektifan PKH. Sebagian peserta PKH juga ada yang menggunakan uang bantuan tersebut tidak sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan masih ada beberapa sebagian peserta menyalahgunakan bantuan tersebut seperti membeli kuota internet, pulsa, dan mempercantik diri seperti baju baru seharusnya peserta PKH mengamankan dana bantuan tersebut dengan semestinya.

Di dalam suatu program koordinasi yang kurang relevan dari berbagai pihak menjadi faktor penghambat keefektifan PKH ini sebagaimana ada sebagian dari masyarakat Kelurahan Pijorkoling yang belum menerima bantuan PKH ini. Dikarenakan belum terdapatnya koordinasi dari pihak RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sehingga terjadi

belum meratanya keluarga yang kurang mampu, ini belum mendapatkan bantuan dan belum direkomendasikan oleh beberapa pihak. Dalam faktor penghambat keefektifan Program Keluarga Harapan tentunya pasti ada faktor pendukungnya yaitu solusi dalam memecahkan masalah. Berikut faktor pendukung untuk keefektifan PKH di dalam kegiatan sosialisasi PKH seharusnya peserta PKH tersebut harus dapat menghadiri kegiatan tersebut agar mereka mendapatkan ilmu dan arahan yang diberikan oleh pendamping PKH karena itu menjadi hak dan kewajiban peserta tersebut.

Para pendamping ada baiknya memberikan teguran supaya para peserta tersebut menjadi lebih disiplin lagi karna kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) cuma diadakan pertemuan 1 kali dalam sebulan. Pendamping PKH juga tentunya memberikan arahan yang dapat diterima RTM tersebut. Dan sebaliknya para peserta lebih mematuhi prosuder yang ada. Ada beberapa laporan bahwa ada sebagian RTM yang menggunakan uang bantuan PKH tidak dengan semestinya atau sesuai komponen yang telah ditetapkan, beberapa dari mereka malah menggunakan membeli pulsa, dan mempercantik diri. Supaya biaya bantuan/dana bantuan PKH ini tidak disalah gunakan oleh penerima manfaat maka para Pendamping PKH memberikan edukasi secara terus-menerus dan mengingatkan kepada penerima manfaat untuk menggunakan sesuai dengan tujuan pemerintah yang menyalurkan bantuan kemudian disediakan buku monitoring

penggunaan bantuan yang telah diberikan tersebut dan dimulai dari berapa menerimanya secara nominal untuk apa digunakan kemudian selanjutnya dilampirkan bukti penggunaan bantuan tersebut. Pendamping PKH terus menerus menegur dan memberikan arahan kepada peserta PKH itu dan memberikan buku monitoring agar mereka menjadi lebih bertanggung jawab dalam hal itu nantinya untuk sebagai bukti apa saja yang telah digunakannya. Sehingga mereka tidak lagi menyalahgunakan dana bantuan tersebut dan tentunya bisa mengubah perilaku masyarakat walaupun hanya sedikit. Kurang koordinasi dari beberapa pihak sehingga terjadinya belum meratanya masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan PKH ini hal ini dapat diupayanya dengan memperbaharui data BDT (Basis Data Terpadu) yang ada tersebut atau adanya kerja sama antar RT, RW, maupun Kelurahan supaya mereka tau siapa saja masyarakat yang masih belum menerima bantuan tersebut dan memiliki karakteristik atau ciri yang telah memenuhi syarat mendapatkan bantuan PKH. Dan tentunya pendamping juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan untuk pengusulan nama-nama peserta PKH tersebut langsung dari pusat sehingga masyarakat yang belum menerima bantuan diharapkan sabar supaya dapat terealisasi.

b. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara , Kota Padangsidempuan

Peneliti telah melakukan wawancara dan menanyakan tentang kesulitan apa saja yang dialami untuk meningkatkan efektivitas terhadap Program Keluarga Harapan. “Sejauh ini tidak ada kesulitan, tetapi dalam pelaksanaannya yaitu dalam pertemuan rutin masih banyak ibu-ibu anggota PKH ini masih membuat alasan agar tidak datang pertemuan tetapi pertemuan ini merupakan salah satu kewajiban anggota, selain itu lancar-lancar saja sehingga efektif dalam kegiatan maupun program ini”. (Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I., selaku pendamping PKH Kelurahan Pijorkoling, wawancara dilakukan November 2025) Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pendamping memiliki kesulitan pada saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) cuma diadakan pertemuan 1 kali dalam sebulan, dalam meningkatkan efektivitas PKH itu sendiri maupun kegiatan yang dilakukan.¹³²

Jadi dapat dikatakan efektif dalam program ini dan mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS dalam penelitian Eko Sugiharto indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau

¹³²Wawancara Ibu Ayu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada (Jum’at, 14 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹³³ Adapun indikator atau ukuran yang di ambil peneliti terkait penelitian ini mengenai pencapaian tujuan PKH ini yaitu Kesejahteraan Masyarakat yaitu: Kesehatan, Pendidikan, ekonomi rumah tangga, Kesejahteraan sosial, dan perubahan Perilaku/kemandirian.

Dengan adanya PKH ini yang memiliki tujuan awal yaitu meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan anak sudah terbukti di Kelurahan Pijorkoling sudah jarang anak putus sekolah khususnya dari penerima bantuan PKH. Dan dari segi Kesehatan juga meningkat, karena tidak adalagi alasan ibu-ibu tidak memeriksakan anaknya lagi baik ke posyandu dan ke puskesmas karena sudah ada bantuan kesehatan seperti BPJS Gratis. Untuk kelurahan Pijorkoling sudah ada beberapa KPM yang meberanikan graduasi mandiri (keluar) dari kepesertaan PKH karena sudah ada program pemberdayaan sudah ada program pemberdayaan yang diberikan kementerian sosial baik dia program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) ada yang diberikan dalam bentuk usaha, PENA ini ada macamnya ada PENA regular dan PENA berdikari, dari modal yang diberikan itu sudah dibantu pemerintah dalam program pemberdayaan. Jika kita lihat dari beberapa

¹³³Sugiharto, Eko. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik." *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Vol. 4, No. 2, 2007

KPM yang menerima program pemberdayaan ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya.

Program pemberdayaan ini bertujuan agar KPM PKH ini memiliki keterampilan dan mampu menunjang ekonomi keluarga. Program pemberdayaan ini sangatlah bagus. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pengurangan masyarakat miskin. Hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa tujuan PKH sudah 75% tepat sasaran, Adapun sasaran peserta PKH ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin. Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan sesuai atau tepat waktu yang telah ditentukan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya Dalam hal ini pelaksanaan pembayaran dan pencairan dana PKH di Kelurahan Pijorkoling pembayarannya dilakukan bertahap setiap 3 bulan sekali melalui ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) peserta PKH masing-masing.

Dari hasil data yang telah didapatkan oleh peneliti mulai dari pengumpulan data menggunakan angket dengan skala 1-9 sesuai dengan ketentuan pengumpulan data dalam metode AHP (*Analytical Hierarki Process*). Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan saat dapat diukur

menggunakan table analisis seperti yang ditunjukkan oleh table dibawah.

Tabel IV.9
Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Untuk menentukan prioritas Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan saat dapat diukur menggunakan tabel analisis diatas. Dan untuk menghitung Logis yaitu dengan cara Pertama, onjek-objek yang serupa bisa

dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.¹³⁴

Telah didapatkan data dari angket sesuai dengan skala berbandingan data yang merupakan sistem pengambilan keputusan dalam penelitian ini yang kemudian di olah menggunakan *Software SuperDecisions* yaitu yang dimulai dengan perbandingan antar *Node Criteria*. Yang dimana terdapat kriteria yang tertinggi yaitu Ketepatan sasaran dengan nilai (0,20032).

c. Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara , Kota Padangsidempuan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, terdapat beberapa strategi yang dilakukan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

¹³⁴Nur Aminudin, "Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidana Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarcy Process (AHP)", Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan SDM, Vol.1, No.1, November 2020, hlm. 69.

1. Ketepatan sasaran yang tepat. Penentuan penerima manfaat PKH dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga dengan ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.
2. Strategi kedua adalah pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam pelaksanaan PKH, pemerintah menugaskan pendamping PKH yang bertugas memberikan pembinaan, edukasi, serta memantau kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Pendampingan ini dilakukan secara berkala melalui pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan.
3. Strategi ketiga adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. PKH mendorong keluarga penerima manfaat untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah secara rutin serta memanfaatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi anak, dan pemantauan gizi balita. Dengan adanya syarat tersebut, PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Strategi keempat adalah mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, pendamping PKH memberikan motivasi dan arahan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat mengembangkan usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif. Hal ini diharapkan dapat membantu keluarga keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.

5. Strategi kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Pemerintah

bersama pendamping PKH secara rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang berhak dan digunakan untuk kebutuhan yang mendukung kesejahteraan keluarga.

d. Evaluasi Prioritas Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara , Kota Padangsidempuan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta memutus rantai kemiskinan. Program PKH mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Bantuan yang diberikan secara berkala dapat meringankan beban pengeluaran keluarga sehingga masyarakat dapat lebih fokus pada peningkatan

kualitas hidup, seperti memastikan anak tetap bersekolah dan memanfaatkan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pijorkoling.

Melalui pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan, keluarga penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup mereka, sehingga tujuan program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemberdayaan yang dilakukan melalui program PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diolah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diolah menggunakan *Software Super Decisions* terdapat Nilai prioritas pada kriteria Ketepatan sasaran memiliki prioritas tertinggi yaitu 0,20032. Pada kriteria aspek pendidikan memiliki prioritas kedua dengan nilai 0,19827, Pada kriteria aspek kesehatan memiliki prioritas ketiga dengan nilai 0,18209, Pada kriteria efektivitas pendampingan memiliki prioritas keempat dengan nilai

0,15175, Pada kriteria Kesejahteraan Ekonomi memiliki prioritas kelima dengan nilai 0,14073, dan Pada Kriteria Keberlanjutan dan Kemandirian memiliki prioritas keenam dengan nilai 0,16885.

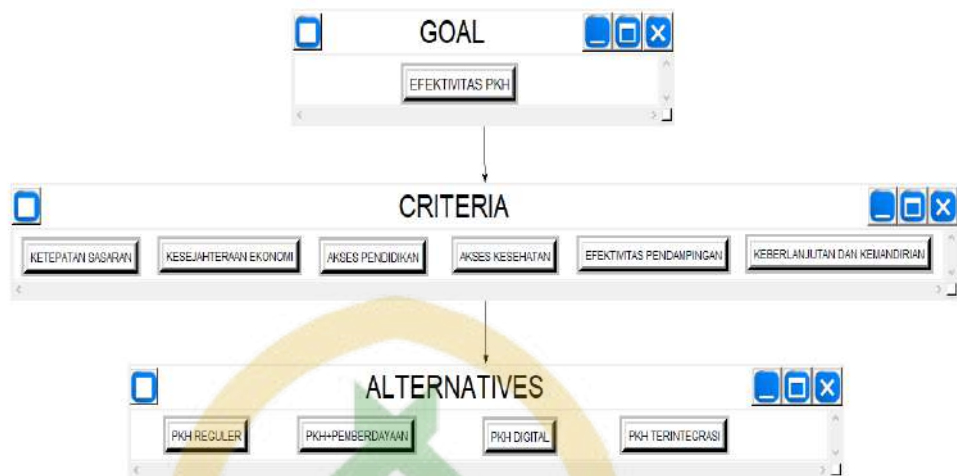
Perbandingan antar *Node Criteria* dengan *Node Alternative* yang setelah dilakukan pengolahan dapat hasil Sintesa yang menyatakan bahwa salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi tingkat perbandingan dengan indikator lainnya yaitu indikator PKH + Pemberdayaan dengan hasil nilai sintesa tertinggi dengan nilai (1.000000). Sesuai dengan hasil wawancara dengan pendamping PKH yang menerangkan tujuan dari PKH ini yaitu PKH itu adalah tidak hanya memberikan bantuan bersyarat, akan tetapi berfokus untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, kualitas hidup keluarga miskin (KPM) agar keluar dari kemiskinan dan mencapai tingkat kesejahteraan. Serta sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah ditingkat PKH + Pemberdayaan di Kelurahan Pijorkoling setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini masyarakat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dan dengan PKH + pemberdayaan tentunya meningkatkan hidup keluarga miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tentunya menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan demikian jika PKH + Pemberdayaan meningkat tentunya sangat berdampak sekali, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga graduasi (keluar) dari kepesertaan PKH.

5. *Super Decisions*

Perangkat lunak *Super Decisions* dipakai untuk pengambilan suatu keputusan dengan menyertakan factor ketergantungan dan feedback. Hal ini menerapkan prinsip Analytical Hierarchy Process (AHP). Perangkat lunak ini menyediakan alat untuk membuat dan mengelola model AHP, dengan memasukkan penilaian, mendapatkan hasil dan melakukan analisis sensitivitas pada hasil. Model *Super Decisions* terdiri dari kelompok elemen (node) yang diatur berdasarkan level. Model hirarki yang paling sederhana yaitu yang terdiri dari Goal, Criteria, dan Alternatif seperti yang telah di gambarkan pada Gambar IV.2.

a. Model AHP *Super Decisions*

Seperti terlihat pada gambar IV.4, struktur AHP pada system dibangun pada tiga kluster utama yang ada yaitu: Kluster 1 Goal, Kluster 2 Criteria dan Kluster 3 Alternatives. Setiap kluster memiliki minimal sebuah node, dalam hal ini kluster 1 Goal (Node: Efektivitas PKH), Kluster 2 Kriteria (Node: ketepatan sasaran, kesejateraan ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, efektivitas pendampingan, dan keberlanjutan dan kemandirian), Kluster 3 Alternatives (Node: PKH Reguler, PKH + Pemberdayaan, PKH Digital dan PKH Terintegrasi).

Gambar IV.3**Struktur AHP *Super Decisions***

- b. Perbandingan Antar Node Criteria Node “Efektivitas PKH” yang berada dalam kluster 1 Goal, dibandingkan dengan semua Node yang berada dalam Kluster 2 Criteria, dengan Hasil: Ketepatan sasaran (0,20032), Kesejahteraan Ekonomi (0,14073), Akses Pendidikan (0,19827), Akses Kesehatan (0,18209), Efektivitas Pendampingan (0,15175), Keberlanjutan dan Kemandirian (0,12685), seperti yang terlihat pada Table IV.6

Tabel IV.10
Hasil Perbandingan Antar Node Kriteria

AKSES KES~		0.18209
AKSES PEN~		0.19827
EFEKTIVIT~		0.15175
KEBERLANJ~		0.12685
KESEJAhte~		0.14073
KETEPATAN~		0.20032

Sumber : Hasil olahan *Super Decisions*

c. Perbandingan Node Criteria dengan Cluster Altrnative

i. Node Ketepatan Sasaran dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 10., Node Ketepatan Sasaran dibandingkan dengan semu Node yang berada dalam Cluster Alternatives. Dengan Hasil: PKH Digital (0,17007), PKH Reguler (0,27720), PKH terintegrasi (0,15499), dan PKH + Pemberdayaan (0,39774).

Tabel IV.11
Hasil Perbandingan Node Ketepatan Sasaran
dengan Cluster Alternatives

PKH DIGIT~		0.17007
PKH REGUL~		0.27720
PKH TERIN~		0.15499
PKH+PEMBE~		0.39774

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

ii. Node Kesejahteraan ekonomi dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 11., Node kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan semu Node yang berasal dalam cluster Alternatives. Dengan Hasil: : PKH Digital (0,31677), PKH Reguler (0,30168), PKH terintegrasi (0,11899), dan PKH + Pemberdayaan (0,26256).

Tabel IV.12
Hasil Perbandingan Kesejahteraan Ekonomi
dengan Cluster Alternatives

PKH DIGIT~		0.31677
PKH REGUL~		0.30168
PKH TERIN~		0.11899
PKH+PEMBE~		0.26256

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

iii. Node Akses Pendidikan dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 12., Node Akses Pendidikan dibandingkan dengan semua Node yang berada dalam Kluster Alternatives. Dengan Hasil: PKH Digital (0,16344), PKH Reguler (0,26653), PKH terintegrasi (0,16344), dan PKH + Pemberdayaan (0,40659).

Tabel IV.13
Hasil Perbandingan Node Akses Pendidikan
dengan Cluster Alternatives

PKH DIGIT~		0.16344
PKH REGUL~		0.26653
PKH TERIN~		0.16344
PKH+PEMBE~		0.40659

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

iv. Node Akses Kesehatan dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 13., Akses Kesehatan dibandingkan dengan semua Node yang berasal dalam Cluster Alternatives. Dengan Hasil: PKH Digital (0,22849), PKH Reguler (0,18909), PKH terintegrasi (0,29477), dan PKH + Pemberdayaan (0,28765).

Tabel IV.14
Hasil Perbandingan Node Akses Kesehatan
dengan Cluster Alternatives

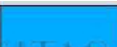
PKH DIGIT~		0.22849
PKH REGUL~		0.18909
PKH TERIN~		0.29477
PKH+PEMBE~		0.28765

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

v. Node Efektivitas Pendampingan dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 14., Efektivitas Pendampingan dibandingkan dengan semua Node yang berasal dalam Cluster Alternatives. Dengan Hasil: PKH Digital (0,19552), PKH Reguler (0,16698), PKH terintegrasi (0,35916), dan PKH + Pemberdayaan (0,27834).

Tabel IV.15
Hasil Perbandingan Node Efektivitas Pendampingan
dengan Cluster Alternatives

PKH DIGIT~		0.19552
PKH REGUL~		0.16698
PKH TERIN~		0.35916
PKH+PEMBE~		0.27834

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

vi. Node Keberlanjutan dan Kemandirian dengan Cluster Alternatives

Seperti yang terlihat pada Tabel. IV. 15., Keberlanjutan dan Kemandirian dibandingkan dengan semua Node yang berasal dalam Cluster Alternatives. Dengan Hasil: PKH Digital (0,16703), PKH

Reguler (0,15472), PKH terintegrasi (0,40454), dan PKH + Pemberdayaan (0,27372).

Tabel IV.16
Hasil Perbandingan Node Keberlanjutan dan Kemandirian dengan Cluster Alternatives

PKH DIGIT~		0.16703
PKH REGUL~		0.15472
PKH TERIN~		0.40454
PKH+PEMBE~		0.27372

Sumber : Hasil olahan Super Decisions

d. Hasil Sintesa

Hasil Sintesa dari sistema dapat dilihat pada Tabel. IV.17, dapat ditunjukkan bahwa PKH + Pemberdayaan Terpilih sebagai Tingkat Efektivitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencapai Kesejahteraan Masyarakat yang memenuhi kriteria.

Tabel IV. 17
Hasil Sintesa AHP

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
PKH DIGITAL		0.663735	0.206824	0.103412
PKH REGULER		0.682896	0.212795	0.106397
PKH TERINTEGRASI		0.862544	0.268774	0.134387
PKH+PEMBERDAYAAN		1.000000	0.311607	0.155803

Sumber : Hasil Olahan Super Decisions

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pijorkoling cukup baik namun terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan secara rutin 1 kali dalam satu bulan. Namun, pertemuan ini dianggap sepele sehingga sebagian pihak tidak menghadirinya serta kendala lainnya yaitu tidak menggunakan dana yang diberikan dengan fungsi semestinya seperti dana yang dikeluarkan guna membeli peralatan anak sekolah tetapi disalahgunakan untuk hal-hal yang lain.
2. Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pijorkoling sudah cukup efektif karena sudah ada beberapa KPM yang meberanikan graduasi mandiri (keluar) dari kepesertaan PKH dengan adanya program pemberdayaan yang diberikan kementerian sosial baik dia program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) ada yang diberikan dalam bentuk usaha, PENA ini ada macamnya ada PENA regular dan PENA berdikari, dari modal yang diberikan itu sudah dibantu pemerintah dalam program pemberdayaan. Jika kita lihat dari beberapa KPM yang menerima program

pemberdayaan ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya. Hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa tujuan PKH sudah 75% tepat sasaran. Dari hasil data yang telah didapatkan oleh peneliti mulai dari pengumpulan data menggunakan angket dengan skala 1-9 sesuai dengan ketentuan pengumpulan data dalam metode AHP (*Analytical Hierarki Process*). Telah didapatkan data dari angket yang kemudian di olah menggunakan *Software SuperDecisions* yaitu yang dimulai dengan perbandingan antar *Node Criteria*. Yang dimana terdapat kriteria yang tertinggi yaitu Ketepatan sasaran dengan nilai (0,20032).

3. Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan Pijorkoling yaitu Ketepatan sasaran yang tepat. Penentuan penerima manfaat PKH dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Strategi kedua adalah pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam pelaksanaan PKH, pemerintah menugaskan pendamping PKH yang bertugas memberikan pembinaan, edukasi, serta memantau kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Pendampingan ini dilakukan secara berkala melalui pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Strategi ketiga adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. PKH mendorong keluarga penerima manfaat untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah secara rutin serta memanfaatkan layanan kesehatan.

Strategi keempat adalah mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, pendamping PKH memberikan motivasi dan arahan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat mengembangkan usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif. Dan Strategi kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Pemerintah bersama pendamping PKH secara rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang berhak dan digunakan untuk kebutuhan yang mendukung kesejahteraan keluarga.

4. Berdasarkan hasil yang diolah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diolah menggunakan *Software Super Decisions* terdapat Nilai prioritas pada kriteria Ketepatan sasaran memiliki prioritas tertinggi yaitu 0,20032. Pada kriteria aspek pendidikan memiliki prioritas kedua dengan nilai 0,19827, Pada kriteria aspek kesehatan memiliki prioritas ketiga dengan nilai 0,18209, Pada kriteria efektivitas pendampingan memiliki prioritas keempat dengan nilai 0,15175, Pada kriteria Kesejahteraan Ekonomi memiliki prioritas kelima dengan nilai 0,14073, dan Pada Kriteria Keberlanjutan dan Kemandirian memiliki prioritas keenam dengan nilai 0,16885. Berdasarkan hasil yang diolah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diolah menggunakan *Software Super Decisions* terdapat perbandingan antar *Node Criteria* dengan *Node Alternative* yang setelah dilakukan pengolahan dapat hasil Sintesa yang menyatakan bahwa salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi tingkat

perbandingan dengan indikator lainnya yaitu indikator PKH + Pemberdayaan dengan hasil nilai sintesa tertinggi dengan nilai (1.000000). Dengan PKH + pemberdayaan tentunya meningkatkan hidup keluarga miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social, tentunya menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan demikian jika PKH + Pemberdayaan meningkat tentunya sangat berdampak sekali, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga graduasi (keluar) dari kepesertaan PKH maka Program Keluarga Harapan ini terlaksana secara Efektiv.

B. Saran

Dari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Apabila jadwal pelaksanaan dalam pencairan dana tidak tepat waktu, sebaiknya ditentukan penetapan jadwal dan tanggal pencairan dana PKH untuk menghindari terjadinya informasi yang tidak jelas dapat mengurangi kesalahpahaman dan keluhan dari penerima manfaat terkait keterlambatan pencairan bantuan. Pendamping PKH juga diharapkan lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pencairan, syarat penerimaan bantuan, serta penggunaan bantuan secara bijak dan produktif agar bantuan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui bantuan pendidikan,

kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan pendampingan, serta munculnya ketergantungan sosial pada sebagian masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, validasi data, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan PKH dalam menciptakan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

3. Sebaiknya dilakukan survey dan pengawasan secara intensif dalam mendata kembali masyarakat rumah tangga sangat miskin secara objektif dalam penentuan peserta PKH untuk meminimalisir masalah kecemburuan sosial.
4. Sebaiknya lebih dilakukan usaha yang lebih mendalam ataupun dengan cara-cara yang lebih supaya si penerima PKH lebih banyak untuk mundur dari kepesertaan PKH dalam artian graduasi mandiri karena dengan graduasi itu adalah kunci keberhasilan program PKH ini adalah pemberdayaan karena dengan keluar dari PKH berarti penerima manfaat itu sudah sejahtera karena sudah berani keluar dari kepesertaan PKH.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian PKH dengan metode-metode sistem pendukung keputusan yang berbeda, yang tentunya sesuai dengan studi kasus yang terjadi di lapangan. Dan juga dapat dilengkapi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui pola, sehingga dapat dipetakan wilayah penduduk yang layak atau tidak layak menerima bantuan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Labaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, alih bahasa Hartono dan Amin Rajab, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi5 Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberday6aan Masyarakat (Edisi Revisi 2012)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ai Sri Wahyuni, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasiterpadu Kecamatan (Paten)Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*, JAPB: Vol. 2, No. 2, November 2019
- Aliska Putri Maulida, 2023. *Analisis Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di kelurahan Bakhti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hhidayatullah Jakarta .
- Al-Qurthubi. 2006, *Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Al-Resalah.
- Aminudin, Nur dan Ida Ayu Puspita Sari. 2017. *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Desa Bangun Rejo. Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hiearachy Process (AHP)*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model). 5 : 66-72
- Azam Syafrudin, *Mewujudkan Keluarga Sejahtera dari perspektif Psikologis dan Sosial* , Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan Volume 3 No. 2 November 2023 FIP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG.
- Aznan Hasana, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Administrasi Zakat di Malaysia: Pendekatan AHP*, , Journal Ekonomi dan Bisnis Islam Global, Vol. 9. No. 2 (2021) 029-037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-ISSN: 2338-7920, p-ISSN: 2338-2619
- Bambang Suprpto, dan Ahmad Sujoni, *Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)* (Jurnal Informatika dan Komputer, Vol. 7, No. 2P-ISSN: 2337-8344, E-ISSN:2623-1247, 2019).
- Basis Data Terpadu adalah sebuah system yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat penerimaan bantuan sosial, baik rumah tangga keluarga maupun individu penerima berdasarkan kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana

program. Dikutip dari TNP2K, Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012)

Barrientos, A. (2019). *The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific*. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 62, 28. <https://www.adb.org/publications/social-assistance-poverty-inequality-asia-pacific%0Amozextension://>

Becker, G. S. (1993). *Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. In *Notes and Queries* (Vols. s1-IV, Issue 92). <https://doi.org/10.1093/nq/s1-IV.92.83-a>

Berutu, N., Siregar, Z., Budiwiwaramulja, D., & Hodriani, H. (2020). PKM pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk olahan pisang sale Sidodadi Ramunia. *Pelita Masyarakat*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v1i2.3219>

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2011)

Didi Suardi, “Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 13, 2021).

Direktorat Jaminan Sosial, *Pedoman Operasional PKH Bagi Penerima Pendidikan*, (Jakarta, 2011).

Direktorat Jaminan Sosial, *Pedoman Operasional PKH Bagi Penerima Pendidikan*, (Jakarta, 2011).

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN dan KEMENTERIAN KEUANGAN, “KAJIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN” (DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN, 2015).

Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). *The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study*. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2580>

- Dollu, E. B. S. (2019). *Modal Sosial: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur*. Warta Governare: Junal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
- E. Elviandri, “*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* 31, No. 2 (June 3, 2019).
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Ed. Revisi, Cet. 5 (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Emanuel Bate Satria Dollu, 2020, “*MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur*”
- Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, 2017, “*Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*.”
- Fatimah Sri Rahmadhani Siregar, *Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary Padangsidempuan, 2024).
- Faturochman, *Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018).
- Firda Dwi Anjani, Aribowo dan Ade Subarkah, 2020, “*Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah Di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal*”
- Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha, *Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan*, UNDIP: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2018.
- Fretty Luciana Malau Gurning , Halking, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir* , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 5, Nomor. 4 Desember 2025 e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, hlm. 774-796

- Gita Dwi Fauza, *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Penentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Binjai*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2020)
- Grant, Heidi & Higgins, E. T. 2003. *Optimism, Promotion Pride and Prevention Pride as Predictor of Quality of Life*. *Journal of Experimental Social Psychology*, 29
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hamsiah, *Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Dosen*, *EXPLORER Journal of Computer Science and Information Technology* E-ISSN 2774-4647
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 1994. 477.
- Ika Rini Harmonis, Abdul Malik, *Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG's Di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, *Future Akademika, The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* Volume 2, No 3, Agustus 2024 pp. 107-124, e-ISSN: 3025-7905, p-ISSN: 3026-166X.
- Hanifan, L.J. (1916). *The Rural School Community Centre*. *Annals of the American of Political and Social Science*, 67, 130-138.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 8, Tafsir QS. Al-Hasyr: 6–7, Dar al-Fikr, Beirut
- Irwan. (2022). *Sosiologi Kebencanaan : Modal Sosial, Media Sosial dan Resiliansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jadian Parhusip, *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya* (Jurnal Teknik Informatika, Vol. 13, No. 2, Palangkaraya, Agustus 2019)
- Jaenal Effendia, Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas IPB, Indonesia, *Strategi Prioritas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Skema Syariah di Indonesia* Indonesia: Pendekatan
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 8, Tafsir QS. Al-Hasyr: 6–7, Dar al-Fikr, Beirut

Internal, Pasar, dan Regulasi, Journal Ekonomi dan Bisnis Islam Global, Vol. 9. No. 2 (2021) 109-120, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta e-ISSN: 2338-7920, p-ISSN: 2338-2619

Jusrianto, J. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendukung Sekretaris Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang Administrasi*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V3i2.285> Kemp, S. P. (2023). *Building Jetties To The Future: Thinking And Doing Social Work*

John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 254.

Kibukho, K. (2021). *Mediating Role Of Citizen Empowerment In The Relationship Between Participatory Monitoring And Evaluation And Social Sustainability*. *Evaluation And Program Planning*, 85, 101911. <https://doi.org/10.1016/J.Evalprogplan.2021.101911>

Kementerian Sosial RI, "Pedoman Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan".

Kementerian Sosial RI, "Pedoman Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan."

Kementerian Sosial RI, "Pedoman Pelaksanaan Perogram...", "

Lendy Zelvian Ailhari, Yudistia Teguh Ali Fikri, dkk, *Kumpulan Penafsiran Al-Qur'an, Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung Widina Bhakti Persada Bandung. 2021), hlm. 100.

Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). *Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal Di Desa Menari Tanon*. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 1–16. <https://doi.org/10.15294/Jnece.V4i1.34481>

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

Lorts, C., Tasevska, N., Adams, M. A., Yedidia, M. J., Tulloch, D., Hooker, S. P., & OhriVachaspati, P. (2019). *Participation In The Supplemental Nutrition Assistance Program And Dietary Behaviors: Role Of Community Food Environment*. *Journal Of The Academy Of Nutrition And Dietetics*, 119(6), 934-943.E2. <https://doi.org/10.1016/J.Jand.2018.11.021>

- Lowder, S. K., Bertini, R., & Croppenstedt, A. (2017). *Poverty, social protection and agriculture: Levels and trends in data*. *Global Food Security*, 15 (2016, March), 94-107. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.06.001>
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 16)
- Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development*, 1. Ed, The Pearson Series in Economics (Harlow Munchen: Pearson, 2015).
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. 14, 23.
- Menashy, F., & Zakharia, Z. (2023). *Partnerships For Education In Emergencies: The Intersecting Promises And Challenges Of Sdg 4 And Sdg 17*. *International Journal Of Educational Development*, 103, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102934>
- Mulyono, S. E. (2020). *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.964>
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Nadhifa Ramdhanisa Nunuk Triwahyuningtyas, *analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, E-ISSN: 2809-8544, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vo.1. No. 7 (2022).
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nakhle, P., Stamos, I., Proietti, P., & Siragusa, A. (2024). *Environmental Monitoring In European Regions Using The Sustainable Development Goals (Sdg) Framework*. *Environmental And Sustainability Indicators*, 21, 100332. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100332>
- Nicholas Rose, *Human Relations Theory and People Manajement*. *Eoropean Management Journal* 34 (2005); 43.

Novlin Moninda, 2021, *“Modal Sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar*

Nuramalia Putri, Mhd. Rafi, *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung*, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Vol.02, No.02 Desember 2023.

Nur Aminuddin, Ida Ayu Puspita Sari, *Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran dengan Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*, (STMIK Pringsewu Lampung).

Nur Aminudin, *“Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)”*, Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan SDM, Vol.1, No.1, November 2020.

Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Nurhidaya Holida, dkk, *Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo*, TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.2 Mei 2023 e-ISSN: 2985-9204; p-ISSN: 2985-9743, Hal 136-158 DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.171>

PKH. 2016. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial.

Qur'an Kemenag," diakses 23 Juni 2024, <https://quran.kernenag.go.id/>

Ridela Nuraulia, dkk *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal, Volume 2 Nomor 2 (2023) 294-304 E-ISSN 2962-1585, DOI: 10.56672/assyirkah.v2i2.42.

Ridena, S. (2021). *Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Perdesaan*. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32630/Sukowati.V5i1.196>

Saaty, T. L., *Decision Making for Leader : The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1993.

Saiful Amir dan Umi Din Nurzanah Sembiring, *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022). hlm. 189.

Santoso, W. M. (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia : Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saprida, S., dkk. *Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Hukum Islam*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), (2022), 126.
<https://doi.org/10.36908/esha.v7i2.329>

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswati Saragi , Maria Ulfa Batoebara dan Nur Ambia Arma, 2021, “*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak*”

Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia dan Kedepan*, (Bandung: Fokus Media, 2012).

Sri Wahyuni Sigalingging, dkk, *Penerapan Metode AHP Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Helvetia Tengah Medan* (*Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial*, Vol. 02, No. 01, 01 Mei 2020).

Sugiharto, Eko. “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Vol. 4, No. 2, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif....*

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*

Sugiyono, *Metode Penelitian.....*

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991).
- Theresia Eriyani', dkk, *Hubungan Kesejahteraan Spiritual Dengan Death Anxiety Pada Pasien Paliatif: Literatur Review*, E-ISSN: 2746-3486 Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995).
- Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2015).
- Terru, I., Kurniawan, B. A., & Ismail, I. (2023). *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1639>
- TNP2K, *"Kumpulan Tanya-Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan"* (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012).
- Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, and Natsir Muhammad, *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendidikan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

W. J. S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia," Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Wasitohadi and Sri Rahayu Theresia, *DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA* (Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

Wawancara Bapak Zulkarnain selaku Lurah dari Kelurahan Pijorkoling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota. Padangsidempuan pada (Senin, 17 November 2025 Pukul 14.00 WIB)

Wawancara Bapak Pahru Rozi selaku Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 15.00 WIB)

Wawancara Ibu Ayu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada (Jum'at, 14 November 2025 Pukul 15.00 WIB)

Wawancara Ibu Eva selaku kabid PEMSOS dan PFM di Dinas Sosial Kota. Padangsidempuan pada (Selasa, 24 Februari 2026 Pukul 10.30 WIB)

Wawancara Ibu Suriani KPM Penerima PKH di Kelurahan Pijorkoling . Padangsidempuan Tenggara pada (Jum'at, 13 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB)

Wawancara dengan Warga di Kelurahan Pijorkoling, (Jum'at, 13 Februari 2026 Pukul 11.30)

Widia Lestari, dkk, 2019, "*Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH*

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Zulkarnain Hidayat, S.Sos
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Pekerjaan : Lurah
Umur : 54 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum'at/ 13 Februari 2026
Alamat : Kelurahan Pijorkoling

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana PKH yang efektif menurut bapak/Ibu?	Menurut saya PKH yang efektif itu sesuai tujuan dan sasaran bagi penerima artinya layak menerima dan dia dikategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan ekonominya
2	Menurut Bapak/Ibu Apakah PKH yang sedang berjalan ini sudah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan penerima?	Penerima yang sekarang ini menurut saya sesuai dengan verifikasi yang telah dilaksanakan dalam sasaran penerima menurut saya sudah efektif
3	Menurut Bapak/Ibu Apakah program PKH yang disertai pemberdayaan ekonomi lebih berdampak dibanding PKH biasa?	Ya sangat berdampak karena kan sebenarnya tujuan PKH ini untuk pemberdayaan dan menjadikan masyarakat mandiri, tetapi kebanyakan masyarakat itu menjadi terlena karena selalu berharap dan berharap sehingga membuat mereka malas
4	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting digitalisasi dalam pelaksanaan PKH saat ini?	Jika berbicara digitalisasi dalam penanganan penerima PKH ini saya rasa sudah cukup efektif apalagi sekarang kita sudah menggunakan digitalisasi dalam penanganan maupun penyaluran PKH
5	Menurut Bapak/Ibu, Apakah integrasi PKH dengan program sosial lain membuat bantuan lebih tepat sasaran?	Untuk pencapaian sasaran ini kan daa tibit, yang pertama ada temu yang diputarkan dari dinas sosial dan itu langsung berkoordinasi ke kita, intinya jika sudah terverifikasi itu akan ada utusan tim yan dimaksud contohnya perangkat kelurahan dan lainnya, walaupun namanya tidak penanggung jawab termasuk di tim itu yang jelas didalamnya perekrutan penerima PKH itu hasil dari verifikasi, ada namanya musyawarah kelurahan yang

		terdiri dari petugas PKH, Dinas Sosial, Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya jika tidak ada kata pilih kasih makanya kita melibatkan masyarakat didalamnya seperti babinsa, aparat keamanan baik polisi dan tentara dan lain sebagainya. Itulah sistemnya tadi untuk penerima PKH kan pada prinsipnya ini kan bidang bukan saya selaku lurah
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima PKH saat ini sudah tepat sasaran? Mengapa?	Menurut saya sudah tepat sasaran, karena merekrut itu tadi ada tim seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, seperti terdiri dari dinas sosial, tokoh-tokoh masyarakat, terdiri dari masyarakat-masyarakat disekitarnya yang memang dikatakan dia tidak mampu itu dari hasil verifikasi oleh itulah tadi ada namanya musyawarah kelurahan apakah layak dia mendapat PKH dilihat dari ekonomi keluarga penerima yang memang dikatakan kurang mampu.
7	Menurut Bapak/Ibu, Apakah bantuan PKH membantu meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi keluarga penerima?	Menurut saya jika sesaat saja memang membantu tapi jika untuk berkelanjutan saya rasa itu membuat masyarakat terlena, contohnya dikasih bantuan memang tentu terbantu, tetapi selanjutnya jika memang berkesinambungan menurut saja misalnya jika berpendirian teguh seperti yang saya katakan ini , jika kita menyewa sebidang tanahpun kita buat bercocok tanam, kita pasti akan makan itu menurut saya, tapi bagi yang lain saya gak tahu ya karena pendapat setiap orang berbeda-beda, intinya jika ada kemauan berusaha kerja pasti bisa. Jika dikatakan bermanfaat seefisien mungkin menurut saya malah lebih memanjakan kepada masyarakat ini bagi masyarakat yang memang tidak mau mandiri kesannya berharap kepada bantuan saja. Karena kebanyakan penerima PKH ini dibuat pun alasan penerima dengan kriteria dia pasti susah untuk berhenti/keluar dari PKH Karena sudah ketagihan malah menjadi perdebatan dan memicu perkelahian. Contoh ada warga yang diajukan jika dilihat secara ekonomi

		sama, tapi si A dapat PKH Si B enggak, Terakhir malah datang pertikaian padahal bukan kita sebagai perangkat kelurahan yang ajukan tapi ada data, berkas baru diajukan, intinya perekrutan PKH ini sudah tetap artinya kami tidak ada intervensi disini. Jika ada pun pengajuan pasi kita adakan rapat yang namanya tadi musyawarah kelurahan
8	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH mendorong anak penerima untuk tetap bersekolah?	Jika sudah terlibat dengan PKH memang harus bersekolah karena kan PKH ini mendorong anak tetap bersekolah itu salah satu tujuannya, dia sudah masuk dalam kategori dalam data DTKS, Karena siapapun kategori penerima PKH maka merekalah diprioritaskan
9	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penerima PKH lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan setelah mendapat bantuan?	Jika penerima PKH dibandingkan BPJS, menurut saya semua kembali kepada pelayan, jika ada SOP pelayanan itu sebenarnya gak ada pilih kasih disitu tapi ada petugas masing-masing. Memang ada itu orang yang memang di utus untuk melayani di bagian kesehatan tersebut. Intinya jangan ada pilih kasih didalamnya.
10	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa aktif pendamping PKH melakukan pembinaan kepada penerima?	Pendampingan PKH itu sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tetapi saya gak tahu jika soal masyarakatnya. Tapi mudah-mudahan keluhan soal pendamping belum ada sama saya
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH membantu keluarga menjadi lebih mandiri?	Menurut saya sama sekali tidak, tidak menjadikan masyarakat itu mandiri tapi jika terlena iya karena mereka berharap dan berharap kapan bantuan itu cair

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN *METODE AHP*
(*ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Fahru Rozi, S.Pd.I
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Pekerjaan : Koordinator PKH
Umur : 37 Tahun
Hari/ Tanggal : Senin/ 23 Februari 2026
Alamat : Salambue

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana PKH yang efektif menurut bapak/Ibu?	PKH yang efektif menurut pengalaman yang sudah kami jalankan di lapangan mulai dari PKH yang masuk di Padangsidempuan mulai Tahun 2015 sampai pada hari ini kurang lebih satu dkd 10 Tahun, yang efektif adalah bagaimana bantuan PKH itu memang tepat sasaran kepada si penerima bansos yaitu yang berhak sesuai dengan kriteria pada Tahun 2025 sesuai dengan Impres presiden No. 4 bahwa data terpadu sosial ekonomi nasional sudah diberlakukan yang kriteria penerima bansos itu mulai dari desil, yang mana ada tingkat kesejahteraan mulai dari desil 1 sampai desil 5 sebelumnya di Tahun 2025, pada hari ini 2026 penerima bansos di desil 1 sampai 4. Kalo berbicara efektif bansos ini diterima masyarakat itu kita mengacu bahwa bantuan yang diterima ini kalau saya melihatnya apakah sudah dipergunakan ataupun diperuntukkan sesuai dengan kebutuhannya baik itu ke akses pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. Jadi nominal yang diterima oleh keluarga penerima PKH apakah sudah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhannya, jika kita melihat apakah sipenerima layak menerima bansos itu

		diukur dari dia masuk desil berapa sesuai dengan DTSN mulai dari desil 1 sampai 4. Misalnya jika Ada kriteria anak sekolah SD,SMP,SMA apakah sudah mengakses pendidikan jika dia punya balita apakah sudah mengakses layanan kesehatan
2	Menurut Bapak/Ibu Apakah PKH yang sedang berjalan ini sudah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan penerima?	Kalau menurut kami sebenarnya belum 100 persen istilahnya apa yang kita harapkan itu sudah meningkat kesejahteraan si penerima. Memang beberapa tahun belakangan ini sudah ada program pemberdayaan yang diberikan kementerian sosial baik dia program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) ada yang diberikan dalam bentuk usaha, PENA ini ada macamnya ada PENA regular dan PENA berdikari, dari modal yang diberikan iu sudah dibantu pemerintah dalam program pemberdayaan.
3	Menurut Bapak/Ibu Apakah program PKH yang disertai pemberdayaan ekonomi lebih berdampak dibanding PKH biasa?	Jika kita lihat dari beberapa KPM yang menerima program pemberdayaan ada yang mempergunakan bantuan modal usaha ini ada yang meningkat ada juga yang sama sekali tidak berkembang usahanya. Kalao dari bantuan PKH yang diberikan kalo menurut kami ini hanya sebatas stimulus artinya untuk memberi penyemangat hanya sebatas bukan untuk menambah pundi penghasilan artinya mereka dengan bantuan itu tadi misalnya didalam keluarga itua ada yang 3 anak sekolah, artinya daidalam 3 itu sudah diantu pemerintah 1 atau 2 anak untuk mengakses layanan pendidikan, kalo efektifnya kami lihat masih sebatas itu.
4	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting digitalisasi dalam pelaksanaan PKH saat ini?	Yang mau dicanangkan Kementrian Sosial saat ini adalah digitalisasi bansos bukan hanya si penerima bisa mengakses bantuan sosial itu tetapi kita dari masyarakat umum itu bisa memantau melihat si penerima KPM PKH ini apakah memang bantuan yang diberikan pemerintah melalui kemensos ini sudah tepat sasaran , darisitu kita bisa melakukan usulan sanggah jika memang si penerima itu benar-benar tepat sasaran atau tidak. Sangat penting

		digitalisasi bansos bagaimana bansos itu berkembang sesuai perkembangan zaman apalagi sekarang bansos itu sudah non tunai melalui ATM bukan tunai lagi
5	Menurut Bapak/Ibu, Apakah integrasi PKH dengan program sosial lain membuat bantuan lebih tepat sasaran?	Mengenai integrasi PKH dengan program sosial lain, sebenarnya ini tergantung dari data yang ada di DTSN (Data Tunggal ekonomi Nasional) sebenarnya darisitu kita melihat apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak karena disitu sudah memuat data sosial ekonomi semua mencakup masyarakat baik dia penerima PKH ataupun tidak. Makanya tadi untuk mengukur PKH apakah sudah tepat sasaran kita bisa melihatnya dari DTSN ini. Karena jika tidak dari sini dasarnya walaupun terintegrasi dengan bantuan sosial yang lain mungkin itu tidak akan tepat sasaran. Misalnya kita katakan dari Lembaga/Kementerian lain tidak memakai data DTSN ini cuman memakai data mereka sendiri, itulah nanti yang mengakibatkan tabrakan bantuan itu makanya presiden Prabowo di Tahun 2025 data itu harus disatukan menjadi data DTSN
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima PKH saat ini sudah tepat sasaran? Mengapa?	Jika kita melihat ini, masih dikatakan angka 60-80 persen, artinya masih banyak penerima PKH itu masih berkecukupan, tetapi ada juga tadi yang bukan penerima belum tersentuh oleh bansos baik PKH ataupun bantuan lainnya. Jika ditanya PKH sudah tepat sasaran atau tidaknya jika dihitung dari persennanya paling tidak 75 persenlah dilihat dari si penerima ini yang sudah terjun langsung kelapangan dan sudah kita berikan masuka yang sudah sejahtera itu untuk graduasi mandiri melepaskan kepesertaannya apabila dia tadi sudah mampu atau sejahtera
7	Menurut Bapak/Ibu, Apakah bantuan PKH membantu meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi keluarga penerima?	Menurut saya, jika dilihat dari bansos PKH ini kan diperuntukkan untuk bantuan bersyarat atau program bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi penerima PKH ini baik anak sekolah, lansia, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tapi ada juga penerima PKH Ini mendapat

		bantuan sembako. Mungkin dari bantuan sembako inilah tadi yang 600.000 per tiga bulan itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima dan membantu ekonomi keluarga
8	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH mendorong anak penerima untuk tetap bersekolah?	Sudah memang kewajiban si penerima PKH untuk dapat memenuhi kewajiban mereka yang memiliki anak sekolah dimana kehadiran anak sekolah itu harus 85 persen . makanya diwajibkan yang mempunyai anak umurnya 21 tahun kebawah walaupun di putus sekolah dia wajib melanjutkan pendidikan, misla anak KPM putus sekolah dan umurnya belu lewat dari 21 Tahun maka kita wajib mendampingi layanan pendidikan baik untuk sekolah kesetaraan. Dan apalagi sekarang yang lagi viralnya sekolah rakyat sudah terintegrasi dengan bansos itu karena yang masuk sekolah rakyat itu yang memang harus masuk desil 1 dan 2, makanya ada anak KPM yang putus sekolah itu sudah tehubung datanya dengan kementerian sosial yang ada dalam DAPODIK, makanya kita tahu siapa yang putus sekolah dan memang beberapa hari yang lalu kita sudah terjun langsung kelapangan dan menjumpai ada 2 anak yang putus sekolah di Pijorkoling
9	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penerima PKH lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan setelah mendapat bantuan?	Memang ini sudah menjadi kewajiban bagi penerima PKH memanfaatkan layanan kesehatan karena dikewajiban mereka yang mempunyai balita itu dan lansia wajib rutin tiap bulan untuk menghadiri posyandu di kelurahan ataupun kepuskesmas
10	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa aktif pendamping PKH melakukan pembinaan kepada penerima?	Melakukan pembinaan ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pendamping PKH tiap bulannya ada pertemuan P2K2 untuk merubah pola pikir dan perilaku sipenerima manfaat dan disela-sela itu kita memang rutin selalu melakukan pendampingan apabila ada tadi respon pengaduan kepada pendamping. Intinya memang pendamping aktif dilapangan apalagi ada namanya GC (Ground Check) bagaimana memang yang mendapat PKH

		memang betul- betul tepat sasaran
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH membantu keluarga menjadi lebih mandiri?	Menurut kami PKH memang jika dilihat itu tergantung individu jika kita lihat fakta dilapangan jika memang keluarga ini pekerja keras pasti tanpa bantuan pun dia lebih mandiri kan. Tapi ada juga yang kita lihat dari terjun kelapangan kita lihat dengan bantuan itu memang sudah terbantu si penerima ini dan juga mereka memang bukan hanya mengharap bantuan ini tetapi bekerja sesuai pekerjaan mereka dari pagi sampai sore. Artinya PKH ini sangat membantu kondisi keluarga menjadi lebih mandiri disamping sudah mendapat bantuan pertiga bulan sekali da dengan pekerjaan tetap mereka dapat menambah penghasilan keluarga tadi, udah terbantu anak sekolahnya dan juga kebutuhan sehari-harinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Eva Julianti Hasibuan, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/Pekerjaan : Kabid PEMSOS dan PFM
Umur : 45 Tahun
Hari/ Tanggal : Selasa/ 24 Februari 2026
Alamat : Jl. Melati Gg. Amalia No. 4 Ujung Padang

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana PKH yang efektif menurut bapak/Ibu?	Pertama harus dilihat dari segi mana , jika dilihat dari segi ketepatan sasaran tentu bisa iya bisa enggak tergantung kita menilai dari segi mana, misalnya turun dan naiknya angka kemiskinan seharusnya kata efektif itu berarti sudah berhasil, dibanding efektif sebagian efektif, dibanding efektif ada juga yang enggak efektif harus ada indikatornya, misalnya angka kemiskinan di Indonesia menurun dengan adanya PKH, belum ada ukuran kesitu jadi sayapun tidak berani mengatakan apakah efektif atau tidak, kalau saya sebagai orang dinas sosial mengatakan efektif jawaban jujur atau enggak, kalau jawaban enggak jujur dibanding saja jujur karena itu program kami kemensos untuk memberikan bantuan. Dimana bantuan ini banyak jenisnya, seperti bantuan untuk pemberdayaannya, bantuan untuk rehabilitasi sosial, dan bantuan perlindungan dan jaminan. Kan jika bantuan PKH ini adalah untuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan disini PKH termasuk bantuan perlindungan dan jaminan sosial, selain itu ada bantuan BPJS dan KIP.
2	Menurut Bapak/Ibu Apakah PKH yang sedang berjalan ini sudah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan penerima?	Belum, kan tujuan PKH itu, jika dalam suatu program harus ada indikator keberhasilannya misalnya kita ambil contoh 1 keluarga saya memberikan

		bantuan untuk 1 keluarga dengan rutin dengan komponen klasifikasi dia mendapat bantuan itu, pertama dia miskin atau sangat miskin sekali atau isilah sekarang miskin ekstrim dan miskin tidak ekstrim sesuai dengan peraturan ataupun keputusan presiden, kemudian yang kedua dia harus ada balita, ibu hamil tapi untuk anak pertama dan kedua saja, kemudian anak SD,SMP,SMA, kemudian ada disabilitas dan lansia. Antara komponen itu jika ada salah satu didalamnya maka bisa mendapat bantuan . Indikatornya jika dikasih bantuan pasi berkurang pengeluaran, jika berkurang pengeluaran artinya pasti dia bisa menyisihkan untuk modal usaha misalnya bertani, seharusnya secara konteks semakin lama maka dia semakin naik taraf hidupnya dan dia makin lama seharusnya dia sudah bisa graduasi/ mengundurkan diri. Dan angka mengundurkan diri di PKH itu sanga kecil sekali, dipaksa pun keluar pasti bakal susah karena sudah betah dan berharap. Jadi karena gadak/ susahnya gradusi jadi kami paksa dengan peraturan maksimal 5 Tahun dia menjadi peserta PKH makanya si penerima wajib mundur jika sudah lewat batas supaya berganti dengan orang lain
3	Menurut Bapak/Ibu Apakah program PKH yang disertai pemberdayaan ekonomi lebih berdampak dibanding PKH biasa?	Semua PKH selalu ada pemberdayaan ekonominya, PKH wajib dengan pemberdayaan ekonomi itulah tugas pendamping yang sekolah tiap bulan mengadakan pertemuan dan itulah bedanya PKH dengan bantuan lainnya. Dalam pertemuan itu juga mempelajari 7 modul untuk KPM PKH. Dimana pendamping dilatih menjadi pendamping ada sertifikasi sebagai pekerja sosial itulah yang diajakakan kepada KPM sesuai modul itulah yang dikatakan pemberdayaannya. Pendamping PKH menyekolahkan KPM PKH itu jika tidak hadir dalam pertemuan makan bisa diberhentikan sebagai penerima itulah namanya komitmen penerima manfaat ataupun bantuan

		bersyarat. Jika ada balita wajib ke posyandu, jika ada anak sekolah wajib 85 persen kehadirannya disekolah.
4	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting digitalisasi dalam pelaksanaan PKH saat ini?	Sekarang semua PKH atau bisni PKH itu pake digitalisasi, yang pertama mulai dari pemberian bantuan sudah digitalisasi yaitu menggunakan ATM berarti masyarakat wajib memahami teknologi, yang kedua absensi untuk aplikasi itu berbasis online namanya aplikasi SIKS-NG Walaupun sebagian ada manual. Misalnya untuk meng ok kan saja atau <i>final closing</i> pake aplikasi semua dan harus sinkron dengan capil datanya. Bahkan penerima PKH yang ada judol, pinjaman, ada akte tanah ada kereta atas namanya yang masih bagus, anggota keluarganya asn, listriknya lebih dari 1200 watt itu terdeteksi otomatis keluar dari penerima PKH
5	Menurut Bapak/Ibu, Apakah integrasi PKH dengan program sosial lain membuat bantuan lebih tepat sasaran?	Iya, bukan integras namanya tapi kolaborasi karena diharapkan PKH kan harus berkolaborasi dengan program lain, misalnya ada penerima PKH ada anaknya 4 terus sipenerima ini sudah pada tahun keempat tentu kita berfikir bagaimana caranya dia than kelima mundur, kita kasih bantuan modal untuk ekonomi tapi dia tidak ada keterampilan, dia hanya pandai buat kue tetapi dalam artian hanya pandai saja tanda kutip rasanya, estetika, pemasaran masih kurang maka berkolaborasi misalnya dengan disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Jika kita bisa mengkolaborasikan dengan program dari kementerian lainnya kita bisa mem push up penerima ini supaya lebih cepat mandiri dengan memberikan pelatihan pembuatan kue, modal usahanya dan kasih peralatannya dan dia bisa jualan.
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima PKH saat ini sudah tepat sasaran? Mengapa?	Menurut saya mau kearah tepat sasaran, karena datanya sudah satu data yaitu DTSN, target mereka desil 1 sampai desil 4 yang didata oleh BPS, Untuk terdata desil 1 sampai 4 berarti ada kriteria tertentu dengan survey langsung

	 UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA SYEKH ALI HASAN AHMAD PADANGSIDIMPUAN	kelapangan dimana survey itu untuk menenrukan tingkat kesejahteraan. Missal pertanyaan kepada lansia apakah memiliki kebun dan ternyata ada, dan dia mengatakan itu salah satu tambahan penghasilan, dan makannya ditanggung oleh anaknya, secara konsep dia mampu dan dia tidak terlantar, karena kategori lansia itu harus yang lansia terlantar. Karen dia lansia dan orang lain mendapat maka ada kecemburuan, secara konsep sudah benar data BPJS ini desil 1 dan 2 , dan datanya desil 6. Sementara lansia lain yang mendapat bantuan tidak memiliki apapun. Maka komentar masyarakat ini yang kadang tidak tepat sasaran. Maka indikator tepat sasaran disini memang yang betul-betul butuh. Maka lebih diprioritaskan memang yang betul-betul butuh akan bantuan itu. Untuk menjelaskan kemasyarakatan itu yang susah walaupun secara mereka tidak layak tapi mereka merasa mereka layak itulah yang menyebabkan pertikaian dan kecemburuan. Jadi apakah sudah tepat sasaran, saya pikir sudah maksimal kemensos kerjasama dengan BPS untuk menepati sasarannya. Desil 6 keatas tidak boleh dapat BPJS gratis. Misalnya 2000 dinonaktifkan yang desil 5 ke 6, bukan berarti hilang tapi dialihkan ke data penerima yang lain kan masih banyak daftar tunggu karena ada hitung-hitungan sesuai kemiskinan tingkat Kab/Kota. Contoh lain yang terdeteksi judul dan yang minjam KUR dinonaktifkan, karena dia bisa bayar judul dan pinjaman KUR tapi makan tidak bisa kan tidak mungkin dan tidak logika. Upi misalnya jika kalian tanyakan ke masyarakat sebagian orang pasti mereka bilang tidak tepat sasaran bagi yang tidak mendapat tapi jika ditanyakan ke yang udah mendapat pasti dikatakan sudah tepat sasaran. karena cemburuan dan merasa tidak tepat tapi menurut saya sudah mengarah ketepatan sasaran. Tapi yang
--	--	---

		namanya manusia pasti ada kesalahan itu namanya inclusion dan eksclusion error pasti ada silap ada tedeteksi kaya atau tidak dari beberapa persen dan sekian persennya sudah tepat sasarannya itu
7	Menurut Bapak/Ibu, Apakah bantuan PKH membantu meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi keluarga penerima?	Ya sangat membantu asalkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, yang gak membantu itu menggunakan bantuan PKH untuk menghamburkan uang seperi main-main dan belanja-belanja yang tidak sesuai peruntukan, kadang malah dijadikan jaminan atau pinjaman lainnya. Contoh di Padangsidempuan sendiri jangan yang cair di atm misal yang cair dikantor pos malah setelah mendapat uang malah pergi belanja atau malah mengangsur dan menjanjikan jika cair PKH malah janji dibayar. Jika verifikasi misalnya kesekolah malah ada anak LPM yang seragamnya sudah jelak maka saya ditegaskan itu diberhentikan, karena sudah emndapat bantuan anak sekolah tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Memang kadang KPM ini nakal-nakal dan memang sebagian ada juga yang memang nurut
8	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH mendorong anak penerima untuk tetap bersekolah?	Iya karena kan seperti konsep KIP (Kartu Indonesia Pintar) gak semua orang bisa mendapatkannya, KIP itu untuk orang yang gak mampu dan benar-benar harus dibantu. Siapa yang mendapat KIP iu harus penerima PKH, sembako yang memiliki KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), anak yatim piatu dan anak korban bencana alam sudah jelas dalam peraturan permendikbud cuman menjelaskan ke masyarakat ini susah karena konsep mereka jika dapat pkh atau bantuan lain mereka cemburu karena banyak bantuan yang diterima. Mereka tidak sadar memang konsepnya seperti itu itu namanya komplementer dimana banyak dikasih bantuan itu gimana caranya biar cepat sejahtera dan graduasi mandiri tapi di konsep masyarakat jika dapat bantuan satu jangan lagi dengan yang lainnya. Kalau dia memanfaatkan PKH itu insyaallah akan bagus karena bakal dapat KIP dan bantuan

		lainnya. Jika ditanyak ada gak anak KH yang berhasil pasti ada ya iu tergantung mindset orang tuanya dan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya
9	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penerima PKH lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan setelah mendapat bantuan?	Itulah yang saya katakan tadi itu komitmen, misalnya PKH lansia wajib ke posyandu begitu juga balita dan ibu hamil walaupun dihitung komponen ba,itanya seperti wajib ikut ke posyandu balita dan dikasih BPJS gratis supaya bisa berobat ke puskesmas tanpa khawatir memikirkan bayarannya.
10	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa aktif pendamping PKH melakukan pembinaan kepada penerima?	Aktif karena itu bagian dari tugas mereka karena mereka digaji untuk itu tiap bulan harus ada laporan mereka, terutama mereka sudah jadi P3K, Jadi harus ada progresnya dan laporannya lengkap dan mereka wajib melakukan pendampingan untuk KPM PKH ini tapi sekarang kembali apa bisa diatur KPM PKH nya jika tidak bisa di dikeluarkan saja/ memang banyak juga yang sudah graduasi mandiri dan mengundurkan diri dari penerima dan secara sadar mundur supaya bisa berganti dengan orang yang lebih butuh. Dari situlah diukur indicator penerima PKH itu apakah mampu berhasil dan mandiri setelah diberikan bantuan PKH
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH membantu keluarga menjadi lebih mandiri?	Ya tentu, sesuai modul yang diajarkan itu, supaya mereka bisa lebih mandiri, seperti modul sunting, modul kesehatan, modul pengaturan keuangan, modul pola asuh anak dan lainnya supaya KPM PKH bisa lebih mandiri dan berani mengajukan diri untuk graduasi.

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Suriani
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 48 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum/at/ 13 Februari 2026
Alamat : Kelurahan Pijorkoling

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana PKH yang efektif menurut bapak/Ibu?	PKH yang efektif menurut saya yaitu bagi saya selaku yang kurang mampu, Alhamdulillah mendapat tambahan dengan bantuan ini dan saya katakan efektif karena menurut saya memang sudah tepat sasaran seperti kami yang sudah mendapat manfaat dari PKH ini
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH yang sedang berjalan ini sudah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan penerima?	Cukup Efektif Alhamdulillah, Karena menurut saya tentunya kami selaku penerima PKH ini tentu meningkatkan kesejahteraan dengan adanya bantuan saat ini
3	Menurut Bapak/Ibu, Apakah program PKH yang disertai pemberdayaan ekonomi lebih berdampak dibanding PKH biasa?	Menurut saya dampaknya jika penerima ini, Alhamdulillah dengan PKH ini bertambah pendapatan keluarga dan sangat membantu bagi kami khususnya si penerima PKH, Seperti hal nya membantu dalam hal keperluan sekolah anak dan lainnya
4	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting digitalisasi dalam pelaksanaan PKH saat ini?	Perkembangan digitalisasi itu sangat penting menurut saya, jadi kita tahu kapan informasi di media sosial tentang PKH ini. Kan pengajuan dan data data penerima sekarang juga sudah berbasis digital.
5	Menurut Bapak/Ibu, Apakah integrasi PKH dengan program sosial lain membuat bantuan lebih tepat sasaran?	Alhamdulillah tepat sasaran, tapi di PKH ini bantuan besyarat yang memang mengadakan pertemuan tiap bulannya tidak seperti bantuan lainnya
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima	Ya menurut saya sudah tepat sasaran,

	PKH saat ini sudah tepat sasaran? Mengapa?	karena saya lihat di kelurahan pijorkoling ini yang mendapat PKH memang betul yang kurang mampu dan layak dibantu ekonominya
7	Menurut Bapak/Ibu, Apakah bantuan PKH membantu meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi keluarga penerima?	Sebagian bisa dapat meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi seperti kami, misalnya jika sudah cukup untuk anak sekolah terkadang dibuat juga untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi karena saya selaku penerima dengan kriteria penerima bantuan karena saya memiliki anak sekolah jadi harus didahulukan untuk kebutuhan sekolah dahulu kemudian sisanya untuk kebutuhan lainnya
8	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH mendorong anak penerima untuk tetap bersekolah?	Ya sangat mendorong karena memang PKH ini diperuntukkan untuk anak sekolah khususnya
9	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penerima PKH lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan setelah mendapat bantuan?	Iya lebih rutin untuk mendapat layanan kesehatan seperti BPJS kesehatan yang gratis, misalnya ada pelayanan kesehatan makan penerima PKH dianjurkan untuk datang misalnya ke posyandu atau ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan, misal ibu hamil, lansia/jompo dan anak balita ke posyandu dan orang dewasa bisa ke puskesmas
10	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa aktif pendamping PKH melakukan pembinaan kepada penerima?	Ya sangat aktif setiap bulan, kami ada pertemuan setiap bulan dan pendamping sangat aktif dalam melakukan pertemuan dan juga memberikan arahan ataupun bimbingan kepada kami
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH membantu keluarga menjadi lebih mandiri?	Iya lebih mandiri, dengan kata lain jangan mengharap dan fokus dari PKH ini saja, karena tujuan dari PKH ini sendiri untuk membuat kita mandiri setelah kita sudah merasa kita layak untuk graduasi sesuai dengan aturan yang 5-10 Tahun keatas diharuskan untuk graduasi mandiri.

INSTRUMEN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN METODE AHP
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/Pekerjaan : Pendamping PKH
Umur : 33 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum'at/ 27 Februari 2026
Alamat : Manunggang Julu

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana PKH yang efektif menurut bapak/Ibu?	Pada dasarnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dimana berupa bantuan Tunai Bersyarat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial, tetapi masih ada anggota PKH yang sudah mendapat PKH selama 5 sampai 10 Tahun yang belum mau untuk graduasi mandiri berarti ini dalam artian mereka belum merasa sejahtera padahal sudah mendapat bantuan sosial dimana tujuan dari graduasi mandiri ini adalah pemerintah ingin keluarga penerima PKH ini mampu mandiri secara ekonomi setelah mendapat dukungan berupa bantuan sosial sehingga nantinya bisa berganti dengan orang yang memang layak untuk dibantu. Efektif itu berarti sudah berhasil, dibilang efektif sebagian efektif, dibilang efektif ada juga yang enggak efektif harus ada indikatornya, misalnya angka kemiskinan di Indonesia menurun dengan adanya PKH, belum ada ukuran kesitu jadi sayapun tidak berani mengatakan apakah efektif atau tidak, memang beberapa KPM ada yang sudah graduasi berarti itu bisa dikatakan program ini berhasil walaupun belum sepenuhnya.
2	Menurut Bapak/Ibu Apakah PKH yang sedang berjalan ini sudah cukup efektif	Belum, kan tujuan PKH itu untuk kesejahteraan dan pm menjadi mandiri tetapi lebih banyak yang ingin menetap dibandingkan graduasi

	meningkatkan kesejahteraan penerima?	(keluar dari kepesertaan PKH). jika dalam suatu program harus ada indicator keberhasilannya jika dikasih bantuan pasti berkurang pengeluaran, jika berkurang pengeluaran artinya pasti dia bisa menyisihkan untuk modal usaha misalnya bertani, seharusnya secara konteks semakin lama maka dia semakin naik taraf hidupnya dan dia makin lama seharusnya dia sudah bisa graduasi/ mengundurkan diri tetapi itu sangat kecil walaupun ada beberapa yang memberanikan diri untuk graduasi
3	Menurut Bapak/Ibu Apakah program PKH yang disertai pemberdayaan ekonomi lebih berdampak dibanding PKH biasa?	Ya PKH tujuannya pemberdayaan ekonomi itulah tugas kami pendamping yang tiap bulan mengadakan pertemuan dan itulah bedanya PKH dengan bantuan lainnya. PKH kan bantuan bersyarat jadi harus mengikuti aturan misalnya jika tidak hadir dalam pertemuan makan bisa diberhentikan sebagai penerima itulah namanya komitmen penerima manfaat ataupun bantuan bersyarat. Jika ada balita wajib ke posyandu, jika ada anak sekolah wajib 85 persen kehadirannya disekolah.
4	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa penting digitalisasi dalam pelaksanaan PKH saat ini?	Sekarang semua PKH itu berbasis digital mulai dari pemberian bantuan menggunakan ATM, data-datanya pun berbasis online yang bisa dicek melalui aplikasi SIKS-NG. Bahkan penerima PKH yang ada judol, pinjaman, ada akte tanah ada kereta atas namanya yang masih bagus, anggota keluarganya asn, listriknya lebih dari 1200 watt itu terdeteksi otomatis keluar dari penerima PKH. Dan masyarakat bisa mengajukan sanggah melalui aplikasi bansos jika memang merasa layak atau tidak layak untuk diterima pkh.
5	Menurut Bapak/Ibu, Apakah integrasi PKH dengan program sosial lain membuat bantuan lebih tepat sasaran?	Mengenai integrasi PKH dengan program sosial lain, sebenarnya ii tergantung dari data yang ada di DTSN (Data Tunggal ekonomi Nasional) sebenarnya darisitu kita melihat apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak karena disitu sudah memuat data sosial ekonomi semua mencakup masyarakat baik dia penerima PKH ataupun tidak. Makanya tadi untuk mengukur PKH apakah sudah tepat sasaran kita bisa melihatnya dari dtsn ini. Karena jika tidak dari sini dasarnya walaupun

		terintegrasi dengan bantuan sosial yang lain mungkin itu tidak akan tepat sasaran. Misalnya kita katakan dari lembaga/kementerian lain tidak memakai data DTSN ini tapi memakai data mereka sendiri, itulah nanti yang mengakibatkan tabrakan bantuan itu makanya presiden Prabowo di Tahun 2025 data itu harus disatukan menjadi data DTSN
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah penerima PKH saat ini sudah tepat sasaran? Mengapa?	Menurut saya mau kearah tepat sasaran, karena datanya sudah satu data yaitu DTSN, target mereka desil 1 sampai desil 4 yang didata oleh BPS, Untuk terdata desil 1 sampai 4 berarti ada kriteria tertentu dengan survey langsung kelapangan dimana survey itu untuk menenrukan tingkat kesejahteraan. Sudah maksimal kemensos kerjasama dengan BPS untuk menepat sasarkannya. Desil 6 ke atas tidak boleh dapat BPJS gratis. Misalnya 2000 dinonaktifkan yang desil 5 ke 6, bukan berrati hilang tapi dialihkan ke data penerima yang lain kan masih banyak daftar tunggu tapi tentu kesilapan itu namanya inclusion dan eksclusion error pasti ada silap ada terdeteksi kaya atau tidak dari beberapa persen dan sekian persennya sudah tepat sasarnya itu
7	Menurut Bapak/Ibu, Apakah bantuan PKH membantu meningkatkan kesejahteraan terutama kondisi ekonomi keluarga penerima?	Ya sangat membantu untu kesejahteraan penerima asalkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, yang gak membantu itu menggunakan bantuan PKH untuk menghamburkan uang seperi main-main dan belanja-belanja yang tidak sesuai peruntukan, kadang malah dijadikan jaminan atau pinjaman lainnya. Sebenarnya itu tergantung si penerima dalam hal memanfaatkan bantuan itu sebaik mungkin.
8	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH mendorong anak penerima untuk tetap bersekolah?	Iya karena kan seperti konsep KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak semua orang bisa mendapatkannya, KIP itu untuk orang yang tidak mampu dan benar-benar harus dibantu. Siapa yang mendapat KIP iu harus penerima PKH, tentunya dengan adanya KIP Atau seperti Program Sekolah Rakyat Itu kan lebih dikhususkan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu maka dibuatkan sekolah garis , karena itulah dengan PKH ini tentu

		menarik minat anak untuk bersekolah.
9	Menurut Bapak/Ibu, Apakah penerima PKH lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan setelah mendapat bantuan?	Ya tentu karena dengan menjadi anggota PKH itu disarankan supaya rutin berobat seperti wajib ikut ke posyandu balita dan dikasih BPJS gratis supaya bisa berobat ke puskesmas tanpa khawatir memikirkan bayarannya.
10	Menurut Bapak/Ibu, Seberapa aktif pendamping PKH melakukan pembinaan kepada penerima?	Aktif karena itu bagian dari tugas kami selaku pendamping PKH menerima keluhan dan pertanyaan, dan memberikan arahan dan selalu mendampingi KPM. Disamping itu kami tiap bulan harus ada laporan itu makanya itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami sebagai pendamping PKH. Kami itu ada progresnya dan laporannya. dan kami selalu mendampingi KPM untuk semangat dan berusaha memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin misalnya diarahkan untuk mandiri dan pemberdayaan dengan berani keluar dari PKH dengan bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Dari situ lah diukur indikator penerima PKH itu apakah mampu berhasil dan mandiri setelah diberikan bantuan PKH
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah PKH membantu keluarga menjadi lebih mandiri?	Ya tentu, Ada modul yang harus dipelajari dan dipelajari KPM juga itulah yang diajarkan saat pertemuan supaya mereka bisa lebih mandiri, seperti modul stunting, modul kesehatan, modul pengaturan keuangan, modul pola asuh anak, dan lainnya supaya KPM PKH bisa lebih mandiri dan berani mengajukan diri untuk graduasi.

LEMBAR PENILAIAN RESPONDEN-FGD AHP

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Zulkarnain Hidayat, S.Sos
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Pekerjaan : Lurah
Umur : 54 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum'at/ 13 Februari 2026
Alamat : Kelurahan Pijorkoling

Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Alternatif:

A1 = PKH Reguler

A2 = PKH + Pemberdayaan

A3 = PKH Digital

A4 = PKH Terintegrasi

Kriteria:

K1 = Ketepatan Sasaran

K2 = Kesejahteraan Ekonomi

K3 = Akses Pendidikan

K4 = Akses Kesehatan

K5 = Efektivitas Pendampingan

K6 = Keberlanjutan & Kemandirian

Petunjuk Pengisian Skala AHP

Nilai	Arti
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

1. Perbandingan Penilaian Kriteria

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	K1 Ketepatan Sasaran vs K2 Kesejahteraan Ekonomi	7	K2
2	K1 Ketepatan Sasaran vs K3 Akses Pendidikan	5	K1
3	K1 Ketepatan Sasaran vs K4 Akses Kesehatan	3	K1
4	K1 Ketepatan Sasaran vs K5 Efektivitas Pendampingan	1	
5	K1 Ketepatan Sasaran vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
6	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K3 Akses Pendidikan	3	K2
7	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K4 Akses Kesehatan	3	K2
8	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K1
9	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	K6

	Keberlanjutan & Kemandirian		
10	K3 Akses Pendidikan vs K4 Akses Kesehatan	1	
11	K3 Akses Pendidikan vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K3
12	K3 Akses Pendidikan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K3
13	K4 Akses Kesehatan vs K5 Efektivitas Pendampingan	3	K4
14	K4 Akses Kesehatan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	
15	K5 Efektivitas Pendampingan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	K6

2. Perbandingan Alternatif Per Kriteria

a) Kriteria: Ketepatan Sasaran

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A2
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	A3
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

b) Kriteria: Kesejahteraan Ekonomi

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	7	A2

5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

c) Kriteria: Pendidikan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	1	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

d) Kriteria: Kesehatan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	7	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3

e) Kriteria: Efektivitas Pendampingan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A31 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	A3

f) Kriteria: Keberlanjutan dan Kemandirian

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

LEMBAR PENILAIAN RESPONDEN-FGD AHP

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Fahru Rozi, S.Pd.I
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Pekerjaan : Koordinator PKH
Umur : 37 Tahun
Hari/ Tanggal : Senin/ 23 Februari 2026
Alamat : Salambue

Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Alternatif:

A1 = PKH Reguler

A2 = PKH + Pemberdayaan

A3 = PKH Digital

A4 = PKH Terintegrasi

Kriteria:

K1 = Ketepatan Sasaran

K2 = Kesejahteraan Ekonomi

K3 = Akses Pendidikan

K4 = Akses Kesehatan

K5 = Efektivitas Pendampingan

K6 = Keberlanjutan & Kemandirian

Petunjuk Pengisian Skala AHP

Nilai	Arti
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

3. Perbandingan Penilaian Kriteria

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	K1 Ketepatan Sasaran vs K2 Kesejahteraan Ekonomi	1	
2	K1 Ketepatan Sasaran vs K3 Akses Pendidikan	1	
3	K1 Ketepatan Sasaran vs K4 Akses Kesehatan	5	K1
4	K1 Ketepatan Sasaran vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K1
5	K1 Ketepatan Sasaran vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	
6	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K3 Akses Pendidikan	7	K3
7	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K4 Akses Kesehatan	1	
8	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K5

9	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	
10	K3 Akses Pendidikan vs K4 Akses Kesehatan	1	
11	K3 Akses Pendidikan vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K3
12	K3 Akses Pendidikan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K3
13	K4 Akses Kesehatan vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K4
14	K4 Akses Kesehatan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K4
15	K5 Efektivitas Pendampingan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	

4. Perbandingan Alternatif Per Kriteria

1) Kriteria: Ketepatan Sasaran

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	5	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4

g) Kriteria: Kesejahteraan Ekonomi

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	5	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs	5	A2

	A3 PKH Digital		
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4

h) Kriteria: Pendidikan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	5	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	1	
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4

i) Kriteria: Kesehatan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	1	
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	1	
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	1	
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	1	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

j) Kriteria: Eefektivitas Pendampingan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/
----	--------------	-------	----------------

			Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	5	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A1
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	1	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4

k) Kriteria: Keberlanjutan dan Kemandirian

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	5	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A1
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	1	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4

LEMBAR PENILAIAN RESPONDEN-FGD AHP
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DI
KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Eva Julianti Hasibuan, S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan/Pekerjaan : Kabid PEMSOS dan PFM
 Umur : 45 Tahun
 Hari/ Tanggal : Selasa/ 24 Februari 2026
 Alamat : Jl. Melati Gg. Amalia No. 4 Ujung Padang

Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Alternatif:

A1 = PKH Reguler

A2 = PKH + Pemberdayaan

A3 = PKH Digital

A4 = PKH Terintegrasi

Kriteria:

K1 = Ketepatan Sasaran

K2 = Kesejahteraan Ekonomi

K3 = Akses Pendidikan

K4 = Akses Kesehatan

K5 = Efektivitas Pendampingan

K6 = Keberlanjutan & Kemandirian

Petunjuk Pengisian Skala AHP

Nilai	Arti
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

2) Perbandingan Penilaian Kriteria

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	K1 Ketepatan Sasaran vs K2 Kesejahteraan Ekonomi	7	K3
2	K1 Ketepatan Sasaran vs K3 Akses Pendidikan	5	K3
3	K1 Ketepatan Sasaran vs K4 Akses Kesehatan	5	K4
4	K1 Ketepatan Sasaran vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K1
5	K1 Ketepatan Sasaran vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	K6
6	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K3 Akses Pendidikan	7	K2
7	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K4 Akses Kesehatan	3	K2
8	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K2

9	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K2
10	K3 Akses Pendidikan vs K4 Akses Kesehatan	1	K6
11	K3 Akses Pendidikan vs K5 Efektivitas Pendampingan	1	
12	K3 Akses Pendidikan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	K3
13	K4 Akses Kesehatan vs K5 Efektivitas Pendampingan	3	K5
14	K4 Akses Kesehatan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
15	K5 Efektivitas Pendampingan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	

3) Perbandingan Alternatif Per Kriteria

l) Kriteria: Ketepatan Sasaran

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A1
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A1
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

m) Kriteria: Kesejahteraan Ekonomi

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs	5	A2

	A3 PKH Digital		
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3

n) Kriteria: Pendidikan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A1
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A4
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

o) Kriteria: Kesehatan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A1
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	A3

p) Kriteria: Efektivitas Pendampingan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	1	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A4

q) Kriteria: Keberlanjutan dan Kemandirian

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	9	A1
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

LEMBAR PENILAIAN RESPONDEN-FGD AHP

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Suriani
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 48 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum/at/ 13 Februari 2026
Alamat : Kelurahan Pijorkoling

Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Alternatif:

A1 = PKH Reguler

A2 = PKH + Pemberdayaan

A3 = PKH Digital

A4 = PKH Terintegrasi

Kriteria:

K1 = Ketepatan Sasaran

K2 = Kesejahteraan Ekonomi

K3 = Akses Pendidikan

K4 = Akses Kesehatan

K5 = Efektivitas Pendampingan

K6 = Keberlanjutan & Kemandirian

Petunjuk Pengisian Skala AHP

Nilai	Arti
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

4) Perbandingan Penilaian Kriteria

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	K1 Ketepatan Sasaran vs K2 Kesejahteraan Ekonomi	1	
2	K1 Ketepatan Sasaran vs K3 Akses Pendidikan	3	K3
3	K1 Ketepatan Sasaran vs K4 Akses Kesehatan	1	
4	K1 Ketepatan Sasaran vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K1
5	K1 Ketepatan Sasaran vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
6	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K3 Akses Pendidikan	3	K2
7	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K4 Akses Kesehatan	3	K2
8	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K5 Efektivitas Pendampingan	5	K2

	Efektivitas Pendampingan		
9	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K2
10	K3 Akses Pendidikan vs K4 Akses Kesehatan	3	K4
11	K3 Akses Pendidikan vs K5 Efektivitas Pendampingan	3	K3
12	K3 Akses Pendidikan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
13	K4 Akses Kesehatan vs K5 Efektivitas Pendampingan	1	
14	K4 Akses Kesehatan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
15	K5 Efektivitas Pendampingan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6

5) Perbandingan Alternatif Per Kriteria
r) Kriteria: Ketepatan Sasaran

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

s) Kriteria: Kesejahteraan Ekonomi

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	7	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4

4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A3
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	7	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3

t) Kriteria: Pendidikan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

u) Kriteria: Kesehatan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	5	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	5	A3

v) Kriteria: Efektivitas Pendampingan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A1
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	A4

w) Kriteria: Keberlanjutan dan Kemandirian

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	9	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	9	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2

LEMBAR PENILAIAN RESPONDEN-FGD AHP

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) DI KELURAHAN PIJORKOLING

Nama Responden : Ayu Lestari Dalimunthe, S.Pd.I
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/Pekerjaan : Pendamping PKH
Umur : 33 Tahun
Hari/ Tanggal : Jum'at/ 27 Februari 2026
Alamat : Manunggang Julu

Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i.	

Sumber: Buku Sistem Pendukung Keputusan

Alternatif:

A1 = PKH Reguler

A2 = PKH + Pemberdayaan

A3 = PKH Digital

A4 = PKH Terintegrasi

Kriteria:

K1 = Ketepatan Sasaran

K2 = Kesejahteraan Ekonomi

K3 = Akses Pendidikan

K4 = Akses Kesehatan

K5 = Efektivitas Pendampingan

K6 = Keberlanjutan & Kemandirian

Petunjuk Pengisian Skala AHP

Nilai	Arti
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

6) Perbandingan Penilaian Kriteria

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	K1 Ketepatan Sasaran vs K2 Kesejahteraan Ekonomi	1	K2
2	K1 Ketepatan Sasaran vs K3 Akses Pendidikan	3	K3
3	K1 Ketepatan Sasaran vs K4 Akses Kesehatan	3	K4
4	K1 Ketepatan Sasaran vs K5 Efektivitas Pendampingan	1	
5	K1 Ketepatan Sasaran vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K6
6	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K3 Akses Pendidikan	1	
7	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K4 Akses Kesehatan	1	
8	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K5	5	K2

	Efektivitas Pendampingan		
9	K2 Kesejahteraan Ekonomi vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	
10	K3 Akses Pendidikan vs K4 Akses Kesehatan	1	
11	K3 Akses Pendidikan vs K5 Efektivitas Pendampingan	3	
12	K3 Akses Pendidikan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	3	K3
13	K4 Akses Kesehatan vs K5 Efektivitas Pendampingan	3	K4
14	K4 Akses Kesehatan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	5	K4
15	K5 Efektivitas Pendampingan vs K6 Keberlanjutan & Kemandirian	1	

7) Perbandingan Alternatif Per Kriteria
x) Kriteria: Ketepatan Sasaran

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

y) Kriteria: Kesejahteraan Ekonomi

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A3

4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	7	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

z) Kriteria: Pendidikan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A2
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A2
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2

aa) Kriteria: Kesehatan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	5	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	5	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

bb) Kriteria: Efektivitas Pendampingan

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	3	A2
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	1	

cc) Kriteria: Keberlanjutan dan Kemandirian

No	Perbandingan	Nilai	Lebih Penting/ Lebih Baik
1	A1 PKH Reguler vs A2 PKH + Pemberdayaan	7	A2
2	A1 PKH Reguler vs A3 PKH Digital	5	A3
3	A1 PKH Reguler vs A4 PKH Terintegrasi	7	A4
4	A2 PKH + Pemberdayaan vs A3 PKH Digital	1	
5	A2 PKH + Pemberdayaan vs A4 PKH Terintegrasi	3	A2
6	A3 PKH Digital vs A4 PKH Terintegrasi	3	A3

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Penilaian Kriteria

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
K1 vs K2	7	1	3	7	1
K1 vs K3	5	1	3	5	3
K1 vs K4	3	5	3	5	1
K1 vs K5	1	5	1	5	5
K1 vs K6	5	1	5	3	5
K2 vs K3	3	7	1	7	3
K2 vs K4	3	1	1	3	3
K2 vs K5	5	5	5	5	5
K2 vs K6	3	1	3	5	5
K3 vs K4	1	1	1	1	3
K3 vs K5	5	5	3	1	3
K3 vs K6	5	5	3	3	5
K4 vs K5	3	5	3	3	1
K4 vs K6	1	5	5	5	5
K5 vs K6	3	1	1	1	5

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
K1 vs K2	0,142857	1	0,333333	0,142857	1	0,368584
K1 vs K3	5	1	0,333333	0,2	0,333333	0,644394
K1 vs K4	3	5	0,333333	0,2	1	1
K1 vs K5	1	5	1	5	5	2,626528
K1 vs K6	0,2	1	0,2	0,333333	0,2	0,305628
K2 vs K3	3	0,142857	1	7	3	1,551846
K2 vs K4	0,333333	1	1	3	3	1,245731
K2 vs K5	5	0,2	5	5	5	2,626528
K2 vs K6	3	1	3	0,2	5	1,551846
K3 vs K4	1	1	1	1	0,333333	0,802742
K3 vs K5	5	5	0,333333	1	3	1,903654
K3 vs K6	5	5	3	3	0,2	2,14112

						7
K4 vs K5	3	5	3	3	1	2,667269
K4 vs K6	1	5	5	0,2	0,2	1
K5 vs K6	0,333333	1	1	1	0,2	0,581811

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Ketepatan Sasaran)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	9	5	7	9	9
A1 vs A3	7	5	5	9	7
A1 vs A4	5	5	7	9	5
A2 vs A3	1	5	3	3	3
A2 vs A4	5	5	3	3	5
A3 vs A4	3	5	3	3	1

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
A1 vs A2	0,111111	0,2	0,142857	0,111111	0,111111	0,131413773
A1 vs A3	0,142857	0,2	0,2	0,111111	0,142857	0,155426218
A1 vs A4	0,2	0,2	0,142857	0,111111	0,2	0,166245496
A2 vs A3	1	5	3	3	3	2,667268608
A2 vs A4	5	0,2	3	3	5	2,141127368
A3 vs A4	3	0,2	3	3	1	1,401131032

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Kesejahteraan Ekonomi)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	9	5	7	9	9
A1 vs A3	7	1	5	9	7
A1 vs A4	5	5	7	9	7
A2 vs A3	7	5	3	5	5
A2 vs A4	3	5	3	5	7
A3 vs A4	1	5	3	5	5

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
A1 vs A2	0,11111 1	5	0,14285 7	0,11111 1	0,11111 1	0,25016634 7
A1 vs A3	0,14285 7	1	0,2	0,11111 1	0,14285 7	0,21444616 4
A1 vs A4	0,2	0,2	0,14285 7	0,11111 1	0,14285 7	0,15542621 8
A2 vs A3	7	5	3	5	5	4,82865149 5
A2 vs A4	0,33333 3	0,2	3	5	7	1,47577316 2
A3 vs A4	1	0,2	3	5	5	1,71877192 8

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Aspek Pendidikan)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	7	1	7	9	7
A1 vs A3	5	1	5	9	9
A1 vs A4	5	1	7	9	5
A2 vs A3	1	1	3	1	5
A2 vs A3	1	1	3	3	5
A3 vs A4	1	1	3	3	5

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
A1 vs A2	0,11111 1	1	0,14285 7	0,11111 1	0,14285 7	0,19066184
A1 vs A3	0,2	1	0,2	0,11111 1	0,11111 1	0,21812979 7
A1 vs A4	0,2	1	0,14285 7	0,11111 1	0,2	0,22937384 2
A2 vs A3	1	1	3	1	5	1,71877192 8
A2 vs A4	1	1	3	3	5	2,14112736 8
A3 vs A4	1	1	3	3	0,33333 3	1,24573094

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Aspek Kesehatan)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	9	1	7	9	7
A1 vs A3	7	1	5	9	9
A1 vs A4	5	1	7	9	5
A2 vs A3	7	1	3	3	5
A2 vs A3	5	1	3	3	3
A3 vs A4	5	1	1	1	5

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
A1 vs A2	0,11111 1	1 1	0,14285 7	0,11111 1	0,14285 7	0,19066184
A1 vs A3	0,14285 7	1 1	0,2 1	0,11111 1	0,11111 1	0,20393388 2
A1 vs A4	0,2 1	1 1	0,14285 7	0,11111 1	0,2 1	0,22937384 2
A2 vs A3	7 1	1 1	3 1	3 1	5 1	3,15981830 6
A2 vs A4	5 1	1 1	3 1	3 1	3 1	2,66726860 8
A3 vs A4	5 1	1 1	1 1	1 1	5 1	1,90365393 9

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Efektivitas Pendampingan)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	7	5	7	9	9
A1 vs A3	7	5	5	9	9
A1 vs A4	7	5	7	9	7
A2 vs A3	5	5	3	1	5
A2 vs A3	3	1	3	1	5
A3 vs A4	1	5	1	3	1

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	Geomean
A1 vs A2	0,14285 7	0,2 1	0,14285 7	0,11111 1	0,11111 1	0,13818782 4
A1 vs A3	0,14285	5	0,2	0,11111	0,11111	0,28137362

	7			1	1	7
A1 vs A4	0,14285 7	0,2 7	0,14285 7	0,11111 1	0,14285 7	0,14531106 1
A2 vs A3	5	5	3	1	5	3,27194695
A2 vs A4	3	1	3	1	5	2,14112736 8
A3 vs A4	1	0,2	1	3	1	0,90288045 1

Hasil FGD 5 Responden Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Keberlanjutan dan Kemandirian)

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5
A1 vs A2	9	5	7	9	9
A1 vs A3	7	5	5	9	9
A1 vs A4	5	5	7	9	7
A2 vs A3	5	5	1	3	5
A2 vs A4	3	1	3	1	5
A3 vs A4	3	5	3	1	3

Perbandingan	R1	R2	R3	R4	R5	GEOMEAN
A1 vs A2	0,11111 1	0,2 7	0,14285 7	0,11111 1	0,11111 1	0,13141377 3
A1 vs A3	0,14285 7	5	0,2	0,11111 1	0,11111 1	0,28137362 7
A1 vs A4	0,2	0,2	0,14285 7	0,11111 1	0,14285 7	0,15542621 8
A2 vs A3	5	5	1	3	5	3,27194695
A2 vs A4	3	1	3	3	5	2,66726860 8
A3 vs A4	3	0,2	3	1	3	1,40113103 2

SUPER DECISIONS

Kerangka Hierarchy AHP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan Perbandingan Penilaian Kriteria

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdmmod

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

EFEKTIVITAS PKH

Cluster: GOAL

Choose Cluster

CRITERIA

Restore

2. Node comparisons with respect to EFEKTIVITAS PKH

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "EFEKTIVITAS PKH" node in "CRITERIA" cluster

AKSES KESEHATAN is moderately more important than EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. AKSES KESEHATAN	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. AKSES KESEHATAN	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. AKSES KESEHATAN	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. AKSES KESEHATAN	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. AKSES KESEHATAN	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. AKSES PENDIDIKA~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. AKSES PENDIDIKA~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. AKSES PENDIDIKA~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. AKSES PENDIDIKA~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. EFEKTIVITAS PEN~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. EFEKTIVITAS PEN~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. EFEKTIVITAS PEN~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. KEBERLANJUTAN D~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. KEBERLANJUTAN D~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. KESEJAHTERAAN E~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Restore

3. Results

Normal Hybrid

Inconsistency: 0.18336

Node	Weight
AKSES KES-	0.18209
AKSES PEN-	0.19827
EFEKTIVIT~	0.15175
KEBERLANJ~	0.12685
KESEJAHTER~	0.14073
KETEPATAN~	0.20032

Completed Comparison

Copy to clipboard

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdmmod

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

EFEKTIVITAS PKH

Cluster: GOAL

Choose Cluster

CRITERIA

Restore

2. Node comparisons with respect to EFEKTIVITAS PKH

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "EFEKTIVITAS PKH" node in "CRITERIA" cluster

KETEPATAN SASARAN is 3 times more important than KESEJAHTERAAN EKONOMI

	AKSES KESE-	AKSES PEN-	EFEKTIVITA~	KEBERLANJU~	KESEJAHTER~	KETEPATAN~
AKSES KESE-	1	3	1	1	1	1
AKSES PEN-	1	2	1	1	1	1
EFEKTIVITA~	1	2	1	1	1	1
KEBERLANJU~	1	2	1	1	1	1
KESEJAHTER~	1	2	1	1	1	1
KETEPATAN~	1	2	1	1	1	1

Restore

3. Results

Normal Hybrid

Inconsistency: 0.18336

Node	Weight
AKSES KES-	0.18209
AKSES PEN-	0.19827
EFEKTIVIT~	0.15175
KEBERLANJ~	0.12685
KESEJAHTER~	0.14073
KETEPATAN~	0.20032

Completed Comparison

Copy to clipboard

Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Ketepatan Sasaran)

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdmmod

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

KETEPATAN SASA~

Cluster: CRITERIA

Choose Cluster

ALTERNATIVES

Restore

2. Node comparisons with respect to KETEPATAN SASARAN

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "KETEPATAN SASARAN" node in "ALTERNATIVES" cluster

PKH REGULER is extremely more important than PKH DIGITAL

1.	PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>
2.	PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>
3.	PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>
4.	PKH REGULER	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>
5.	PKH REGULER	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>
6.	PKH TERINTEGRAS~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>

Restore

3. Results

Normal Hybrid

Inconsistency: 1.37870

PKH DIGIT~	0.17007
PKH REGUL~	0.27720
PKH TERIN~	0.15499
PKH+PEMBE~	0.39774

Completed Comparison

Copy to clipboard

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdmmod

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

KETEPATAN SASA~

Cluster: CRITERIA

Choose Cluster

ALTERNATIVES

Restore

2. Node comparisons with respect to KETEPATAN SASARAN

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "KETEPATAN SASARAN" node in "ALTERNATIVES" cluster

PKH REGULER is 9 times more important than PKH DIGITAL

Inconsistency

	PKH DIGITA~	PKH REGULE~	PKH TERIN~
PKH DIGITA~	↑ 9.000000	← 2	← 2
PKH REGULE~		← 0	↑ 9.000000
PKH TERIN~			← 2

Copy to clipboard

3. Results

Normal Hybrid

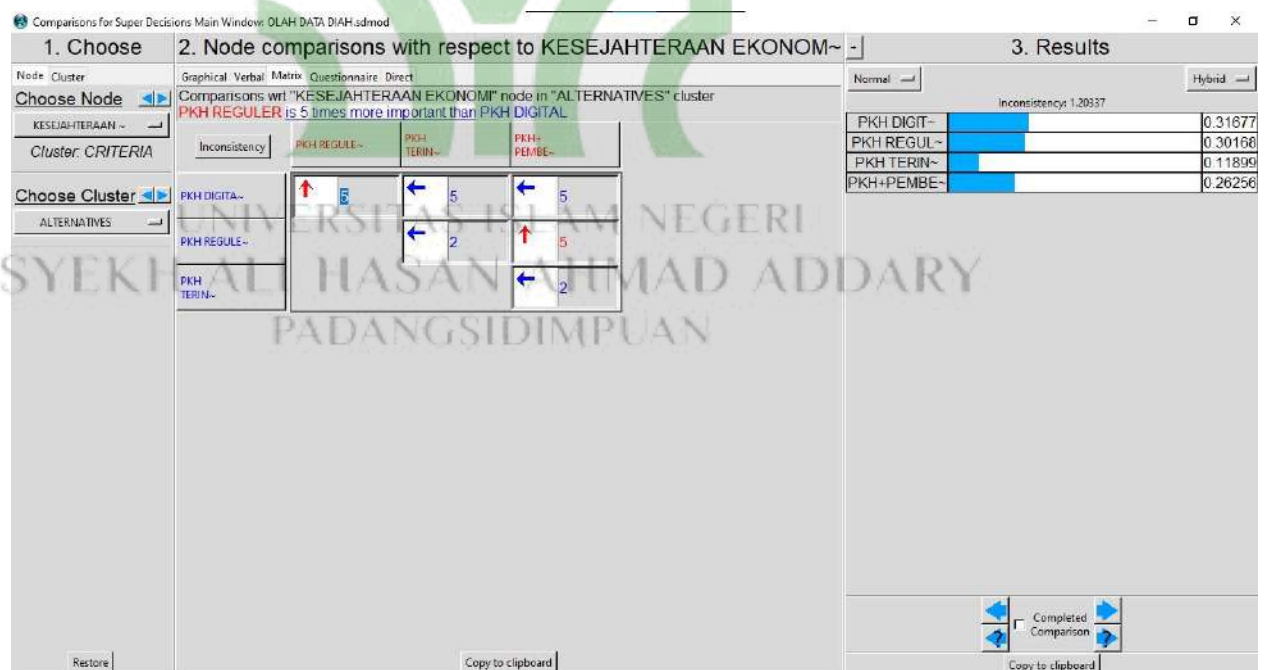
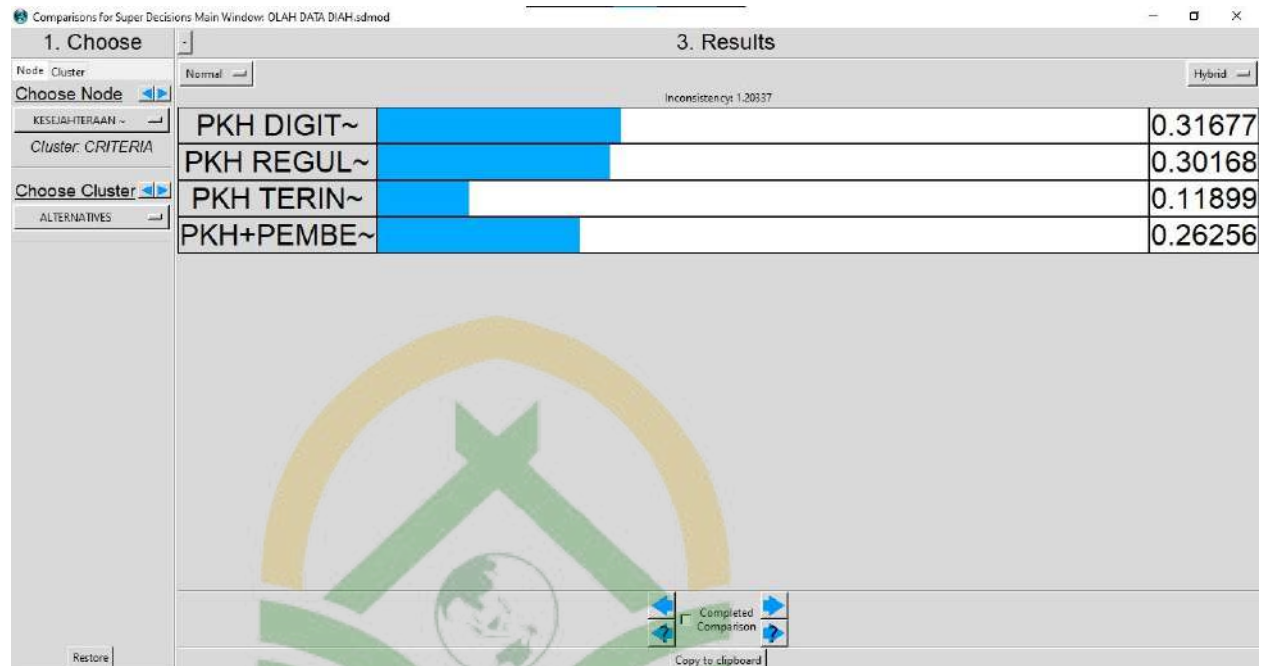
Inconsistency: 1.37870

PKH DIGIT~	0.17007
PKH REGUL~	0.27720
PKH TERIN~	0.15499
PKH+PEMBE~	0.39774

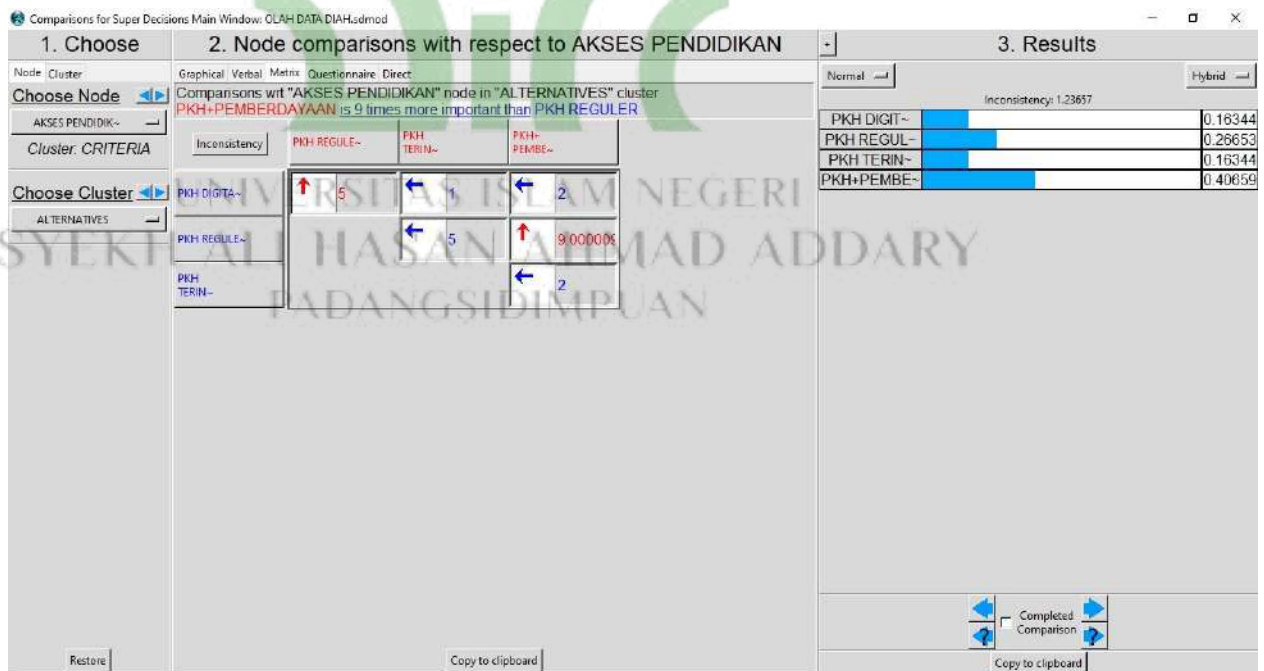
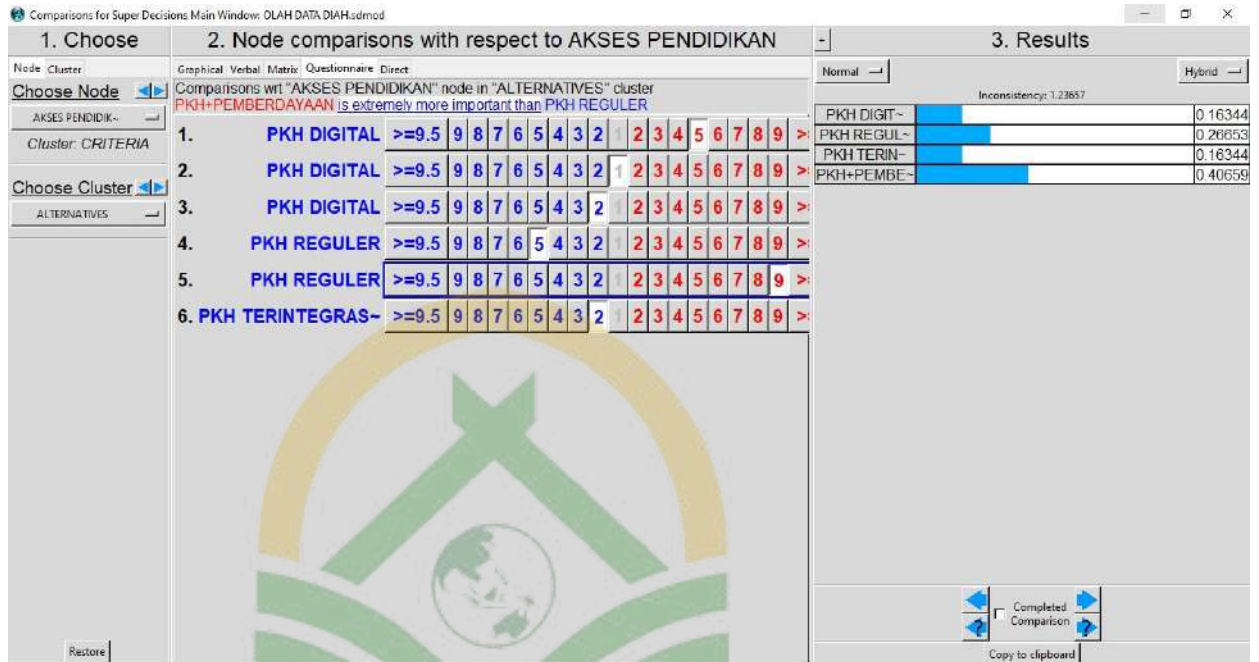
Completed Comparison

Copy to clipboard

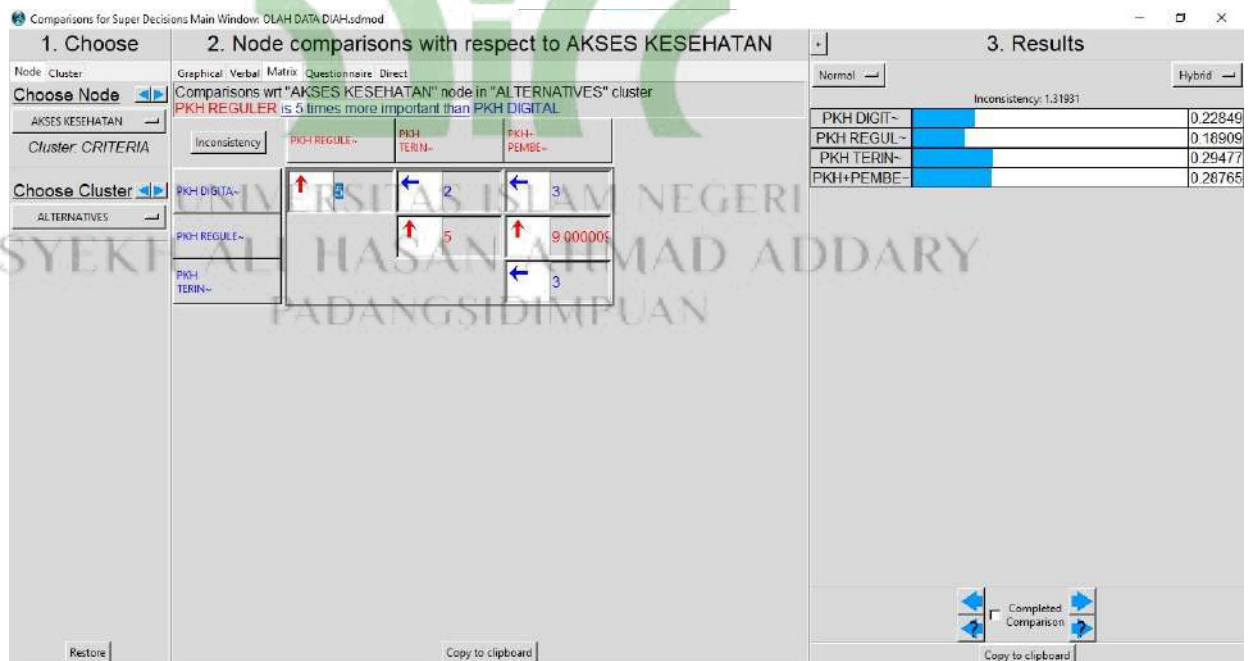
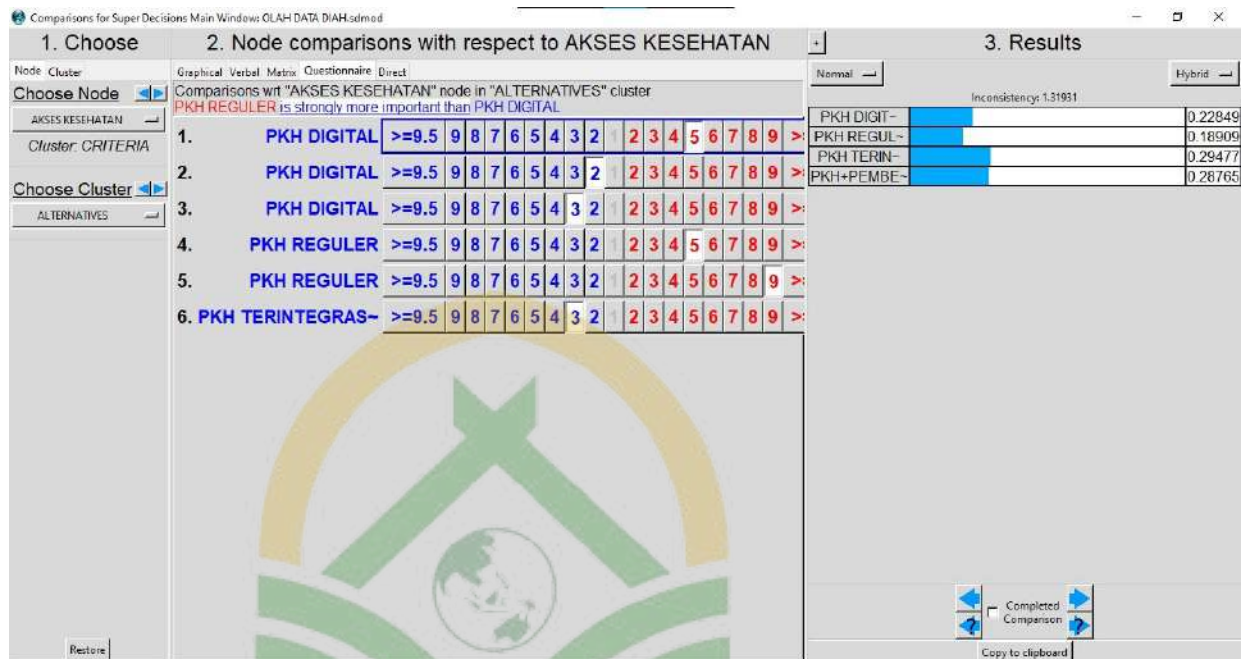
Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Kesejahteraan Ekonomi)



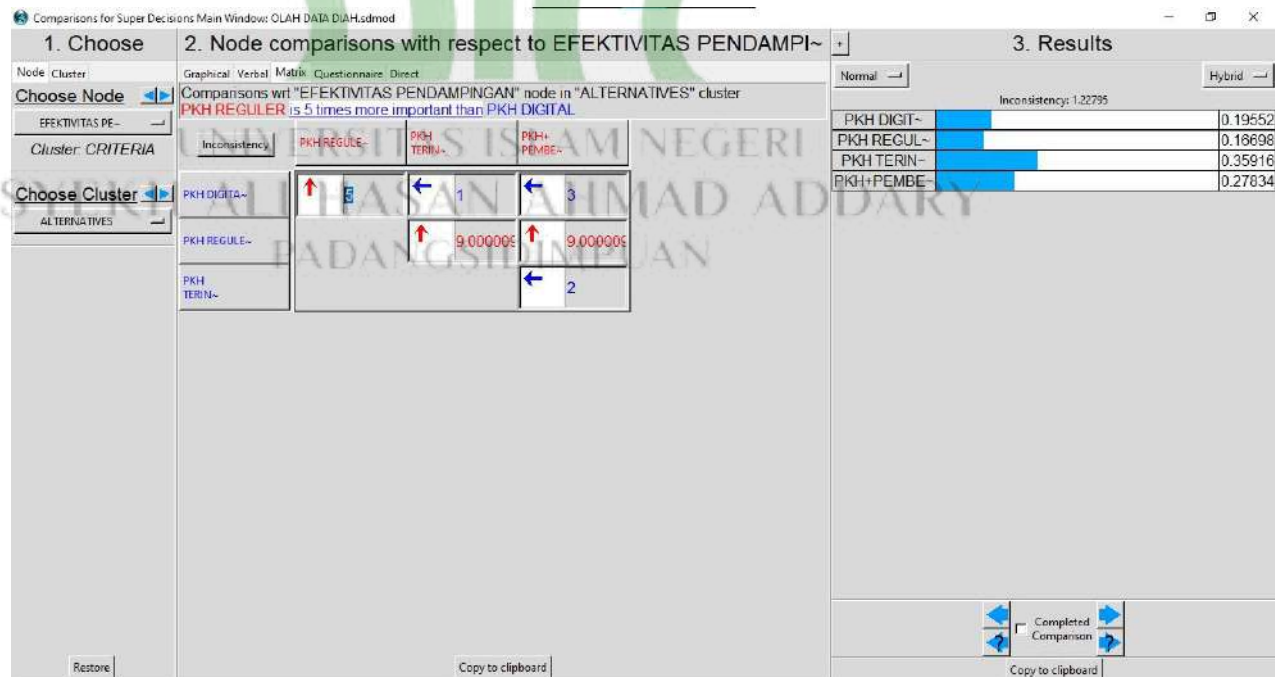
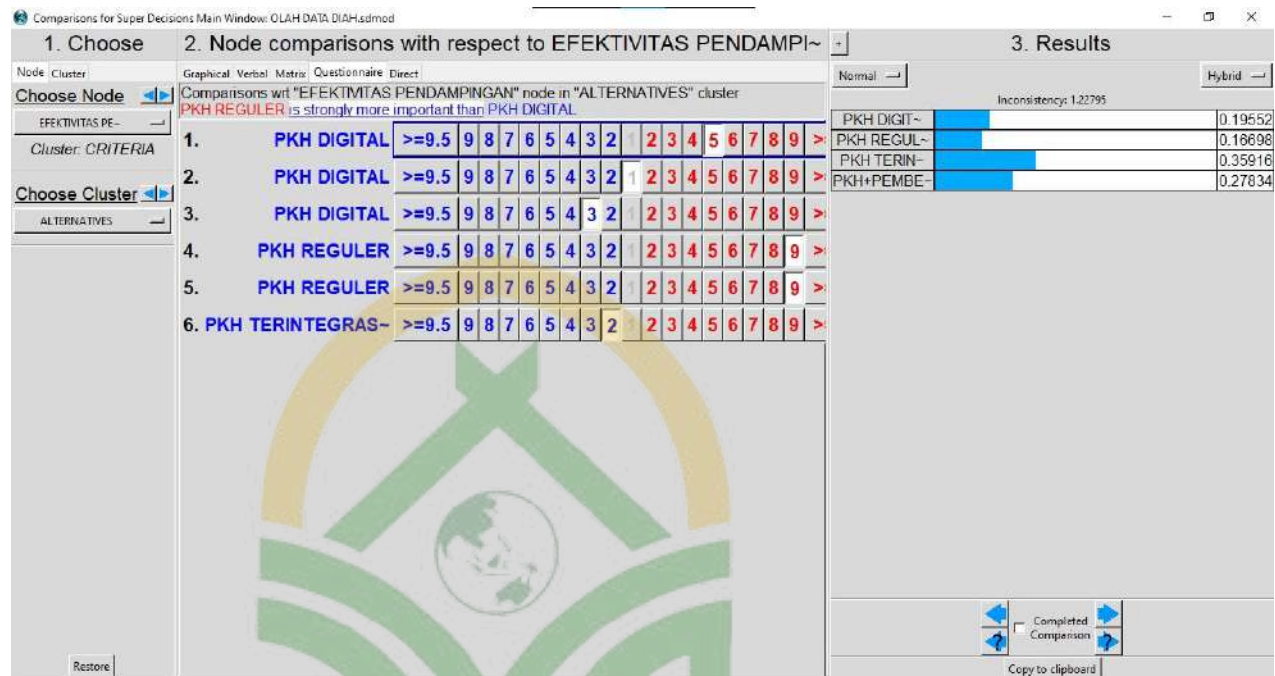
Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Aspek Pendidikan)



Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Aspek Kesehatan)



Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Ekektivitas Pendampingan)



Berdasarkan Perbandingan Alternatif Per Kriteria (Keberlanjutan dan Kemandirian)

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdm

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

KEBERLANJUTAN ~

Cluster: CRITERIA

Choose Cluster

ALTERNATIVES ~

Restore

2. Node comparisons with respect to **KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN** node in "ALTERNATIVES" cluster

Comparisons with "KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN" node in "ALTERNATIVES" cluster

PKH REGULER is strongly more important than PKH DIGITAL

1. PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=
2. PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=
3. PKH DIGITAL	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=
4. PKH REGULER	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=
5. PKH REGULER	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=
6. PKH TERINTEGRAS~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=

3. Results

Normal Hybrid

Inconsistency: 1.08047

PKH DIGIT~	0.16703
PKH REGUL~	0.15472
PKH TERIN~	0.40454
PKH+PEMBE~	0.27372

Completed Comparison

Copy to clipboard

Comparisons for Super Decisions Main Window: OLAH DATA DIAH.sdm

1. Choose

Node Cluster

Choose Node

KEBERLANJUTAN ~

Cluster: CRITERIA

Choose Cluster

ALTERNATIVES ~

Restore

2. Node comparisons with respect to **KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN** node in "ALTERNATIVES" cluster

Comparisons with "KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN" node in "ALTERNATIVES" cluster

PKH REGULER is 5 times more important than PKH DIGITAL

Inconsistency

PKH DIGIT~	1	2
PKH REGUL~	9.000000	9.000000
PKH TERIN~	3	3

Copy to clipboard

3. Results

Normal Hybrid

Inconsistency: 1.08047

PKH DIGIT~	0.16703
PKH REGUL~	0.15472
PKH TERIN~	0.40454
PKH+PEMBE~	0.27372

Completed Comparison

Copy to clipboard

**Dokumentasi dengan Kabid PEMSOS Dan PFM
di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan**



Dokumentasi dengan Lurah Di Kelurahan Pijorkoling



Dokumentasi dengan Pendamping PKH

Wawancara dan Dokumentasi dengan Pendamping PKH



Wawancara dan Dokumentasi dengan Koordinator PKH



Wawancara dan Dokumentasi dengan KPM PKH di kelurah



Dokumentasi Pemberian Surat Izin riset dengan Staff Umum Di Dinas Sosial



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

Nomor : 2835/Un.28/AL/TL.00/10/2025

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dengan ini memberikan persetujuan judul Tesis :

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM : 2450200005
Program Studi : S2-Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) di Kelurahan Pijorkoling

Dengan Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL (Isi)
2. Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M. (Metodologi)

Demikian disampaikan, harapan agar saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktur
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 2836/Un.28/AL/TL.00/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Penunjukan Pembimbing Tesis

27 Oktober 2025

Yth.

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL (Isi)
2. Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M. (Metodologi)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Kami do'akan Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan Tesis atas nama:

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM : 2450200005
Program Studi : S2-Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) di Kelurahan Pijorkoling

dengan Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL (Isi)
2. Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M. (Metodologi)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 101/Un.28/AL/TL.00/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

3 Februari 2026

Yth. Bapak/Ibu Kepala Lurah Kelurahan Pijorkoling

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM : 2450200005
Program Studi : S2-Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga
Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical
Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya
dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
KELURAHAN PIJORKOLING

JL.H.T Rizal Nurdin Km. 8,2
Padangsidempuan Tenggara, Padangsidempuan, Sumatera Utara KodePos. 22733

Pijorkoling, Februari 2026

Nomor : 420/ 125 / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Balasan Izin Riset**

Kepada :
Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Pascasarjana

di-
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: B-101/Un.28/AL/TL.00/02/2026 tanggal 3 Februari 2026 Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami dari Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan ini menerima dan memberikan Izin Riset kepada:

Nama : **HALIMAHTUS SAKDIAH DALIMUNTHE**
NPM : 2450200005
Program Studi : S2- Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) di Kelurahan Pijorkoling

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



ZULKARNAIN HIDAYAT, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720903 200701 1 026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 128/Un.28/AL/TL.00/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

23 Februari 2026

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : **Halimahtus Sakdiah Dalimunthe**
NIM : **2450200005**
Program Studi : **S2-Ekonomi Syariah**
Judul Tesis : **Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga
Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
dengan Menggunakan Metode AHP (*Analytical
Hierarchy Process*) di Kelurahan Pijorkoling**

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya
dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL 9
NIP 19680704 200003 1 003



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Kode Pos 22733
E-mail : dinassosial@padangsidimpuankota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 9/4 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUFRI NASUTION, S.Pd
NIP : 19690517 199702 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas

dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
NIM/NPM : 2450200005
Program Studi : S2-Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam rangka Penyusunan Tesis dengan Judul "*Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) di Kelurahan Pijorkoling*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN,



ZUFRI NASUTION, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690517 199702 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Halimahtus Sakdiah Dalimunthe
2. Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang Julu/ 27 September 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 5 dari 7 Bersaudara
6. Alamat : Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan
7. E-mail : halimahtussakdiahdalimunthe27@gmail.com
8. No. HP : 0852 8284 6356

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 200513 Manunggang Julu (2006 – 2012)
2. SMPN 8 Padangsidimpuan (2012 – 2015)
3. SMKN 4 Padangsidimpuan (2015 – 2018)
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2018 – 2023)
5. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2024 – 2026)

III. RIWAYAT ORANG TUA

1. Nama Ayah : Lumut Dalimunthe
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Erni Ati Lubis
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga